



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2025 – 2029



Laman Web Kami
<https://dishut.kaltimprov.go.id>



Kontak Kami
(0541) 741963



Alamat Kami
Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025 – 2029**



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2025**

KATA PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Timur sedang berproses menjalani era baru pembangunan kehutanan. Insentif yang diterima dari program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis hutan dan lahan merupakan pembelajaran pertama di Indonesia. Di kala bisnis pemanfaatan hutan berbasis hasil hutan kayu yang cenderung statis dari tahun ke tahun dalam decade terakhir, pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan model bisnis baru, termasuk untuk membuka kunci bisnis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti perdagangan karbon maupun pembayaran berbasis kinerja untuk upaya penurunan emisi GRK.

Dibukanya ruang penyelesaian konflik tenurial melalui skema Tanah untuk Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial, telah menurunkan ketidakpastian usaha kehutanan, serta memberikan ruang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Periode lima tahun sebelumnya, yang juga melalui masa pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan pergerakan ekonomi dalam berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Namun demikian, juga terjadi penurunan laju deforestasi dan emisi GRK dari sektor berbasis hutan dan lahan. Kondisi ini yang memerlukan penanganan dan pengelolaan pembangunan kehutanan secara holistik-integratif, tematik dan berbasis spasial (HITS).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2025-2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2025. Renstra Dishut Kaltim merupakan penjabaran perencanaan sektor dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dishut Kaltim ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan urusan Kehutanan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran, serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, terimakasih yang mendalam disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mulai dari persiapan penyusunan hingga

penetapan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2025.

Semoga cita-cita pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang dapat mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat segera terwujud dan semoga Kalimantan Timur semakin tangguh dan bertumbuh .

Samarinda, 7 November 2025

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP. 19750807 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematikan Penulisan	6
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.1.2. Sumber Daya	24
2.1.3. Kinerja Pelayanan	26
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	31
2.1.5. Mitra	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	35
2.2.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	35
2.2.1.1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	35
2.2.1.2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	38
2.2.1.3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	39
2.2.1.4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	40
2.2.2. Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	41
2.2.2.1. Telaah RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045.....	42
2.2.3. Penentuan Isu Strategis	42
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	56
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029	57
BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	63
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	63
4.1.1. Program Pengelolaan Hutan	63
4.1.2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	64
4.1.3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	64
4.1.4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	64

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....65

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 250

BAB V. PENUTUP..... 253

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	24
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023	27
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	28
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 - 2029	30
Tabel 5. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	31
Tabel 6. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	37
Tabel 7. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	39
Tabel 8. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	40
Tabel 9. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	41
Tabel 10. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030	48
Tabel 11. Arahan RKTP Kaltim 2011 – 2030, RTRW 2023-2042 dan Kondisi Saat ini	49
Tabel 12. Data Produksi Kayu Bulat Tahun 2018 - 2022	50
Tabel 13. Data Sumber Emisi Tahun 2018 - 2023	51
Tabel 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	54
Tabel 15. Matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra dengan RPJMD	57
Tabel 16. Tahapan Langkah Pelaksanaan Strategi Tahun 2025 - 2029	59
Tabel 17. Arah Kebijakan Renstra 2025 - 2029	61
Tabel 18. Rumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 -2029	66
Tabel 19. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	76
Tabel 20. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	201
Tabel 21. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030	211
Tabel 21. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2030	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023	9
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A	20
Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A	22
Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	23
Gambar 5. Arahana Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030	47
Gambar 6. Peta Arahana Indikatif RKTP Kalimantan Timur tahun 2011-2030	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur memiliki bentang alam berupa hutan hujan tropis yang berperan strategis dalam mendukung sistem kehidupan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menopang perekonomian daerah dan nasional. Keberadaan kawasan hutan di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting bagi sektor kehutanan, jasa lingkungan, pertanian, energi, serta menjadi pusat keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036, memiliki Hutan Lindung seluas 1.844.969 hektare; Hutan Produksi seluas 6.055.793 hektare; dan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Budaya, dan Kawasan untuk Ilmu Pengetahuan seluas 591.690 hektare, termasuk di dalamnya Taman Hutan Raya seluas 64.814,98 hektare yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Namun, tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat akibat konversi lahan, kebakaran hutan, kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan aktivitas ilegal lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hutan, sehingga mengancam fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya.

Sebagai sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat, keberadaan hutan perlu dipertahankan secara optimal dan dikelola secara berkelanjutan, bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan kehutanan yang terarah dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, terukur, dan berbasis hasil. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 perlu disusun dan ditetapkan pada tahun 2025. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur

Dalam kerangka tersebut, penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Timur secara lestari, berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2025 – 2029 mengacu pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
- f) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.249);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- k) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
- l) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
- n) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);
- o) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11;

- p) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
- q) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor XX Tahun XXXX tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun xxxx Nomor xx)
- r) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011 – 2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 21), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN Lampiran Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 55);
- s) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur;
- t) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 40);
- u) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
- v) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Laksana Penyusunan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial Di Kalimantan Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk:

- a) Menerjemahkan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya urusan pembangunan sektor Kehutanan, dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Perencanaan Sektor Kehutanan lainnya;

- b) Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi Dishut Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Sebagai salah satu acuan dalam pemantauan dan evaluasi bagi Dishut Kaltim, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan secara transparan dan akuntabel

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim bertujuan untuk;

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta rencana program, kegiatan dan anggaran Dishut Kaltim tahun 2025-2029;
- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dishut Kaltim dan UPTD pada Dishut Kaltim setiap tahun selama periode Renstra.

1.4. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dishut Kaltim tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari dokumen ini yang berisi latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisikan pelayanan Perangkat daerah yang terdiri atas tugas, fungsi, struktur Dishut Kaltim, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dan Permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2025 – 2029, berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, serta strategi dan arah kebijakan Dishut Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dishut Kaltim Tahun 2025 - 2029, serta Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dishut Kaltim melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sektor kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir dari dokumen ini yang Memuat kesimpulan penting substansial, Kaidah Pelaksanaan, dan Pelaksanaan dan Pengendalian Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dishut Kalim agar dapat berjalan baik

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

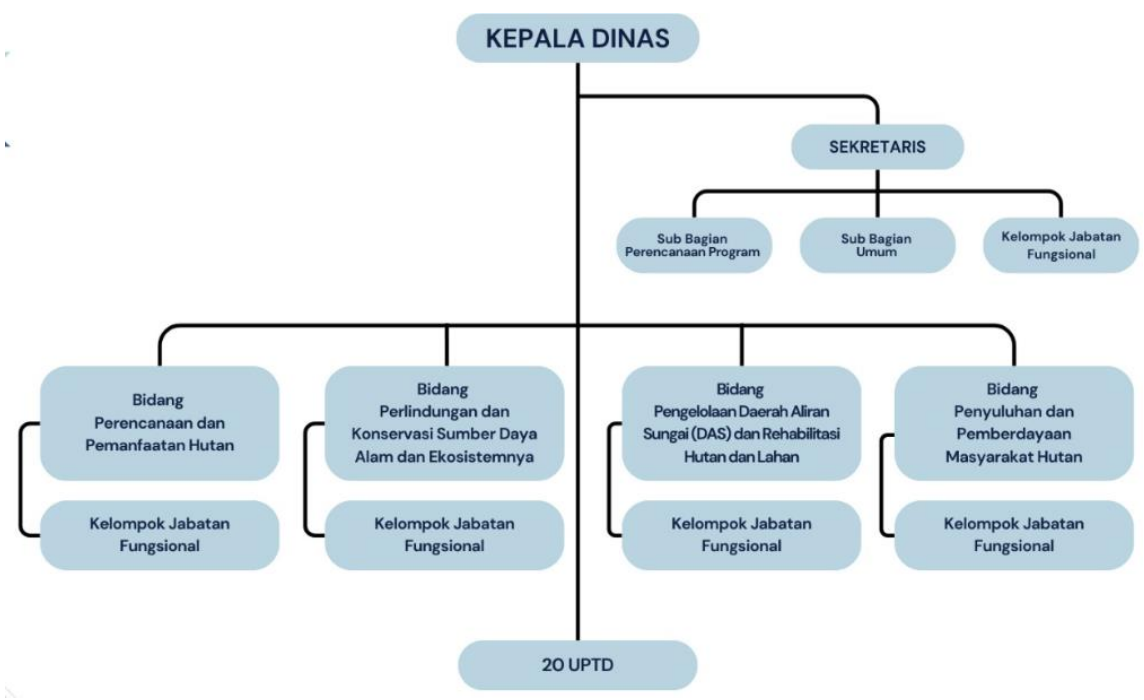
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 11 (sebelas) fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- 4) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber data dan ekosistemnya;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;

- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Cabang Dinas;
- 10) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a) Kepala Dinas,
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Cabang Dinas; dan
- h) Unit Pelaksana Teknis Daerah



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023

Penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan pelaporan, administrasi umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, serta pengelolaan aset. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki tugas pokok: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis perencanaan dan tata hutan;
- d) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan pembinaan teknik pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

- e) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pengolahan hasil hutan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengolahan hasil hutan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemantauan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- e) Melaksanakan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK), izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi, perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi, permohonan ijin lokasi terhadap status kawasan hutan;
- f) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha
- g) Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,

pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;

- h) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i) Melaksanakan rapat terkait dengan bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan, serta melaksanakan tugas lain dengan bidang tugasnya;
 - j) Melaksanakan proses penerbitan dan pengesahan Surat Keputusan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (RKT IUPHHK-HA), Restorasi Ekosistem (RE) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah Kalimantan Timur;
 - k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.
- 3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bertugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah;
- e) Menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- f) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);

- g) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan Daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi;
 - h) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.
- 4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pengelolaan Daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengelolaan daerah aliran sungai;
 - d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan tanaman hutan;
 - f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;

- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Merumuskan dan menyusun kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Daerah;
- e) merumuskan dan menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Daerah;
- f) Melaksanakan penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi untuk sinkronisasi tugas;
- h) Melaksanakan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyuluhan kehutanan;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pemberdayaan masyarakat hutan;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan hutan hak dan hutan adat;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat hutan serta pembinaan hutan hak dan hutan adat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan berdasarkan program kerja Dinas Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e) Mengendalikan pelaksanaan tugas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f) Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan hutan adat;
- g) Mengoordinasikan bimbingan teknis dan evaluasi realisasi kegiatan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yang meliputi:

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) UPTD dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut;
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XII;
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIV;
 - 3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;

- 5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVII;
- 6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVIII;
- 7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIX;
- 8) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVI;
- 9) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVII;
- 10) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIX;
- 11) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXII;
- 12) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIV;
- 13) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XX;
- 14) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXX;
- 15) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXI;
- 16) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIII ; dan

- 17) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Tanah Paser, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIV.
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu:
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXX; dan
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat meliputi kawasan hutan di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXII.
 - c. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda.

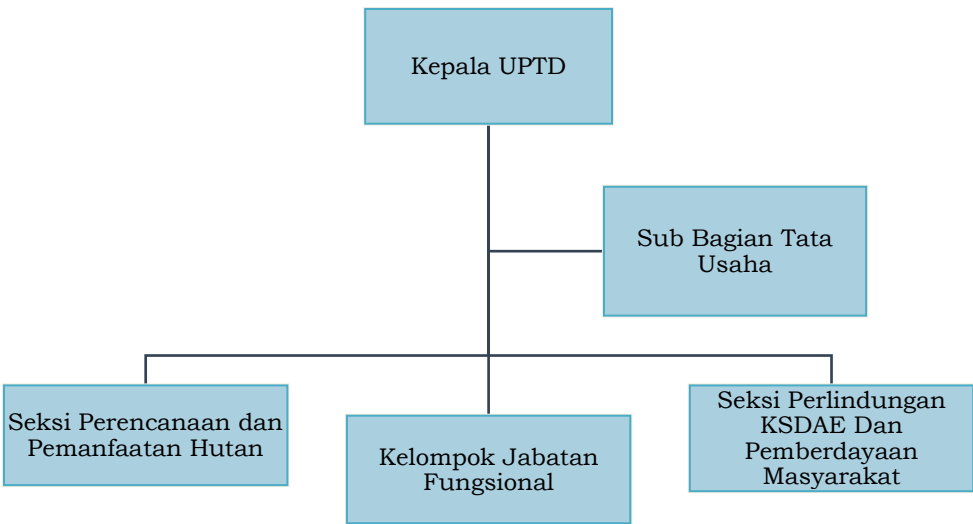
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;

- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan; pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A

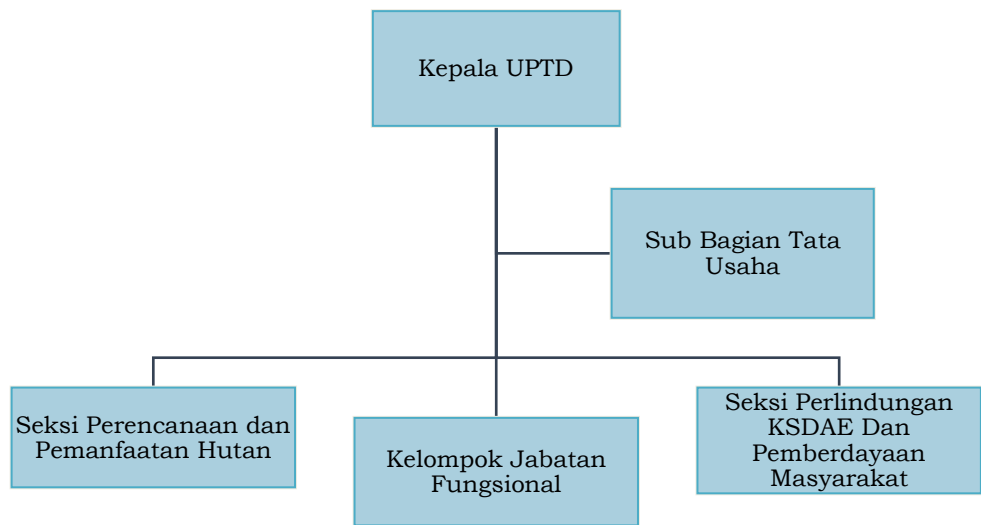
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Lindung ;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan Daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;

- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A

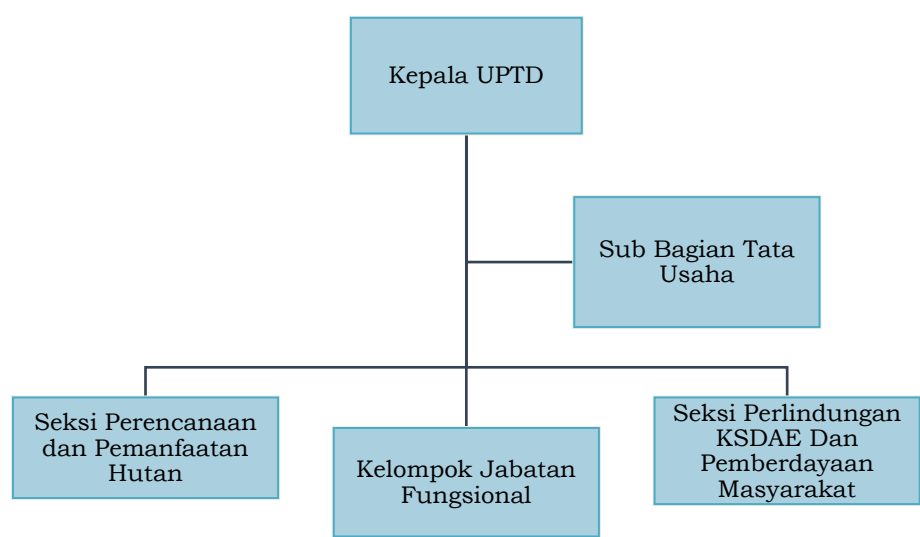
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto;
- b) pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;

- f) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- g) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- h) pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- i) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- j) pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- k) pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan Tahura.
- l) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

2.1.2. Sumber Daya

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 530 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel II. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 15,28% berpendidikan Pasca Sarjana; 43,77% berpendidikan Sarjana; 10,00% berpendidikan Diploma; 29,25 % berpendidikan SLTA dan 1,13 % berpendidikan SLTP, dan 0,57% berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	15	10	2	10	13	-	2	9	-	-	-	-
3.	Bidang Perencanaan dan PH	21	2	4	18	1	-	5	14	-	-	-	-
4.	Bidang Perlindungan dan KSDAE	21	4	2	21	2	-	3	14	2	-	-	-
5.	Bidang PDAS dan RHL	12	5	4	11	2	-	5	6	1	49	1	-
6.	Bidang PPMH	16	5	4	15	2	-	5	13	-	-	-	-
7	UPTD Tahura Bukit Soeharto	29	12	3	32	5	1	4	14	9	-	-	-
8	UPTD KPHL Balikpapan	16	1	1	14	-	2	2	6	3	4	-	-
9	UPTD KPHL Batu Rook	13	2	4	10	1	-	5	5	-	-	-	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
10	UPTD KPHP Batu Ayau	13	3	1	11	4	-	3	5	4	-	-	-
11.	UPTD KPHP Bengalon	15	7	2	16	4	-	4	10	3	4	1	-
12.	UPTD KPHP Berau Barat	13	1	3	6	5	-	3	4	1	-	-	-
13.	UPTD KPHP Berau Pantai	10	2	2	7	3	-	2	4	2	-	-	-
14.	UPTD KPHP Berau Tengah	12	-	2	8	2	-	2	3	4	14	-	-
15.	UPTD KPHP Berau Utara	14	-	1	11	2	-	1	8	1	4	-	-
16.	UPTD KPHP Bongan	15	6	1	17	3	-	2	7	3	6	-	-
17.	UPTD KPHP Damai	19	4	3	14	6	-	5	8	3	5	-	-
18.	UPTD KPHP Delta Mahakam	20	5	3	15	7	-	4	15	-	3	-	-
19.	UPTD KPHP Kelinjau	16	6	2	19	1	-	3	13	1	13	-	1
20.	UPTD KPHP Kendilo	18	3	1	16	3	1	2	9	1	4	1	1
21.	UPTD KPHP Manubar	17	5	2	18	2	-	3	11	2	5	-	-
22.	UPTD KPHP Meratus	22	9	2	24	5	-	2	13	2	4	-	-
23.	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	18	4	2	19	1	-	3	13	2	4	1	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
24.	UPTD KPHP Santan	24	7	4	22	5	-	6	9	4	5	-	1
25.	UPTD KPHP Sub Das Belayan	21	5	1	19	6	-	2	14	2	3	1	-
26.	UPTD KPHP Telake	9	2	2	7	2	-	2	5	3	3	-	-
J U M L A H		420	110	59	380	87	4	81	232	53	155	6	3
JUMLAH PNS		530											

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan. Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh memungkinkan teridentifikasinya sejumlah gap yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian

indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023

Indikator	Satuan	Target					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi lapangan usaha Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,00	1,05	1,06	1,07	1,08	0,93	1,15	1,04	0,81	0,96
Jumah Penerimaan PNPB Sektor Keutmann	Miliar Rupiah	185	190	125	125	125	184	135	264	224	177

Dalam kurun waktu 2019 – 2023 capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk indikator terkait kontribusi lapangan usaha Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB rata-rata sebesar 0,978%, dimana capaian kinerja yang melampaui target terjadi pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 capaian kinerja masih berada dibawah target, hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh pengelolaan perhutanan sosial yang masih dalam tahap pengurusan perizinan. Sedangkan jika dilihat dari indikator kedua yaitu jumlah penerimaan PNPB Sektor Kehutanan, capaian kinerja Dinas Kehutanan dalam kurun waktu 2019 – 2023 rata-rata sebesar 196,8 Milyar Rupiah. Dimana hampir secara keseluruhan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2020, yang disebabkan oleh Permintaan pasar untuk kayu yang mengalami penurunan sejak adanya Covid 19 sehingga harga dan produksi kayu alam juga mengalami penurunan yang mengakibatkan target tidak tercapai.

Pada Periode berikutnya Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024–2026 dengan indikator tujuan maupun sasaran yang berbeda dengan periode Renstra tahun 2019–2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan, Sasaran	Uraian	Satuan	Target			Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Tujuan	Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan							
	Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	0,72	0,84	0,88	0,93	-	-
	Sasaran	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan							
	Indikator	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	triliun rupiah	4,86	4,89	4,92	6,92	-	-
2	Tujuan	Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan							
	Indikator	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	23,32	24,2	25,48	50,15	-	-
	Sasaran	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan							
	Indikator	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO2e	1,59	1,65	1,74	3,42	-	-
3	Tujuan	Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas							
	Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	85,5	87	85	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	76,40	77,00	77,50	76,40	-	-
	Sasaran	Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah		85	85,5	87	85	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		76,40	77,00	77,50	76,40	-	-

Pada tahun 2024, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 138 % (Sangat Tinggi). Adapun capaian dari masing-masing tujuan tersebut, meliputi:

1. Tujuan pertama, Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan yang meliputi dua indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan dan Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan. Capaian untuk indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan pada tahun 2024 sebesar 0,93% dari target 0,72% dan PDRB dari Sub Sektor Kehutanan

sebesar 6,92 Milyar. Capaian ini diperoleh dari adanya peningkatan produksi dan nilai jual dari produk hasil kehutanan pada tahun 2024.

2. Tujuan kedua, Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan, pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebesar 3,42 juta ton C-O₂e) atau sebesar 50,15% dari target 2024 sebesar 23,32%. Penurunan emisi yang dilakukan hanya mencakup wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu kawasan hutan. Pencapaian ini diperoleh karena pada tahun 2024 telah terjadi penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan perlindungan hutan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tujuan ketiga, Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan semua mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut diperoleh dari perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 - 2029

Tujuan, Sasaran	Uraian	Satuan	Target			2029	2030	Capaian				
			2026	2027	2028			2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan	Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan											
Indikator 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	(%)	0,88	0,94	0,99	1,05	1,09	-	-	-	-	-
Indikator 2	Persentase Tutupan Lahan	(%)	47,90	48,09	48,22	48,35	48,64	-	-	-	-	-
Indikator 3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan	(%)	25,48	26,56	27,64	28,72	29,80	-	-	-	-	-
Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)											
Indikator	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	-	-	-	-	-
Sasaran 2	Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)											
Indikator	Meningkatnya tutupan lahan di wilayah DAS	Ha	465.671	489.474	506.194	522.914	542.914	-	-	-	-	-
Sasaran 3	Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)											
Indikator	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO2e)	(juta ton CO2e)	1,74	1,81	1,88	1,96	2,63	-	-	-	-	-
Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (%)											
Indikator	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Indeks	87	87,5	88	88,5	89	-	-	-	-	-
	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	-	-	-	-	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan terdiri dari masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan, perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), lembaga perhutanan sosial, kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani hutan, dan masyarakat peduli api. PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha (perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS) untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan pada Kawasan hutan lindung atau hutan produksi.

Lembaga perhutanan sosial (LPS) adalah kelompok masyarakat desa atau masyarakat hukum adat yang menerima izin pengelolaan lahan dalam kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. Sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) merupakan kelompok yang secara spesifik mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di areal perhutanan sosial. Kelompok tani hutan (KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan Indonesia beserta keluarganya yang melakukan kegiatan wirausaha di bidang industri kehutanan, khususnya di sekitar kawasan hutan. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kumpulan masyarakat yang secara sukarela bersedia membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak. Sebelum terjun langsung memadamkan api para anggota MPA sudah melewati beberapa latihan-latihan dan didasari pengetahuan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran sehingga mereka sudah terlatih terlebih dahulu.

2.1.5. Mitra

Dalam pemberian pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan bersama lembaga lain, diantaranya adalah:

Tabel 5. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XIII, KLHK	a) fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; b) fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c) pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan

No	Lembaga	Peran Mitra
		hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2.	Balai Pemantapan Kawasan wilayah IV, KLHK	a) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan; c) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; d) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan, KLHK dan Seksi Wilayah III di Balikpapan	a) pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial; b) pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c) pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; d) fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial; e) fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; f) fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g) pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan; h) penetapan pendamping perhutanan sosial; i) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; j) fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; k) penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; l) pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, KLHK	a) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; b) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;

No	Lembaga	Peran Mitra
		c) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); d) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; e) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; f) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; g) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; h) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau, KLHK	a) penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; b) pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; c) pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; d) pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; e) penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; f) penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air
6.	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan	a) Perumusan Kebijakan Penegakan Hukum – Menyusun kebijakan dalam pencegahan, pengamanan, penyidikan, dan penerapan

No	Lembaga	Peran Mitra
		hukum administrasi, perdata, serta pidana dalam ranah kehutanan. b) Pelaksanaan Kebijakan – Melaksanakan kebijakan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan. c) Penyusunan Standar dan Pedoman – Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam bidang penegakan hukum kehutanan. Bimbingan Teknis dan Supervisi – Memberikan arahan dan pengawasan dalam pencegahan serta penindakan pelanggaran kehutanan. d) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan – Mengawasi implementasi kebijakan dan menyusun laporan terkait kondisi perlindungan hutan serta penegakan hukum di sektor kehutanan.

Selain dengan Kementerian, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga bekerja sama dengan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan. Adapun mitra pembangunan tersebut diantaranya sebagai berikut ini.

Tabel 4. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Global Green Growth Institute	Pengembangan dan penguatan kapasitas bisnis rendah karbon, termasuk perhutanan sosial.
2.	GIZ-ProMangrovePeat	Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut-Lahan Basah di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau
3.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Pengelolaan hutan berkelanjutan dan rendah emisi di Kalimantan Timur melalui
4.	Forest Project VI	Perlindungan dan Pemulihan Hutan Mangrove melalui pengelolaan berkelanjutan berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki 4 (empat) bidang pelayanan yaitu perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran Sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan. Berikut adalah berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam bidang-bidang tersebut.

2.2.1.1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kawasan hutan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi ke dalam 20-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri dari 17 unit KPH Produksi dan 2 unit KPH Lindung, serta 1 Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Unit KPH dan Tahura dikelola oleh 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, kecuali untuk unit KPH Samarinda yang dikelola dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Universitas Mulawarman. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang terkait Kehutanan dan Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebabkan diperlukannya perubahan dari rencana pengelolaan hutan, dalam hal ini Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan juga menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, kontribusi subsektor kehutanan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor

kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 3.042.557,42 m³ di triwulan ketiga tahun 2022, hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yaitu curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu, dan biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November 2022). Perkiraan capaian hasil hutan kayu akan meningkat sebesar 4.247.600,41 m³. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendorong yaitu sudah ada peraturan yang menegaskan batas minimal realisasi produksi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu minimal 50%. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021). Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 658,26 ton di triwulan ketiga tahun 2022 dengan target 700 ton. Walaupun demikian, perkiraan capaian di triwulan keempat optimis 100% target akan tercapai, hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap panen.

Selain itu terdapat juga permasalahan tata batas kawasan hutan yang belum sepenuhnya tuntas karena perubahan dan/atau usulan perubahan kawasan hutan. Merujuk RTRW Kalimantan Timur 2023-2042, dari total kawasan hutan produksi seluas 5.953.731 hektar terdapat areal seluas 510.667 hektar yang sedang diusulkan perubahan (zona tunda) untuk menjadi kawasan lain. Zona tunda juga terdapat pada kawasan hutan lindung dengan total luas 43.144 hektar, yang sedang diusulkan menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian dan kawasan pertanian yang tersebar di berbagai kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur. Dengan demikian, saat ini di

Kalimantan Timur masih terdapat 553.811 hektar kawasan hutan hutan yang belum tuntas penetapan kawasannya sehingga tata batas belum bisa dilakukan.

Memperhatikan berbagai uraian permasalahan tersebut diatas, berikut adalah rumusan permasalahan bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 6. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Belum terselesaikannya pelaksanaan tata batas kawasan akibat dari perubahan kawasan hutan Belum Optimalnya penyusunan RPHJP dan RPHJPd akibat adanya perubahan kawasan hutan
	Belum Optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat	Sumber Daya Polhut, MPA dan MMP belum maksimal untuk melakukan Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan diseluruh Kawasan Hutan
	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.	Lahan diluar kawasan hutan dengan status Clean and Clear merupakan tantangan utama
	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas benih melalui Mutu Benih dan mutu bibit yang dihasilkan dari benih dan/atau bibit yang bersertifikat.	Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan belum ada melakukan uji mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan dari sumber benih yang bersertifikat yang dimiliki/dikelola.
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan belum mengembangkan secara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	menghasilkan benih dan/atau bibit dari sumber benih bersertifikat	optimal sumber benih yang dimiliki/dikelola untuk menghasilkan benih dan bibit dari sumber benih yang bersertifikat.

2.2.1.2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir persentase kerusakan hutan di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 persentase kerusakan hutan sebesar 012%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 17% dan 16%. Peningkatan tersebut cukup mengejutkan ditengah Kalimantan Timur yang sedang melakukan program pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (FCPF) dengan bantuan Bank Dunia.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Secara umum permasalahan pada bidang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan Konservasi Provinsi	Belum optimalnya pengelolaan Tahura Provinsi	Kewenangan Tahura tidak sepenuhnya di limpahkan ke Tahura Provinsi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023, tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
	Belum optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi	Penanganan satwa liar yang tidak dilindungi belum dianggap prioritas seperti penanganan satwa liar yang dilindungi, seperti kurangnya pengawasan dan regulasi efektif terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
	Belum Optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Pengelolaan KEE masih dilakukan dalam bentuk forum kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder dan tidak bersifat mengikat sehingga koordinasi dan sinergi antara berbagai stakeholder masih belum optimal

2.2.1.3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Merujuk SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan di Kalimantan Timur periode 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 274.477 hektar. Pada periode tersebut realisasi rehabilitasi hutan dan lahan berturut-turut seluas 38.866 ha, 38.861 ha dan 38.165 ha. Selain itu pada periode tersebut juga terdapat capaian luas penanaman rehabilitasi lahan berturut-turut sebesar 414 ha, 1.638 ha dan 2.588 ha. Namun demikian, capaian-capaian upaya rehabilitasi tersebut tidak mengurangi luas lahan kritis yang ada di wilayah

Kalimantan Timur. Hal itu disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu degradasi lahan terus terjadi selama periode tersebut dan/atau upaya rehabilitasi yang dilakukan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Pada Tingkat KPH juga terdapat permasalahan penurunan luasan lahan kritis yang direhabilitasi pada periode 2022-2024. Pada 2022 seluas 344 hektar lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi, pada 2023 hanya 63 hektar saja yang direhabilitasi, sedangkan pada 2024 tidak ada lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.

Dengan fakta tersebut, secara umum permasalahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Tabel 8. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi	Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS sering terkendala oleh (tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya data dan informasi bersama, keterbatasan komitmen dan pendanaan).

2.2.1.4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Saat ini di Kalimantan Timur terdapat areal perhutanan sosial seluas 330.184,61 hektar dengan 179 Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dari luasan tersebut terdapat sebanyak 266 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari terdiri dari 119 KUPS kategori *Blue*, 120 KUPS kategori *Silver*, 25 KUPS kategori *Gold* dan 2 KUPS kategori *Platinum*. Sebanyak 237 dari 266 KUPS masih kategori *blue* dan *silver* yang mana kategori tersebut menunjukkan bahwa KUPS tersebut belum memiliki usaha yang sudah berjalan. Untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka KUPS-KUPS yang masih belum memiliki usaha yang sudah berjalan perlu dilakukan pendampingan. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping/penyuluh kehutanan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi, lebih lanjut untuk memastikan implementasi pasca persetujuan terlaksana melalui Pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated

Area Development) berbasis Perhutanan Sosial yang membuka ruang para pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung implementasi perhutanan sosial, hal tersebut dikuatkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai tindak lanjut dari implementasi peraturan gubernur tersebut, Kabupaten/Kota perlu melakukan penyusunan dokumen IAD berbasis perhutanan Sosial sebagai pedoman para pihak ditingkat kabupaten/kota untuk mendukung implementasi perhutanan sosial di kab/kota.

Dengan demikian, secara umum permasalahan pada bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Tabel 9. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Perhutanan Sosial	- Kapasitas Sumber Daya Manusia (Penyuluh dan Pemegang Ijin PS) belum mencukupi untuk pengelolaan dan pengembangan Perhutanan Sosial - Belum Optimal dan Terdokumentasi dengan baik pengelolaan dan Pengembangan PS dari Stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta, Akademisi dan Mitra Pembangunan)

2.2.2. Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur termuat dalam 2 (dua) dokumen perencanaan yang telah disahkan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (**RPJPD**) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu terdapat juga dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dan lampiran **Surat Edaran** Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tanggal 24 Februari 2025 yang berisi visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2030. Berikut adalah hasil telaah dari dokumen-dokumen tersebut

2.2.2.1. Telaah RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045

Visi RPJP Kalimantan Timur 2025-2045 adalah Kaltim Sejahtera: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Pencapaian visi tersebut diukur dengan 5 (lima) sasaran visi, yang mana salah satunya adalah penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* yang diukur dengan 2 indikator utama yaitu penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian penurunan intensitas emisi GRK saat ini sebesar 40,82%, target pada 2029 sebesar 67,46% dan target pada 2045 sebesar 96,37%. Indeks kualitas lingkungan hidup saat ini sebesar 80,20, target pada 2029 sebesar 81,46 dan target pada 2045 sebesar 86,51.

Dalam pencapaian target penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur sektor kehutanan menjadi kunci utama keberhasilannya melalui pengurangan deforestasi dan degradasi lahan, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki strategi yang tepat untuk memastikan pencapaian target tersebut. Dalam pencapaian target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Dinas Kehutanan juga memiliki peran yang sangat penting karena salah satu komponen IKLH adalah indeks tutupan lahan. Dengan demikian, RPJPD Kaltim 2025-2045 telah memberikan target kinerja yang terukur untuk sektor kehutanan yang mana Dinas Kehutanan menjadi pemangku kepentingan utamanya.

2.2.2.2. Telaah RTRW Kalimantan Timur 2023-2042

Merujuk RTRW 2023-2042, total luas wilayah Kalimantan Timur sekitar 15.344.552 hektar, yang mana sekitar sepertiga diantaranya (5.953.731 hektar) merupakan kawasan hutan produksi. Dari luasan hutan produksi tersebut terdapat usulan zona tunda (*holding zone*) seluas 510.667 hektar yang meliputi,

1. kawasan hutan produksi/kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disingkat KHP/PTB memiliki luas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektare berada di Kota Balikpapan

2. kawasan hutan produksi/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat KHP/KS memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 502.831 (lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda
4. kawasan hutan produksi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KHP/IK memiliki luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau; dan
5. kawasan hutan produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda

Selain itu terdapat juga kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut sebesar 1.862.660 hektare, yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Pada Kawasan hutan lindung tersebut terdapat zona tunda seluas 43.144 hektar, dengan rincian sebagai berikut

1. 20.911 hektar di Kutai Timur dan Mahakam Ulu yang sedang diusulkan menjadi Kawasan hutan produksi
2. 21.992 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang yang sedang diusulkan menjadi Kawasan pertanian
3. 241 hektar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan yang sedang diusulkan menjadi Kawasan permukiman.

2.2.2.3. Telaah Teknokratik RPJMD 2025-2029

Dokumen RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan sehingga belum bisa dilakukan penelaahan. Telaah rencana Pembangunan Kalimantan Timur lima (5) tahun mendatang dilakukan terhadap dokumen teknokratik RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029. Merujuk dokumen

tersebut isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Daya Saing SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri
2. Pemerataan pembangunan daerah pedalaman
3. Optimalisasi hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA
4. Transformasi ekonomi berkelanjutan
5. Akselerasi kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar
6. Penguatan sarana dan prasarana Kalimantan Timur sebagai daerah mitra Ibu Kota Negara
7. Penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola
8. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas sosial dan pembangunan
9. Rentannya ketahanan air, energi dan pangan

Isu strategis nomor 8 dan 9 terkait degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan merupakan bagian yang harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Strategi untuk mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan dengan tetap mengedepankan kepentingan ekonomi para pengelola hutan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan hutan diharapkan juga mampu menjadi salah satu penghasil bahan pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

2.2.2.4. Telaah Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2029

Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tanggal 24 Februari 2025 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berpedoman kepada visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2029. Dengan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 6 (enam) misi, yaitu

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan Sejahtera

2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
3. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan Kesehatan
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal
6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Dari 6 misi tersebut sektor kehutanan relevan dengan pencapaian visi 2 dan 6 terkait industrialisasi komoditas unggulan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, rencana strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Timur harus mampu mendorong peningkatan nilai tambah produk berbasis hutan, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu termasuk jasa lingkungan, yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pelestarian hutan.

Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur juga memiliki program unggulan JOSPOL yang mencakup

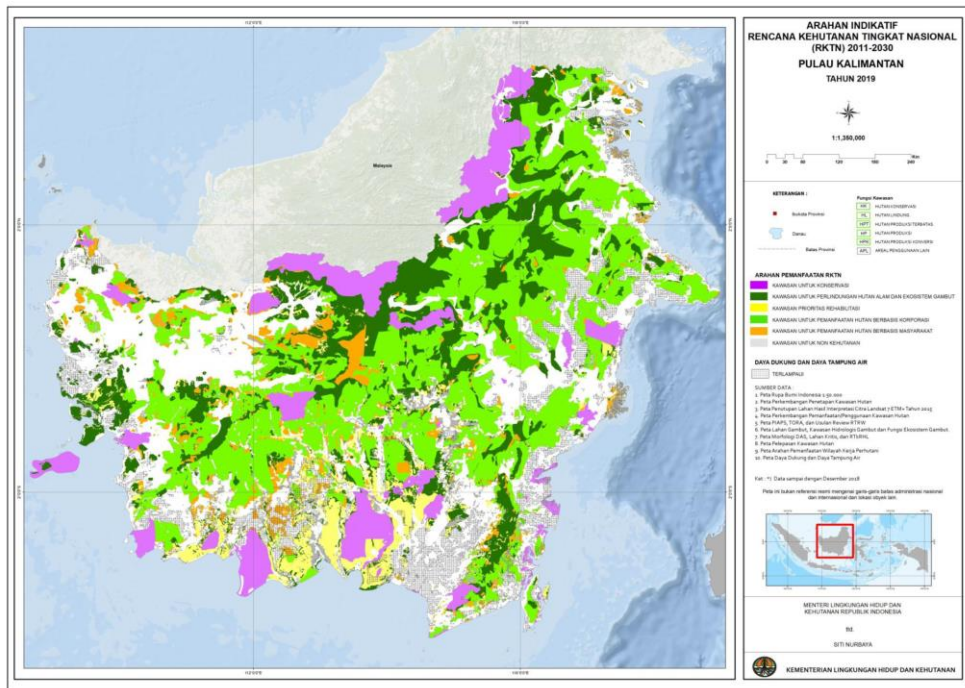
1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;
2. Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik;
3. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah;
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit;
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tot dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;
8. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta

Dari 9 (Sembilan) program unggulan tersebut, sektor kehutanan relevan dengan program 1, 4 dan 5 terkait hilirisasi industri, ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis desa. Hilirisasi industri pertanian mengarah pada peningkatan dan diversifikasi produksi bahan pangan, yang mana Dinas Kehutanan Kalimantan Timur telah memiliki modal berupa hasil Analisis Potensi Pangan di Areal Perhutanan Sosial. Terkait dengan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif, saat ini melalui perhutanan sosial telah terdapat 197 kelompok usaha terbentuk dengan berbagai macam produk yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pemegang persetujuan perhutanan sosial, hal ini merupakan bukti nyata kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung pengembangan ekonomi melalui UMKM, sedangkan untuk pariwisata berbasis desa juga terdapat contoh kontribusi sektor kehutanan dalam mendorong berkembangnya industri pariwisata di desa, salah satunya di Desa Dumaring Kabupaten Berau. Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aren Dumaring, pariwisata di Desa Dumaring berkembang cukup pesat disbanding desa-desa yang lain.

2.2.2.5. Telaah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Rencana tersebut memberikan prioritas kebijakan Pembangunan kehutanan di Pulau Kalimantan sebagai berikut

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan
- Peningkatan peran konservasi
- Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman.
- Pengembangan industri kehutanan
- Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan



Gambar 5. Arah-an Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Pada level provinsi, Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) tahun 2011-2030, yang ditetapkan melalui Pergub Kaltim No. 19 tahun 2012, yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim No. 55 tahun 2018. Berdasarkan RKTP tersebut, visi pembangunan kehutanan ke depan adalah: “Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur”. Secara terinci cakupan dari visi tersebut di atas adalah:

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, kawasan kehutanan dan non-kehutanan)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

Misi untuk mencapai visi pengurusan hutan provinsi adalah:

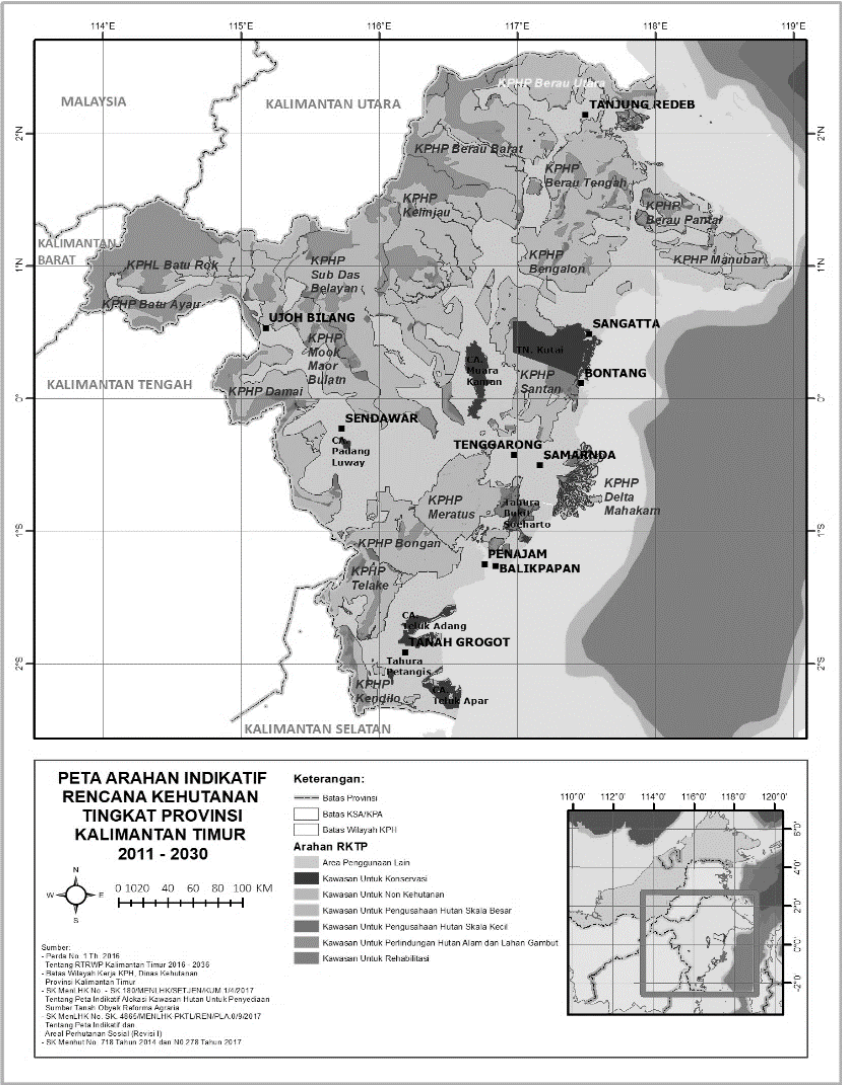
- Misi 1. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan multi-produk kehutanan.

- Misi 2. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemulihan kawasan hutan.
- Misi 3. Memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian konflik kehutanan dan memperkuat perhutanan sosial.
- Misi 4. Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan hutan, utamanya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Arahan indikatif RKTP Kalimantan Timur 2011-2030 merekomendasikan 6 (enam) arahan pemanfaatan kawasan yaitu konservasi, perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, prioritas rehabilitasi, pemanfaatan hutan berbasis korporasi, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan kawasan non kehutanan. Dari 6 arahan tersebut, persentase luasan terbesar (5.325.861 hektar) untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi. Berikut adalah rincian luasan untuk 6 arahan pemanfaatan tersebut.

Tabel 10. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

No.	Arahan/Rencana	Luas (Hektare)
1.	Kawasan untuk Konservasi	326.413
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	1.704.171
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	171.662
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	5.325.861
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	671.689
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	160.513
	Jumlah	8.360.308



Gambar 6. Peta Arahan Indikatif RKTP Kalimantan Timur tahun 2011-2030

Kesesuaian RKTP Kaltim 2011-2030, RTRW Kaltim 2023-2042 dan kondisi saat ini

Tabel 11. Arahan RKTP Kaltim 2011 – 2030, RTRW 2023-2042 dan Kondisi Saat ini

Arahan RKTP Kaltim 2011-2030	RTRW Kaltim 2023-2042	Kondisi saat ini
Kawasan konservasi 326.413 ha	Hutan produksi 5.953.731 ha dengan zona tunda 510.667 ha	Luas areal perhutanan sosial 296.798 ha
Perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut 1.704.171 ha	Hutan lindung dan gambut 1.862.660 ha dengan zona tunda 43.144 ha	Jumlah PBPH yang aktif sebanyak 109 dengan total luas 5.253.626,26 ha
Pemanfaatan hutan berbasis korporasi 5.325.861 ha		
Pemanfaatan hutan berbasis Masyarakat 671.689 ha		

Merujuk pada tabel diatas, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat belum optimal. Dari arahan RKTP seluas 671.689 ha, saat ini di Kalimantan Timur terdapat 296.798 ha (44 persen) yang telah memiliki persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tabel tersebut juga menunjukkan perbedaan luas antara pemanfaatan hutan berbasis korporasi pada RKTP dan luas hutan produksi pada RTRW. Hal ini terjadi karena tidak semua kawasan hutan produksi dikelola oleh korporasi serta terdapat beberapa ijin PBPH yang telah dicabut dalam rentan waktu 2022 – 2025.

2.2.3. Penentuan Isu Strategis

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa kecenderungan produksi kayu dari Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan. Data yang tersedia dari tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan produk olahannya dalam kurun waktu tersebut. Berikut adalah data produksi kayu bulat dan olahan di Kalimantan Timur periode 2018-2022.

Tabel 12. Data Produksi Kayu Bulat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Kayu Bulat IUPHHK-HA (m3)	Kayu Bulat IPHHK-HT (m3)	Jumlah kayu hutan (m3)	Kayu gergajian (m3)	Kayu lapis (m3)	Serpih kayu (m3)	Veneer (m3)
2022	735,621.00	3,482,906.00	4,218,527.00	38,263.27	213,517.00	282,571.80	37,712.84
2021	941,525.00	3,320,775.00	4,262,300.00	45,839.42	266,175.75	296,919.60	48,709.73
2020	816,964.05	3,484,923.24	4,301,887.29	38,406.93	282,682.53	14.77	13,680.28
2019	1,062,573.43	3,435,601.93	4,498,175.36	83,337.85	371,668.25	7.82	8,082.77
2018	1,341,256.27	3,150,331.17	4,491,587.44	65,318.36	437,710.03	45,571.00	9,543.96

Sumber. BPS Kaltim 2024

Tabel diatas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam, yang mana dalam kurun waktu lima tahun produksi turun sekitar 50 persen. Produksi pada tahun 2018 masih mencapai 1.341.256,27 m3 dan pada 2022 produksi turun menjadi 735,621.00 m3. Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada produksi

kayu lapis, pada 2018 sebesar 437,710.03 m3 menjadi 213,517.00 m3 pada 2022. Sementara itu produksi kayu bulat dari hutan tanaman relative stabil yang berkisar antara 3,150,331.17 m3 – 3,484,923.24 m3. Namun demikian, produk olahan kayu dalam bentuk veneer mengalami peningkatan produksi sangat signifikan, dari 9,543.36 m3 pada 2018 menjadi 37,712.84 m3 pada tahun 2022.

Capaian positif kinerja industri kehutanan selain dalam bentuk peningkatan produksi olahan kayu dalam bentuk veneer adalah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam kurun waktu 2017-2023 emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berikut adalah angka penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur selama kurun waktu 2017-2023

Tabel 13. Data Sumber Emisi Tahun 2018 - 2023

Periode	Sumber emisi (ton CO2)		Jumlah (ton CO2)
	Emisi dari deforestasi	Emisi dari Degradasi Hutan	
2022-2023	10,206,826	904,594	11,111,420
2021-2022	11,080,497	1,912,789	12,993,286
2020-2021	7,083,831	815,811	7,899,642
2019-2020	18,656,274	3,360,386	22,016,660
2018-2019	14,318,359	1,293,908	15,612,267
2017-2018	76,636,471	31,396,465	108,032,936

Sumber: Signsmart KLHK (2024)

Berdasarkan tabel diatas, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan setiap tahun mengalami penurunan, dengan anomali penurunan pada periode 2018-2019 dan 2020-2021. Penurunan sangat drastis pada periode 2020-2021 diperkirakan karena pandemi covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan di industry kehutanan dan industri lain yang terkait dengan hutan dihentikan.

Dengan dua fakta tersebut, industri kehutanan di Kalimantan Timur seharusnya tidak lagi mendorong peningkatan produksi kayu bulat, terutama dari yang berasal dari hutan alam. Upaya peningkatan produksi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman masih mungkin dilakukan sepanjang bukan melalui strategi menambah luas tanam. Industri kehutanan harus didorong berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu dan melakukan diversifikasi usaha selain produk kayu.

Salah satu bentuk diversifikasi usaha bidang kehutanan yang telah berhasil di Kalimantan Timur adalah pembayaran dana karbon dari Bank Dunia untuk keberhasilan penurunan emisi GRK. Pembayaran tersebut diberikan atas keberhasilan Kalimantan Timur dalam pengurangan emisi GRK melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (FCPF-CF). Perhitungan kinerja pengurangan emisi GRK dalam kerangka FCPF-CF dimulai pada tahun Juni 2019 s/d Desember 2024, sehingga pengurangan emisi setelah 2024 dapat ditawarkan ke pihak lain melalui skema perdagangan karbon.

Dengan demikian, dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian Kalimantan Timur melalui peningkatan kontribusi sektor kehutanan, maka ditetapkan 2 (dua) isu strategis Pembangunan sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 yaitu 1) **peningkatan nilai tambah produk kayu dan diversifikasi usaha kehutanan selain kayu**; 2) **pengembangan strategi dan implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan pasca FCPF-CF**.

4. Peningkatan nilai tambah produk kayu dan diversifikasi usaha kehutanan selain kayu

Data pada tabel 11 menunjukkan bahwa penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam secara signifikan terus mengalami penurunan, tetapi hingga saat ini belum ada unit usaha kehutanan (IUPHHK-HA) yang serius keluar dari ketergantungannya terhadap produk kayu bulat. Untuk itu diperlukan dorongan, tekanan dan dukungan dari pihak berwenang untuk memastikan pemegang IUPHHK-HA segera mengimplementasikan rencana diversifikasi usaha melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang ada pada unit usahanya, yang mana landasan kebijakan tersedia.

Potensi jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan mencakup pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Pemanfaatan berbagai bentuk jasa lingkungan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Selain melalui pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kontribusi sektor kehutanan juga bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan nilai tambah produk berbasis kayu hutan melalui hilirisasi industri kehutanan. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah, sehingga diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga

penelitiannya lainnya. Program unggulan **Gratis Pol** bisa diprioritaskan pada penelitian-penelitian inovatif peningkatan nilai tambah produk kayu hutan.

1. Pengembangan strategi dan implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan pasca FCPF-CF

Program FCPF-CF (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund*) merupakan skema pendanaan penurunan emisi gas rumah kaca dari Bank Dunia. Melalui skema tersebut Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP*). Skema tersebut memberikan penghargaan dalam bentuk dana kepada Kalimantan Timur untuk kinerja penurunan emisi GRK sampai akhir tahun 2024.

Dengan berakhirnya perhitungan kinerja penurunan emisi GRK dalam skema FCPF-CF maka Kalimantan Timur memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja penurunan emisi GRK, yang kemudian menjualnya ke pihak lain melalui mekanisme perdagangan karbon. Untuk mendukung percepatan implementasi perdagangan karbon tersebut telah terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Beberapa peraturan tersebut adalah **Perpres 98/2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, **PermenLHK 21/2022** tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan **PermenLHK 7/2023** tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan serta **Surat Edaran OJK 12/SEOJK.04/2023** tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Selain itu, Kalimantan Timur juga telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pengelola hutan yang lain memiliki untuk mendapatkan manfaat tambahan (benefit) dari berbagai kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian penting bagi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur untuk mendorong dilakukannya persiapan untuk menangkap peluang tersebut melalui berbagai sosialisasi dan pengembangan strategi perdagangan karbon bagi dunia usaha, masyarakat dan pengelola hutan yang lain.

Tabel 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan	Isu Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi	Dalam upaya mitigasi perubahan iklim masyarakat dunia harus mempertahankan hutan yang tersisa	Target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission pada 2060	Kalimantan Timur telah berhasil mendapatkan pendanaan berbasis karbon hutan (FCPF).	Persiapan dan implementasi perdagangan karbon pasca FCPF
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan	Kemiskinan dan kelaparan merupakan 2 tujuan teratas dalam SDGs, yang menunjukkan prioritas masyarakat Dunia untuk mengatasinya	Masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan seringkali mengalami kemiskinan kronis karena keterbatasan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan	Skema perhutanan social melalui KUPS memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan akses legal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kelas KUPS
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan	Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan	Banjir dan berbagai bencana kekeringan yang terjadi disebabkan belahan Dunia karena kualitas DAS yang mengalami penurunan	Bencana banjir merupakan dampak dari perubahan iklim, yang mana menjaga kesehatan DAS merupakan salah	Keberhasilan berbagai upaya rehabilitasi DAS masih kurang memuaskan karena berbagai faktor salah satunya keterpaduan parapihak dalam	Peningkatan keterlibatan parapihak dalam implementasi program rehabilitasi DAS

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan	Isu Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		Iklim dan Transisi Energi		satu solusi yang bisa dilakukan	implementasinya	
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi	Tingkat kepunahan keanekaragaman hayati masih terus terjadi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim.	Di Indonesia, berdasarkan laporan IUCN, terdapat 1.217 spesies hewan yang terancam punah. Selain itu juga terdapat 127 jenis tumbuhan yang dilindungi dan dianggap langka	Pesatnya perkembangan industri ekstraktif di Kalimantan memicu hilangnya berbagai spesies langka dilindungi	Perlindungan species dan ekosistem dilindungi

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Instruksi tersebut memberikan beberapa ketentuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut.

- Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029 harus mengacu pada sasaran RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029
- Renstra hanya memiliki 1 (satu) tujuan, sedangkan sasaran boleh lebih dari satu
- Perumusan tujuan dan sasaran renstra di susun dengan kalimat kondisi dan dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Berdasarkan arahan tersebut tujuan renstra urusan kehutanan adalah terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan. Dengan mengacu tujuan urusan kehutanan dalam instruksi tersebut dan RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029, maka tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 adalah terwujudnya kelestarian hutan melalui peningkatan diversifikasi usaha dan pengurangan emisi GRK sektor kehutanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029 memiliki 3 sasaran yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan melalui diversifikasi usaha, menurunnya emisi GRK sektor kehutanan dan meningkatnya luasan tutupan hutan. Berikut adalah matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra tersebut terhadap sasaran RPJMD Kaltim 2025-2029.

Tabel 15. Matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra dengan RPJMD

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaltim 2025-2029				Renstra Dinas Kehutanan 2025-2029			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Tujuan 1. Terwujudnya Kaltim Sukses:	Kontribusi PDRB Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
		Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Penurunan intensitas emisi GRK		Persentase Tutupan Lahan	Meningkatnya pengelolaan hutan	Meningkatnya tutupan lahan di wilayah DAS
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan	Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)
						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah
		Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah					

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dengan 3 sasaran yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan

ekonomi, menurunnya emisi GRK dan meningkatnya luasan tutupan hutan, maka strategi utama yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya meningkatkan pendapatan yang berasal dari hutan dengan tanpa menebang lebih banyak kayu tetapi dari melindungi dan merehabilitasi Kawasan hutan. Dengan demikian, untuk mencapai 3 sasaran tersebut diatas, maka strategi yang bisa dilakukan adalah

1. Mendorong peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu

Strategi ini dilakukan dengan 2 target utama yaitu efisiensi pemanenan kayu dan hilirisasi industri perkayuan. Efisiensi pemanenan kayu ditujukan kepada para pengelola hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, seperti pemegang IUPHHK, pengelola hutan rakyat dan lain-lain. Hilirisasi industri perkayuan ditujukan kepada industri berbahan baku kayu, baik industri besar maupun kecil. Dinas kehutanan memiliki peran untuk mempermudah berbagai proses perizinan dan peningkatan kapasitas serta memberikan penghargaan

2. Mendorong peningkatan diversifikasi usaha kehutanan

Strategi ini dilakukan untuk memastikan implementasi rencana diversifikasi usaha kehutanan dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan hutan dan pemilik kawasan berhutan. Berbagai potensi usaha kehutanan berbasis non kayu sangat terbuka untuk dimanfaatkan, baik yang dalam bentuk produk maupun jasa lingkungan seperti penyimpanan dan penyerapan karbon serta pemanfaatan jasa lingkungan yang lain.

3. Meningkatkan luas lahan hutan yang berhasil direhabilitasi

Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur masih terus terjadi hingga saat ini, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa periode waktu yang mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan yang rusak tersebut perlu dilakukan rehabilitasi, dengan prioritas utama pada daerah aliran sungai (DAS) yang berfungsi untuk mempertahankan/memperbaiki kualitas DAS dimaksud.

4. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan

Kalimantan Timur dengan luas Kawasan hutan yang dimilikinya menjadi bagian penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030, yang mana target adalah tingkat serapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan

lahan lebih tinggi dari tingkat emisinya. Untuk memenuhi target tersebut maka deforestasi dan degradasi hutan harus ditekan sekecil mungkin hingga mencapai nol. Jika kondisi tersebut tercapai maka target serapan GRK bisa dipastikan lebih tinggi dari tingkat emisi, karena hutan yang terus tumbuh.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Secara umum kondisi masyarakat sekitar hutan yang ada di Kalimantan Timur relatif masih kurang sejahtera karena berbagai faktor penyebab, salah satu adalah akses legal pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat yang terbatas. Namun dengan skema perhutanan sosial masyarakat sekitar hutan memiliki kesempatan yang besar untuk bisa memanfaatkan sumberdaya hutan. Masyarakat sekitar hutan bisa membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang memiliki keleluasan dan legalitas dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya hutan. Saat ini terdapat sekitar 197 KUPS di Kalimantan Timur, namun sebagian besar masih kategori blue dan silver yang secara ekonomi belum bisa memberikan dampak signifikan kepada anggotanya.

Berbagai strategi tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk memastikan kesiapan parapihak yang harus terlibat dan ingin terlibat. Keterlibatan parapihak merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan strategi-strategi tersebut, mengingat ada beberapa target baru yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, baik yang merupakan amanat dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari inisiatif dinas kehutanan seperti target terbitnya SPE. Untuk mendorong pencapaian target-target baru tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kurun waktu 2025-2029.

Tabel 16. Tahapan Langkah Pelaksanaan Strategi Tahun 2025 - 2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Persiapan	Penguatan komitmen parapihak	Pengembangan pilot project	Replikasi keberhasilan	Evaluasi
Tahap ini dilakukan melalui	Tahap ini dilakukan melalui	Tahap ini dilakukan untuk	Tahap merupakan pengembangan	Tahap ini merupakan evaluasi

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
serangkaian sosialisasi kepada parapihak terkait dengan renstra dan komitmen dinas kehutanan kaltim dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Termasuk didalamnya adalah sosialisasi berbagai peluang yang telah diakomodasi yang kebijakan terbaru di sektor kehutanan	berbagai bentuk komunikasi pemangku kepentingan sektor kehutanan. Pada tahap ini diharapkan para pengelola hutan memiliki komitmen kuat mendukung dan memulai bergerak untuk mencapai target-target yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.	memfasilitasi parapihak yang siap untuk masuk dalam perdagangan karbon dan/atau jasa kehutanan yang lain. Juga memberikan ruang lebih terhadap inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh parapihak	dari keberhasilan berbagai pilot project dan inisiatif yang telah dilakukan parapihak	menyeluruh terhadap semua strategi dan capaian

Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Inmendagri No.2/2025 memberikan pedoman bagaimana merumuskan arah kebijakan renstra PD. Berikut adalah arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029

Tabel 17. Arah Kebijakan Renstra 2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kaltim 2025-2029
Pengelolaan hutan	Peningkatan produktifitas hasil hutan, baik kayu maupun non kayu	Perluasan dan percepatan hilirisasi produk unggulan daerah; Peningkatan produksi komoditas unggulan;
	Pengurangan Tingkat deforestasi dan degradasi hutan	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Peningkatan luas kawasan konservasi yang terlindungi dan Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi
	Peningkatan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;
Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat bidang kehutanan	Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global. Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan, serta ekonomi kreatif;
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS	Peningkatan tutupan lahan vegetasi di DAS	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kaltim 2025-2029
		Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
	Peningkatan kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur umumnya telah mempertimbangkan program prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2025 – 2029, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu. Selain itu, terdapat Pergub 25 Tahun 2024 yang memberikan mandat kepada OPD bidang energi, kehutanan, pertanian dan perkebunan untuk melakukan dan/atau memfasilitasi perdagangan karbon. Pergub tersebut memberikan arahan spesifik fungsi fasilitasi OPD yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi, memberikan pedoman, konsultasi, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim ini bersumber pendanaan dari Pemerintah Daerah serta beberapa program dan kegiatan yang berpeluang dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan.

4.1.1. Program Pengelolaan Hutan

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada 3 Bidang (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator kinerja adalah produksi hasil hutan kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu, Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon, Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi, Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/tahun
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
6. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
7. Perbenihan Tanaman Hutan

4.1.2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub-kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi pada bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UPTD Tahura Bukit Soeharto dan 19 UPTD KPH yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

4.1.3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan, Luas kawasan yang dikelola masyarakat, Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH), dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

4.1.4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur. Indikator dari program ini adalah luas DAS dan sub DAS yang dikelola dan Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan sub-Bagian Tata Usaha pada 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 18. Rumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 -2029

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)		
		Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan		1. Produksi Hasil Hutan Kayu	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
					2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
				Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
				Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				Terlaksananya kegiatan pemanfaatan hutan sesuai perizinan dan ketentuan	Data Potensi Sumber Daya Hutan	3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
				Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
				Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	
				Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	
				Terlaksananya pengolahan HHBK oleh masyarakat/lembaga lokal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dokumen	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
				Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	3.28.03.1.06.0006 Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan		Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
					Persentase Tutupan Lahan (%)		
		Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)			Meningkatnya tutupan lahan diwilayah DAS (Ha)		
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
				Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya		Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
				Meningkatnya fungsi TAHURA sebagai sarana konservasi, edukasi, dan wisata	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
				Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	
				Terjaganya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati kawasan penting	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola (Ha)	3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
				'Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
				'Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
				Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)		1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
				Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
				Tersusunnya dan ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
				Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
				Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
				Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan (%)		
		Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)			Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO2e)		
			Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi		Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Terlaksananya produksi kayu secara legal dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemantauan/Monito ring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
				Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
				Tersedianya benih unggul untuk kegiatan penghijauan dan rehabilitasi	Jumlah Sertifikat Pengada / Pengedar Benih dan/atau bibit terdaftar	3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	
				Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
				Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
			Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi		Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
				Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	
				Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
				Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			1. Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah		
					2. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
			Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	3.28.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
				Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan	Persentase Penyelesaian Barang Milik	3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				pemerintahan daerah	Daerah yang Di adakan		
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatny a kinerja layanan kesekretaria tan		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	3.28.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 19. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Dinas Kehutanan														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/tahun	6.402.024,00	6.402.024,00	4.542.333.822	6.461.888,27	2.745.650.166	6.525.929,11	3.285.502.082	6.594.146,54	3.929.180.035	6.665.844,44	3.926.850.100	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	1.545	1.645	94.450.000	1.695	300.000.000	1.745,0	300.000.000	1.795	300.000.000	1.845	300.000.000	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	20	19	369.766.000	19	500.000.000	19,0	650.000.000	19	700.000.000	19	700.000.014	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	19	369.766.000	19	500.000.000	19,0	650.000.000	19	700.000.000	19	700.000.014	
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung														
Terlaksananya kegiatan pemanfaatan hutan sesuai perizinan dan ketentuan	Data Potensi Sumber Daya Hutan	Dokumen	5.153.407	4	4.172.567.822	4	2.245.650.166	4,0	2.635.502.082	4	3.229.180.035	4	3.226.850.086	
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	4	3	635.216.076	3	745.650.166	3,0	835.502.082	3	979.180.035	3	976.850.086	
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	4	3	376.035.000	2	500.000.000	2,0	600.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	
3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	N/A	30	648.742.180	30	500.000.000	30,0	600.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	N/A	2	2.512.574.566	2	500.000.000	2,0	600.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya pengolahan HHBK oleh masyarakat/lembaga lokal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Dokumen	N/A	1	94.450.000	1	300.000.000	1,0	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
3.28.03.1.06.0006 Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar														
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit	N/A	20	94.450.000	20	300.000.000	20,0	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	Unit	1	3	708.293.000	4	2.545.650.164	5,0	2.935.502.082	6	3.529.180.034	7	3.526.850.085	
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 6000 m3/Tahun														
Terlaksananya produksi kayu secara legal dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	16.499,00	2	708.293.000	3	2.545.650.164	3,0	2.935.502.082	3	3.529.180.034	3	3.526.850.085	
3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah"	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Manajemen	N/A	25	389.775.000	20	1.272.825.082	20,0	1.467.751.041	20	1.764.590.017	20	1.763.425.043	
3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa penganan Sanksi Adminsitratif	Unit Manajemen	N/A	20	318.518.000	20	700.000.000	20,0	700.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	N/A	0	0	10	572.825.082	10,0	767.751.041	10	764.590.017	10	763.425.043	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	3,5	4.45	14.024.663.200	4.92	6.386.390.552	5.40	7.264.386.848	5.87	9.347.097.627	6.34	8.842.274.725	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	250	447	11.450.928.135	280	4.789.792.916	320,0	5.423.901.352	330	7.010.323.222	330	6.631.706.045	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	Dokumen	1	5	372.093.918	5	638.639.058	5,0	638.639.058	5	934.709.765	5	884.227.474	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)													
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			275	3.731.834.331	315,0	4.317.165.195	325	5.508.258.576	325	5.205.364.835	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	910	447	9.176.131.048	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan	20	20	1.902.703.169	20	319.319.527	20,0	368.097.099	20	467.354.881	20	442.113.736	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan														
Tersedianya benih unggul untuk kegiatan penghijauan dan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	Dokumen	4	4	2.573.735.065	4	1.596.597.636	4,0	1.840.485.496	4	2.336.774.405	4	2.210.568.680	
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih														
Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	20	10	397.636.800	10	319.319.527	10,0	368.097.099	10	467.354.881	10	442.113.736	
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	80	20	467.430.902	20	319.319.527	20,0	368.097.099	20	467.354.881	20	442.113.736	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Batang	N/A	30.000	1.207.291.418	30.000	638.639.055	30.000,0	736.194.199	30.000	934.709.762	30.000	884.227.472	
3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha	N/A	25	501.375.945	25	319.319.527	25,0	368.097.099	25	467.354.881	25	442.113.736	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	%	0,51	0,5	18.178.515.69 0	0,5	6.386.390.552	0,5	7.361.941.992	0,5	9.347.097.627	0,5	8.842.274.725	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	7.592.619	18.178.515.69 0	7.592.619	6.386.390.552	7.592.619, 0	7.361.941.992	7.592.619	9.347.097.627	7.592.619	8.842.274.725	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	6	8	8.039.210.362	8	1.277.278.112	8,0	1.472.388.400	8	1.869.419.526	8	1.768.454.946	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	7	7	7.500.000.000	7	1.915.917.165	7,0	2.208.582.597	7	2.804.129.288	7	2.652.682.417	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha	N/A	2.544.784	1.349.556.696	2.544.784	1.915.917.165	2.544.784,0	2.208.582.597	2.544.784	2.804.129.288	2.544.784	2.652.682.417	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4	1.289.748.632	4	1.277.278.110	4,0	1.472.388.398	4	1.869.419.525	4	1.768.454.945	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	#####	3,25	1.327.584.240	3,5	5.811.886.225	3,8	6.034.353.631	4	6.266.294.045	4,25	6.508.118.638	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17	20	1.327.584.240	20	5.811.886.225	20,0	6.034.353.631	20	6.266.294.045	20	6.508.118.638	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS														
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	5	931.984.025	5	4.068.320.357	5,0	4.224.047.541	5	4.386.405.831	5	4.555.683.046	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	90	15	395.600.215	15	1.743.565.868	15,0	1.810.306.090	15	1.879.888.214	15	1.952.435.592	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	330.184	370,184	1.116.350.998	380,184	5.811.886.225	390,2	6.034.353.631	400,184	6.266.294.045	410,184	6.508.118.638	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17	20	1.116.350.998	20	5.811.886.225	20,0	6.034.353.631	20	6.266.294.045	20	6.508.118.638	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	5.000	1.116.350.998	5.000	5.811.886.225	5.000,0	6.034.353.631	5.000	6.266.294.045	5.000	6.508.118.638	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	1	6	9.112.320.057	6	5.066.641.420	6,0	5.675.165.955	6	6.166.294.045	6	6.508.118.638	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17	20	9.112.320.057	20	5.066.641.420	20,0	5.675.165.955	20	6.166.294.045	20	6.508.118.638	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	350	8.716.719.841	300	506.664.142	300,0	567.516.595	300	616.629.404	300	650.811.863	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	90	15	395.600.216	17	4.559.977.278	17,0	5.107.649.360	17	5.549.664.641	17	5.857.306.775	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	10	10	10.552.244.705	10	5.711.886.225	10,0	6.034.353.631	10	6.266.294.045	10	6.508.118.638	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17	20	10.552.244.705	20	5.711.886.225	20,0	6.034.353.631	20	6.266.294.045	20	6.508.118.638	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	183	903.540.839	183	285.594.312	183,0	301.717.683	183	313.314.703	183	325.405.933	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	350	8.716.719.840	300	285.594.311	300,0	301.717.681	300	313.314.702	300	325.405.931	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	5	931.984.026	5	5.140.697.602	5,0	5.430.918.267	5	5.639.664.640	5	5.857.306.774	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,540	504.080.000	0,547	18.397.988	0,6	17.976.479	0,568	17.962.837	0,572	19.374.765	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	2	504.080.000	2	18.397.988	2,0	17.976.479	2	17.962.837	2	19.374.765	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	504.080.000	1	18.397.988	1,0	17.976.479	1	17.962.837	1	19.374.765	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	N/A	95.337	1.995.920.000	109.140	356.397.988	115.860,0	365.976.479	122.580	375.962.837	132.580	386.374.765	
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam														
Terjaganya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati kawasan penting	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola (Ha)	Ha	545.675,00	30.523	1.995.920.000	44.326	356.397.988	51.046,0	365.976.479	57.766	375.962.837	67.766	386.374.765	
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	450	240	1.196.552.000	300	150.000.000	360,0	150.000.000	420	150.000.000	480	150.000.000	
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100.000,00	30.523	799.368.000	10.000	206.397.988	10.000,0	215.976.479	10.000	225.962.837	10.000	236.374.765	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	10.104	544.821	3.933.335.000	903.227	637.940.512	1.007.608,0	700.567.189	1.200.795	765.860.607	1.210.398	833.936.515	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	1	1	3.933.335.000	1	637.940.512	1,0	700.567.189	1	765.860.607	1	833.936.515	
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	lembaga	1	1	300.000.000	1	382.764.307	1,0	420.340.313	1	459.516.364	1	500.361.909	
3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	N/A	1	650.000.000	1	127.588.102	1,0	140.113.437	1	153.172.121	1	166.787.303	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	N/A	8	2.983.335.000	8	127.588.103	8,0	140.113.439	8	153.172.122	8	166.787.303	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	65,037	1.428.275.000	65,118	737.940.511	65,2	800.567.189	65,282	865.860.607	65,364	933.936.516	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	1.428.275.000	1	737.940.511	1,0	800.567.189	1	865.860.607	1	933.936.516	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	300	1.428.275.000	300,00	737.940.511	300,0	800.567.189	300,00	865.860.607	300,00	933.936.516	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85,14	85.84	157.870.842.820	86.53	650.000.000	87.22	1.300.000.000	87.92	2.000.000.000	88.63	1.750.000.000	
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	750.000.000	100	650.000.000	100,0	1.300.000.000	100	2.000.000.000	100	1.750.000.000	
3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	248.447.385	4	100.000.000	4,0	250.000.000	4	400.000.000	4	350.000.000	
3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA0SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Dokumen	2	2	87.892.615	2	100.000.000	2,0	250.000.000	2	400.000.000	2	350.000.000	
3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA0SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA0SKPD	Dokumen	2	2	63.660.000	2	100.000.000	2,0	250.000.000	2	400.000.000	2	350.000.000	
3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	150.000.000	2	100.000.000	2,0	250.000.000	2	400.000.000	2	350.000.000	
3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4,0	300.000.000	4	400.000.000	4	350.000.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	153.836.369.761	100	153.708.839.094	100,0	152.867.859.278	100	148.388.710.440	100	148.211.559.041	
3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	511	724	153.030.059.280	724	152.534.759.094	724,0	151.533.779.278	724	146.814.630.440	724	146.627.479.041	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	20	12	506.310.481	12	934.080.000	12,0	934.080.000	12	934.080.000	12	934.080.000	
3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	24	21	39.350.000	21	100.000.000	21,0	200.000.000	21	300.000.000	21	300.000.000	
3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	28.550.000	1	20.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	203.550.000	4	70.000.000	4,0	100.000.000	4	120.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	28.550.000	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	120.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	209.600.000	100	155.000.000	100,0	310.000.000	100	600.000.000	100	660.000.000	
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	1	30.000.000	1,0	60.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	
3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	4	60.000.000	4,0	120.000.000	4	150.000.000	4	180.000.000	
3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	209.600.000	1	40.000.000	1,0	80.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	917.575.660	100	120.000.000	100,0	470.000.000	100	300.000.000	100	750.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3	665.975.660			3,0	350.000.000			3	350.000.000	
3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	0	0	10	10.000.000	10,0	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	110.000.000	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	6	141.600.000	30	90.000.000	30,0	90.000.000	30	90.000.000	30	190.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	2.114.057.696	100	1.060.000.000	100,0	1.490.000.000	100	1.950.000.000	100	2.150.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	55.476.075	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	43.441.621	1	10.000.000	1,0	70.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	62	4	1.795.140.000	4	900.000.000	4,0	1.150.000.000	4	1.500.000.000	4	1.750.000.000	
3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	110.000.000	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	
3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	1	110.000.000	1	120.000.000	1,0	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	43.239.703	100	156.275.632	100,0	600.000.000	100	600.000.000	100	790.357.789	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0			2,0	400.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	560	30	43.239.703	195	50.000.000	195,0	100.000.000	195	100.000.000	195	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	53.137.816	1,0	50.000.000	1	250.000.000	1	345.178.895	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	53.137.816	1,0	50.000.000	1	250.000.000	1	345.178.895	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%		100	5.655.467.620	100,00	3.965.903.600	100,0	4.595.903.600	100	4.645.903.600	100	4.645.903.600	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	55.404.300	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5	55.404.300	8	10.000.000	8,0	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	4.808.886.250	100	3.275.903.600	100,0	3.275.903.600	100	3.275.903.600	100	3.275.903.600	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7	0	0	1	9.000.000	1,0	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	879.091.850	3	879.103.600	3,0	879.103.600	3	879.103.600	3	879.103.600	
3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	422.688.000	1	1.000.000	1,0	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3.507.106.400	2	2.386.800.000	2,0	2.386.800.000	2	2.386.800.000	2	2.386.800.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	791.177.070	100	680.000.000	100,0	1.310.000.000	100	1.360.000.000	100	1.360.000.000	
3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	205.914.624	6	100.000.000	6,0	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	27	97.000.000	64	500.000.000	64,0	980.000.000	64	980.000.000	64	980.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	100	111.612.446	173	10.000.000	173,0	10.000.000	173	10.000.000	173	10.000.000	
3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	5	20.000.000	5,0	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	25.000.000		25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1	376.650.000	1	25.000.000	1,0	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
UPTD Tahura Bukit Soeharto														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	61.668.024	0,225	356.847.524	0,2	407.825.312	0,268	494.377.005	0,290	494.027.512	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	61.668.024	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	61.668.024	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,03	93.515.178	0,03	139.252.093	0,0	120.846.913	0,08	125.854.956	0,1	131.076.417	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	93.515.178	5	139.252.093	5,0	120.846.913	5	125.854.956	5	131.076.417	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	N/A	5	93.515.178	5	139.252.093	5,0	120.846.913	5	125.854.956	5	131.076.417	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	10	71.426.642	10	162.460.775	10,0	120.846.913	10	125.854.956	10	131.076.417	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	71.426.642	5	162.460.775	5,0	120.846.913	5	125.854.956	5	131.076.417	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	10	71.426.642	10	162.460.775	10,0	120.846.913	10	125.854.956	10	131.076.417	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	93.515.178	0,3	162.460.775	0,3	120.846.913	0,3	125.854.956	0,3	131.076.417	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	93.515.178	5	162.460.775	5,0	120.846.913	5	125.854.956	5	131.076.417	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	16.246.077	10,0	12.084.691	10	12.585.495	10	13.107.641	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	5	93.515.178	5	146.214.698	5,0	108.762.222	5	113.269.461	5	117.968.776	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A			0,53	100.000.000	0,5	120.846.913	0,53	125.854.956	0,53	131.076.417	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	0	0	5	100.000.000	5,0	120.846.913	5	125.854.956	5	131.076.417	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	5.000.000	10,0	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	0	0	1	90.000.000	1,0	100.846.913	1	105.854.956	1	111.076.417	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A		0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindungnya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	Ha	N/A	64.814	8.607.763.759	64.814	4.752.404.521	64.814,0	4.949.125.609	64.814	5.154.223.387	64.814	5.368.061.441	
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi														
Meningkatnya fungsi TAHURA sebagai sarana konservasi, edukasi, dan wisata	Presentaase Kawasan Tahura yang dikelola sesuai rencana pengelolaan	%	20	20	8.607.763.759	20	4.752.404.521	20,0	4.949.125.609	20	5.154.223.387	20	5.368.061.441	
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														
Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	5	5	212.569.105	5	950.480.904	5,0	989.825.121	5	1.030.844.677	5	1.073.612.288	
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	400	412	6.548.040.662	150	2.376.202.260	150,0	2.474.562.804	150	2.577.111.693	150	2.684.030.720	
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														
Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha	12.963	12.963	1.759.313.992	12.963	950.480.904	12.963,0	989.825.121	12.963	1.030.844.677	12.963	1.073.612.288	
3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi														
Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	N/A	35	87.840.000	40	475.240.453	45,0	494.912.563	50	515.422.340	55	536.806.145	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	71.700.000	86,53	435.640.000	87,2	760.640.000	87.92	1.130.640.000	88.63	1.530.640.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terseleenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	64.440.000	100	140.640.000	100,0	140.640.000	100	140.640.000	100	140.640.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	64.440.000	12	140.640.000	12,0	140.640.000	12	140.640.000	12	140.640.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0			1,0	50.000.000			1	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	40	50.000.000	40,0	100.000.000	40	150.000.000	40	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	7.260.000	100	225.000.000	100,0	320.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.260.000	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	20.000.000	100,0	150.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0	0	1	1.000.000	1,0	25.000.000	0	0	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	0	0			5,0	25.000.000	0	0	5	50.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	5	4.000.000	5,0	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	
3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Tahura Bukit Soeharto)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	N/A	100	879.250.600	100	936.490.600	100,0	985.490.600	100	1.195.490.600	100	1.245.490.600	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%		100	826.930.600	100	825.490.600	100,0	825.490.600	100	825.490.600	100	825.490.600	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	231.730.600	12	231.730.600	12,0	231.730.600	12	231.730.600	12	231.730.600	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	595.200.000	12	593.760.000	12,0	593.760.000	12	593.760.000	12	593.760.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	42.320.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Unit	62	28	35.000.000	62	50.000.000	62,0	70.000.000	62	250.000.000	62	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	12	7.320.000	44	1.000.000	44,0	10.000.000	44	10.000.000	44	10.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	2	50.000.000	2,0	70.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Barat)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,207	3.759.899.143	0,231	4.407.040.572	0,3	4.625.672.098	0,278	4.387.016.486	0,302	4.568.908.508	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	N/A	1	1.971.355.677	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	N/A	1	1.971.355.677	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	67	167	1.788.543.466	67	4.050.193.048	67,0	4.217.846.786	67	3.892.639.481	67	4.074.880.996	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			62	3.545.173.744	62,0	3.696.062.108	62	3.403.375.533	62	3.567.392.897	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	128	40	1.637.244.077	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2	2	151.299.389	2	405.019.304	2,0	421.784.678	2	389.263.948	2	407.488.099	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan	%	0,51	0,5	1.120.821.434	0,5	4.050.193.048	0,5	4.217.846.786	0,5	3.892.639.481	0,5	4.074.880.996	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	hutan diluar hutan konservasi													
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Barat)	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	771.406	1.120.821.434	771.406	4.050.193.048	771.406,0	4.217.846.786	771.406	3.892.639.481	771.406	4.074.880.996	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	13	12	250.965.924	12	810.038.610	12,0	843.569.357	12	778.527.896	12	814.976.199	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	12	336.883.740	12	1.215.057.914	12,0	1.265.354.036	12	1.167.791.844	12	1.222.464.299	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	242.327,00	195.997.150	771.406,25	1.215.057.914	771.406,3	1.265.354.036	771.406,25	1.167.791.844	771.406,25	1.222.464.299	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4	336.974.620	4	810.038.610	4,0	843.569.357	4	778.527.896	4	814.976.199	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Berau Barat)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,1	810.603.262	0,1	105.369.840	0,1	109.731.520	0,1	114.278.928	0,1	119.020.124	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5	5	810.603.262	5	105.369.840	5,0	109.731.520	5	114.278.928	5	119.020.124	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	538.739.328	2	73.758.888	2,0	76.812.064	2	79.995.249	2	83.314.086	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	kelompok	5	3	271.863.934	3	31.610.952	3,0	32.919.456	3	34.283.679	3	35.706.038	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Barat)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1000	407.212.464	1000	105.369.840	1.000,0	109.731.520	1000	114.278.928	1000	119.020.124	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5	5	407.212.464	5	105.369.840	5,0	109.731.520	5	114.278.928	5	119.020.124	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	1.000	407.212.464	1.000	105.369.840	1.000,0	109.731.520	1.000	114.278.928	1.000	119.020.124	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Barat)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	413.525.840	0,3	105.369.840	0,3	109.731.520	0,3	114.278.928	0,3	119.020.124	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5	5	413.525.840	5	105.369.840	5,0	109.731.520	5	114.278.928	5	119.020.124	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	8	141.661.907	10	10.536.984	10,0	10.973.152	10	11.427.892	10	11.902.012	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	kelompok	5	3	271.863.933	3	94.832.856	3,0	98.758.368	3	102.851.036	3	107.118.112	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Barat)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	783.289.237	0,53	105.369.840	0,5	109.731.520	0,53	114.278.928	0,53	119.020.124	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5	5	783.289.237	5	105.369.840	5,0	109.731.520	5	114.278.928	5	119.020.124	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	1	102.888.000	1	5.268.492	1,0	5.486.576	1	5.713.947	1	5.951.007	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	8	141.661.908	10	5.268.492	10,0	5.486.576	10	5.713.946	10	5.951.006	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	538.739.329	2	94.832.856	2,0	98.758.368	2	102.851.035	2	107.118.111	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Berau Barat)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Barau Barat)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	310.793.720	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	310.793.720	1	100.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	310.793.720	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Barat)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	976.915.000	86.53	488.280.000	87.22	733.280.000	87.92	1.103.280.000	88.63	1.553.280.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	67.320.000	100	143.280.000	100,0	143.280.000	100	143.280.000	100	143.280.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	67.320.000	12	143.280.000	12,0	143.280.000	12	143.280.000	12	143.280.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	0	0	6	50.000.000	6,0	100.000.000	6	150.000.000	6	200.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	195.000.000	100,0	290.000.000	100	610.000.000	100	610.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	909.595.000	100	100.000.000	100,0	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	N/A	0	0	1	25.000.000			1	50.000.000	1	25.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	0	0	46	25.000.000	46,0	100.000.000	46	50.000.000	46	25.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	909.595.000	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Barau Barat)	Persentase Keluhan Peggungan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	%	100	100	881.390.000	100	892.150.000	100,0	981.150.000	100	1.136.150.000	100	1.136.150.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.240.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Peggungan Layanan yang Ditindaklanjuti	paket	12	8	10.240.000	8	10.000.000	8,0	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	810.350.000	100	821.150.000	100,0	821.150.000	100	821.150.000	100	821.150.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	181.550.000	12	181.550.000	12,0	181.550.000	12	181.550.000	12	181.550.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	628.800.000	12	639.600.000	12,0	639.600.000	12	639.600.000	12	639.600.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	60.800.000	100	61.000.000	100,0	150.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	0	0	25	10.000.000	25,0	70.000.000	25	155.000.000	25	155.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	24	60.800.000	44	1.000.000	44,0	10.000.000	44	50.000.000	44	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Bongan)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	3.427.239.089	0,225	2.489.940.273	0,2	2.108.518.321	0,268	2.265.548.799	0,29	2.838.681.555	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	157.052.700	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	157.052.700	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	150	160	3.270.186.389	160	2.133.092.749	160,0	1.700.693.009	160	1.771.171.794	160	2.344.654.043	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	N/A	1	53.793.500	1	213.309.275	1,0	170.069.301	1	177.117.179	1	234.465.404	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Ha				160	1.819.783.474	155,0	1.430.623.708	155	1.494.054.615	155	2.010.188.639	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	150	165	3.216.392.889	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Bongan)	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	%	0,51	0,5	2.157.814.279	0,5	2.133.092.749	0,5	1.700.693.009	0,5	1.771.171.794	0,5	2.344.654.043	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	Ha	N/A	332.993	2.157.814.279	332.993,46	2.133.092.749	332.993,5	1.700.693.009	332.993,46	1.771.171.794	332.993,46	2.344.654.043	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	2	12	179.714.558	12	426.618.550	12,0	340.138.602	12	354.234.359	12	468.930.809	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	50	12	1.664.130.706	12	639.927.825	12,0	510.207.903	12	531.351.538	12	703.396.213	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	332.993,46	313.969.015	51.476,00	639.927.825	51.476,0	510.207.903	51.476,00	531.351.538	51.476,00	703.396.213	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	426.618.550	4,0	340.138.602	4	354.234.359	4	468.930.809	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Bongan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,05	941.829.900	0,05	332.357.537	0,1	346.115.149	0,1	360.458.581	0,1	375.413.261	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masvarakat	Kelompok	4	5	941.829.900	5	332.357.537	5,0	346.115.149	5	360.458.581	5	375.413.261	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	843.249.692	1	232.650.276	1,0	242.280.604	1	252.321.007	1	262.789.283	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	98.580.208	4	99.707.261	4,0	103.834.545	4	108.137.574	4	112.623.978	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Bongan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	500	221.493.776	200	332.357.537	200,0	346.115.149	200	360.458.581	200	375.413.261	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	221.493.776	5	332.357.537	5,0	346.115.149	5	360.458.581	5	375.413.261	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	500	221.493.776	200	332.357.537	200,0	346.115.149	200	360.458.581	200	375.413.261	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Bongan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	189.237.280	0,3	332.357.537	0,3	346.115.149	0,3	360.458.581	0,3	375.413.261	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	189.237.280	5	332.357.537	5,0	346.115.149	5	360.458.581	5	375.413.261	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	90.657.073	10	33.235.754	10,0	34.611.515	10	36.045.858	10	37.541.326	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	98.580.207	4	299.121.783	4,0	311.503.634	4	324.412.723	4	337.871.935	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	933.906.765	0,53	332.357.537	0,5	346.115.149	0,53	360.458.581	0,53	375.413.261	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	933.906.765	5	332.357.537	5,0	346.115.149	5	360.458.581	5	375.413.261	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	16.617.877	1,0	17.305.757	1	18.022.929	1	18.770.663	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	90.657.072	10	16.617.877	10,0	17.305.757	10	18.022.929	10	18.770.663	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	4	843.249.693	1	299.121.783	1,0	311.503.634	1	324.412.723	1	337.871.935	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Bongnan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Bongnan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	321.038.661	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	321.038.661	1	100.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	321.038.661	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Bongnan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	231.090.000	86.53	723.800.000	87.22	1.058.800.000	87.92	1.628.800.000	88.63	2.028.800.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	65.460.000	100	248.800.000	100,0	348.800.000	100	448.800.000	100	448.800.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	65.460.000	12	148.800.000	12,0	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	N/A	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	60.000.000	100,0	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	4	10.000.000			4	50.000.000			
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	2	50.000.000	2,0	100.000.000	4	150.000.000	6	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	0	0	50	185.000.000	50,0	280.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	165.630.000	100	150.000.000	100,0	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	25.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	3,0	50.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	165.630.000	1	25.000.000	1,0	100.000.000	1	50.000.000	1	450.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Bongan)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	955.713.600	100	604.275.435	100,0	742.969.529	100	1.026.773.323	100	1.078.767.310	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	2	10.000.000	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	895.713.600	100	493.275.435	100,0	582.969.529	100	566.773.323	100	618.767.310	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12			12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	174.393.600	12	174.393.600	12,0	174.393.600	12	174.393.600	12	174.393.600	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	721.320.000	12	308.881.835	12,0	398.575.929	12	382.379.723	12	434.373.710	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	27	50.000.000	27	50.000.000	27,0	70.000.000	27	300.000.000	27	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	0		24	1.000.000	24,0	10.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	0	0	3	50.000.000	3,0	70.000.000	3	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Meratus)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	5.948.076.500	0,225	2.834.403.304	0,2	2.987.937.065	0,268	3.181.411.723	0,29	3.292.541.736	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	1.729.243.074	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1.729.243.074	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	178	4.218.833.426	150	2.477.555.780	165,0	2.580.111.753	165	2.687.034.718	165	2.798.514.224	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	246.479.346	1	247.755.578	1,0	258.011.176	1	268.703.473	1	279.851.423	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				150	2.005.922.413	150,0	2.093.094.990	150	2.183.979.510	150	2.278.737.090	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	200	178	3.972.354.080	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	N/A	0	0	3	123.877.789	3,0	129.005.587	3	134.351.735	3	139.925.711	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Meratus)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.129.292.000	0,5	2.477.555.780	0,5	2.580.111.753	0,5	2.687.034.718	0,5	2.798.514.224	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	330.344	1.129.292.000	330.344	2.477.555.780	330.344,0	2.580.111.753	330.344	2.687.034.718	330.344	2.798.514.224	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	4	10	449.800.000	10	495.511.156	10,0	516.022.353	10	537.406.945	10	559.702.846	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	4	10	370.992.000	10	743.266.734	10,0	774.033.525	10	806.110.415	10	839.554.267	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Ha	N/A	33.316,00	308.500.000	33.316,00	743.266.734	33.316,0	774.033.525	33.316,00	806.110.415	33.316,00	839.554.267	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	495.511.156	4,0	516.022.350	4	537.406.943	4	559.702.844	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Meratus)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,03	185.567.647	0,03	279.137.496	0,0	242.243.431	0,1	252.282.293	0,1	262.748.963	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7	5	185.567.647	2	279.137.496	2,0	242.243.431	2	252.282.293	2	262.748.963	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	103.858.666	1	195.396.247	1,0	169.570.401	1	176.597.605	1	183.924.274	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	7	81.708.981	7	83.741.249	6,0	72.673.030	6	75.684.688	6	78.824.689	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Meratus)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	50	100.400.000	20	325.660.412	20,0	242.243.431	20	252.282.293	20	262.748.963	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kelompok	7	5	100.400.000	2	325.660.412	2,0	242.243.431	2	252.282.293	2	262.748.963	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	50	100.400.000	50	325.660.412	50,0	242.243.431	20	252.282.293	20	262.748.963	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Meratus)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	127.908.981	0,3	100.000.000	0,3	242.243.431	0,3	252.282.293	0,3	262.748.963	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7	5	127.908.981	2	100.000.000	2,0	242.243.431	2	252.282.293	2	262.748.963	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Orang	N/A	54	46.200.000	10	10.000.000	10,0	24.224.343	10	25.228.229	10	26.274.896	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	7	81.708.981	6	90.000.000	6,0	218.019.088	6	227.054.064	6	236.474.067	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Meratus)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	150.058.667	0,53	325.660.412	0,5	242.243.431	0,53	252.282.293	0,53	262.748.963	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7	5	150.058.667	2	325.660.412	2,0	242.243.431	2	252.282.293	2	262.748.963	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	1	0	0	2	16.283.022	2,0	12.112.173	2	12.614.116	2	13.137.449	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	54	46.200.000	10	16.283.020	10,0	12.112.171	10	12.614.114	10	13.137.448	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	103.858.667	1	293.094.370	1,0	218.019.087	1	227.054.063	1	236.474.066	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Meratus)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Meratus)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	199.744.520	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	199.744.520	1	100.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	199.744.520	4	100.000.000	4,0	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Meratus)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	65.460.000	86,53	473.800.000	87,2	1.021.569.051	87.92	1.156.582.500	88.63	1.913.346.625	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	65.460.000	100	148.800.000	100,0	148.800.000	100	148.800.000	100	148.800.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	65.460.000	2	148.800.000	2,0	148.800.000	2	148.800.000	2	148.800.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0			3,0	50.000.000			3	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	205.000.000	100,0	300.000.000	100	520.000.000	100	620.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0	0	2	185.000.000	2,0	280.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	70.000.000	100,0	422.769.051	100	337.782.500	100	894.546.625	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	9	5.000.000	9,0	84.382.356	15	287.782.500	15	287.782.500	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0	3	10.000.000	10,0	288.386.695			7	53.382.063	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	25.000.000	1	25.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	25.000.000	1	25.000.000	1	53.382.063	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Meratus)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1.127.135.050	100	1.188.135.050	100,0	1.237.135.050	100	1.487.135.050	100	1.537.135.050	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	10.000.000	3	10.000.000	3,0	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	1.067.135.050	100	1.077.135.050	100,0	1.077.135.050	100	1.077.135.050	100	1.077.135.050	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	170.015.050	12	170.015.050	12,0	170.015.050	12	170.015.050	12	170.015.050	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	897.120.000	12	897.120.000	12,0	897.120.000	12	897.120.000	12	897.120.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	29	50.000.000	27	50.000.000	27,0	70.000.000	27	250.000.000	27	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43	0	0	45	1.000.000	45,0	10.000.000	45	50.000.000	45	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	2	50.000.000	2,0	70.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Kendilo)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,207	5.352.915.325	0,231	2.215.324.989	0,3	2.343.232.615	0,278	2.509.989.938	0,302	2.593.264.051	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	220.498.510	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	220.498.510	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	185	5.132.416.815	185	1.858.477.465	180,0	1.935.407.303	180	2.015.612.933	180	2.099.236.539	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	30.588.800	1	185.847.747	1,0	193.540.731	1	201.561.294	1	209.923.654	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			180	1.572.629.718	175,0	1.641.866.572	175	1.714.051.639	175	1.789.312.885	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha	159	185	5.101.828.015	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Kendilo)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	780.745.190	0,5	1.858.477.465	0,5	1.935.407.303	0,5	2.015.612.933	0,5	2.099.236.539	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	135.680	780.745.190	135.680	1.858.477.465	135.680,0	1.935.407.303	135.680	2.015.612.933	135.680	2.099.236.539	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	10	10	386.257.950	10	371.695.494	10,0	387.081.463	10	403.122.589	10	419.847.310	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	20	20	343.120.000	20	557.543.239	20,0	580.622.190	20	604.683.879	20	629.770.961	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	135.680,00	51.367.240	135.679,61	557.543.239	135.679,6	580.622.190	135.679,61	604.683.879	135.679,61	629.770.961	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Operasi	N/A	0	0	4	371.695.493	4,0	387.081.460	4	403.122.586	4	419.847.307	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Kendilo)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,2	1.033.945.326	0,2	513.143.717	0,2	534.384.794	0,2	667.836.419	0,2	579.619.640	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masvarakat	Kelompok	6	11	1.033.945.326	11	513.143.717	11,0	534.384.794	11	667.836.419	11	579.619.640	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	5	998.580.826	5	359.200.601	5,0	374.069.355	5	467.485.493	5	405.733.748	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	10	6	35.364.500	6	153.943.116	6,0	160.315.439	6	200.350.926	6	173.885.892	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Kendilo)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	2000	53.275.000	500	513.143.717	500,0	534.384.794	500	779.142.488	500	579.619.640	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan	Kelompok	6	2000	53.275.000	500	513.143.717	500,0	534.384.794	500	779.142.488	500	579.619.640	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	dan pemberdayaan masyarakat													
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	2.000	53.275.000	500	513.143.717	500,0	534.384.794	500	779.142.488	500	579.619.640	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Kendilo)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	48.028.000	0,3	513.143.717	0,3	534.384.794	0,3	100.000.000	0,3	579.619.640	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	11	48.028.000	11	513.143.717	11,0	534.384.794	11	100.000.000	11	579.619.640	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	3	6	12.663.500	10	51.314.371	10,0	53.438.479	10	10.000.000	10	57.961.964	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	10	6	35.364.500	6	461.829.346	6,0	480.946.315	6	90.000.000	6	521.657.676	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	1.011.244.326	0,53	513.143.717	0,5	534.384.794	0,53	779.142.488	0,53	579.619.640	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	11	1.011.244.326	11	513.143.717	11,0	534.384.794	11	779.142.488	11	579.619.640	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	25.657.187	1,0	26.719.241	1	38.957.125	1	28.980.982	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	3	6	12.663.500	10	25.657.185	10,0	26.719.239	10	38.957.124	10	28.980.982	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	5	998.580.826	5	461.829.345	5,0	480.946.314	5	701.228.239	5	521.657.676	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Kendilo)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Kendilo)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	240.139.760	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	240.139.760	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	240.139.760	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Kendilo)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	63.060.000	86,53	666.240.000	87,2	953.190.052	87.92	1.431.240.000	88.63	1.931.240.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	63.060.000	100	141.240.000	100,0	141.240.000	100	141.240.000	100	141.240.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	63.060.000	12	141.240.000	12,0	141.240.000	12	141.240.000	12	141.240.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	150.000.000	100,0	350.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	0	2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen	10	0	0	5	50.000.000	5,0	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Sistem Informasi Kepegawaian													
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	0	0	5	50.000.000	5,0	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	
3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	7	0	0	5	50.000.000	5,0	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	0	100	225.000.000	100,0	320.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	150.000.000	100,0	141.950.052	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti	Paket	6	0	0	2	25.000.000	4,0	60.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	0	10	50.000.000	8,0	31.950.052	25	100.000.000	25	50.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	1	50.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Kendilo)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	957.830.198	100	880.124.000	100,0	929.124.000	100	1.229.124.000	100	1.229.124.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	769.124.000	100	769.124.000	100,0	769.124.000	100	769.124.000	100	769.124.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	216.164.000	12	216.164.000	12,0	216.164.000	12	216.164.000	12	216.164.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	552.960.000	12	552.960.000	12,0	552.960.000	12	552.960.000	12	552.960.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	178.706.198	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34	50.000.000	34	50.000.000	34,0	70.000.000	34	300.000.000	34	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	0	0	40	1.000.000	40,0	10.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	128.706.198	2	50.000.000	2,0	70.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Santan)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	6.960.920.010	0,225	2.062.467.250	0,2	2.204.744.487	0,268	1.886.483.301	0,29	1.485.377.344	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	531.708.110	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	531.708.110	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	623	6.429.211.900	140	1.705.619.726	130,0	1.796.919.175	120	1.392.106.296	120	991.349.832	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				135	1.605.619.726	125,0	1.696.919.175	115	1.292.106.296	115	891.349.832	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	598	623	6.429.211.900	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Santan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.393.588.210	0,5	1.705.619.726	0,5	1.796.919.175	0,5	1.392.106.296	0,5	991.349.832	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha		261.647	1.393.588.210	261.647	1.705.619.726	261.647,0	1.796.919.175	261.647	1.392.106.296	261.647	991.349.832	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	12	505.868.920	12	341.123.945	12,0	359.383.835	12	278.421.259	12	198.269.966	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	12	802.379.290	12	511.685.918	12,0	539.075.753	12	417.631.889	12	297.404.950	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegaunya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	261.647	85.340.000	261.647	511.685.918	261.647,0	539.075.753	261.647	417.631.889	261.647	297.404.950	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	341.123.945	4,0	359.383.835	4	278.421.259	4	198.269.966	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Santan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,5	521.037.060	0,505	1.171.814.279	0,5	1.220.320.373	0,505	1.270.891.932	0,545	1.323.618.606	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	8	521.037.060	8	1.171.814.279	8,0	1.220.320.373	8	1.270.891.932	8	1.323.618.606	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	388.673.035	2	820.269.995	2,0	854.224.261	2	889.624.352	2	926.533.024	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1	4	132.364.025	6	351.544.284	6,0	366.096.112	6	381.267.580	6	397.085.582	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Santan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	100	107.010.000	100	1.171.814.279	100,0	1.220.320.373	100	1.270.891.932	100	1.323.618.606	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	8	107.010.000	8	1.171.814.279	8,0	1.220.320.373	8	1.270.891.932	8	1.323.618.606	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	100	107.010.000	100	1.171.814.279	100,0	1.220.320.373	100	1.270.891.932	100	1.323.618.606	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Santan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	192.506.525	0,3	1.171.814.279	0,3	1.220.320.373	0,3	1.270.891.932	0,3	1.323.618.606	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	8	192.506.525	8	1.171.814.279	8,0	1.220.320.373	8	1.270.891.932	8	1.323.618.606	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	7	60.142.500	10	117.181.428	10,0	122.032.037	10	127.089.193	10	132.361.861	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	N/A	4	132.364.025	6	1.054.632.851	6,0	1.098.288.336	6	1.143.802.739	6	1.191.256.745	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Santan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	448.815.535	0,53	1.171.814.279	0,5	1.220.320.373	0,53	1.270.891.932	0,53	1.323.618.606	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masvarakat	Kelompok	1	8	448.815.535	8	1.171.814.279	8,0	1.220.320.373	8	1.270.891.932	8	1.323.618.606	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	58.590.714	1,0	61.016.019	1	63.544.597	1	66.180.930	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	7	60.142.500	10	58.590.714	10,0	61.016.019	10	63.544.597	10	66.180.930	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	388.673.035	2	1.054.632.851	2,0	1.098.288.336	2	1.143.802.739	2	1.191.256.745	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Santan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Santan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	391.361.120	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	391.361.120	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	391.361.120	14	100.000.000	14,0	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Santan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	69.113.600	86.53	479.200.000	87.22	764.200.000	87.92	934.200.000	88.63	1.734.200.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	69.113.600	100	154.200.000	100,0	154.200.000	100	154.200.000	100	154.200.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	69.113.600	12	154.200.000	12,0	154.200.000	12	154.200.000	12	154.200.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0			2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	0	0	10	50.000.000	10,0	100.000.000	15	150.000.000	15	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	430.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	400.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	60.000.000	100,0	150.000.000	100	200.000.000	100	700.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0			2,0	50.000.000			4	50.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	20	5.000.000	10,0	25.000.000	15	50.000.000	10	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	0	0	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Santan)	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1.303.002.400	100	1.405.976.000	100,0	1.454.976.000	100	1.754.976.000	100	1.804.976.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	10.000.000	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	1.244.976.000	100	1.244.976.000	100,0	1.244.976.000	100	1.244.976.000	100	1.244.976.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	288.816.000	12	288.816.000	12,0	288.816.000	12	288.816.000	12	288.816.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	956.160.000	12	956.160.000	12,0	956.160.000	12	956.160.000	12	956.160.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	48.026.400	100	151.000.000	100,0	200.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	4	37.876.400	54	50.000.000	54,0	70.000.000	54	250.000.000	54	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	63	15	10.150.000	57	1.000.000	57,0	10.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0		1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	3.862.417.427	0,225	1.718.251.943	0,2	1.825.583.722	0,268	1.970.889.046	0,29	2.031.796.979	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	596.152.921	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	596.152.921	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	220	3.266.264.506	182	1.361.404.419	155,0	1.417.758.410	155	1.476.512.041	155	1.537.769.467	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	122.055.232	1	136.140.442	1,0	141.775.841	1	147.651.205	1	153.776.947	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				215	1.125.263.977	150,0	1.175.982.569	150	1.228.860.836	150	1.283.992.520	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	188	220	3.144.209.274	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.601.429.714	0,5	1.361.404.419	0,5	1.417.758.410	0,5	1.476.512.041	0,5	1.537.769.467	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	299,33	982.043	1.601.429.714	982.043	1.361.404.419	982.043,0	1.417.758.410	982.043	1.476.512.041	982.043	1.537.769.467	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	3	12	46.364.481	12	272.280.886	12,0	283.551.682	12	295.302.409	12	307.553.894	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	12	1.384.035.233	12	408.421.325	12,0	425.327.523	12	442.953.612	12	461.330.840	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	982.043	171.030.000	982.043	408.421.325	982.043,0	425.327.523	982.043	442.953.612	982.043	461.330.840	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0		4	272.280.883	4,0	283.551.682	4	295.302.408	4	307.553.893	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Das Belayan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,1	403.325.789	0,1	461.574.923	0,1	480.681.361	0,1	500.601.380	0,1	521.370.295	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	403.325.789	4	461.574.923	4,0	480.681.361	4	500.601.380	4	521.370.295	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	231.418.821	1	323.102.446	1,0	336.476.952	1	350.420.966	1	364.959.206	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	171.906.968	3	138.472.477	3,0	144.204.409	3	150.180.414	3	156.411.089	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Das Belayan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	630	125.667.859	630	461.574.923	630,0	480.681.361	630	500.601.380	630	521.370.295	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	125.667.859	4	461.574.923	4,0	480.681.361	4	500.601.380	4	521.370.295	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	650	125.667.859	630	461.574.923	630,0	480.681.361	630	500.601.380	630	521.370.295	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	270.667.968	0,3	461.574.923	0,3	480.681.361	0,3	500.601.380	0,3	521.370.295	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	270.667.968	4	461.574.923	4,0	480.681.361	4	500.601.380	4	521.370.295	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	20	98.761.000	10	46.157.492	10,0	48.068.136	10	50.060.138	10	52.137.029	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	171.906.968	3	415.417.431	3,0	432.613.225	3	450.541.242	3	469.233.266	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	330.179.821	0,53	461.574.923	0,5	480.681.361	0,53	500.601.380	0,53	521.370.295	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	330.179.821	4	461.574.923	4,0	480.681.361	4	500.601.380	4	521.370.295	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	23.078.747	1,0	24.034.069	1	25.030.069	1	26.068.516	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	8	30	98.761.000	10	23.078.746	10,0	24.034.068	10	25.030.069	10	26.068.514	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	231.418.821	1	415.417.430	1,0	432.613.224	1	450.541.242	1	469.233.265	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Das Belayan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	223.598.657	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	10	223.598.657	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	10	223.598.657	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Das Belayan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	1.223.687.664	86,53	346.240.000	87.22	621.240.000	87.92	941.240.000	88.63	1.441.240.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	59.970.000	100	141.240.000	100,0	141.240.000	100	141.240.000	100	141.240.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	59.970.000	12	141.240.000	12,0	141.240.000	12	141.240.000	12	141.240.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	185.000.000	100,0	280.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	1.163.717.664	100	20.000.000	100,0	200.000.000	100	200.000.000	100	700.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0			1,0	50.000.000			1	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	10.000.000	2,0	50.000.000	6	100.000.000	9	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1		
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	1.163.717.664	1	5.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Das Belayan)	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1.676.888.500	100	1.217.857.500	100,0	1.266.857.500	100	1.476.857.500	100	1.526.857.500	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.880.500	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	10.880.500	3	10.000.000	3,0	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%		100	1.108.297.000	100	1.106.857.500	100,0	1.106.857.500	100	1.106.857.500	100	1.106.857.500	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	213.097.000	12	213.097.500	12,0	213.097.500	12	213.097.500	12	213.097.500	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Laporan	12	12	895.200.000	12	893.760.000	12,0	893.760.000	12	893.760.000	12	893.760.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	557.711.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	24	134.776.000	46	50.000.000	46,0	70.000.000	46	250.000.000	46	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18	20.870.000	94	1.000.000	94,0	10.000.000	94	10.000.000	94	10.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1	402.065.000	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Bangalon)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,207	6.384.196.109	0,231	1.869.978.192	0,3	1.983.590.528	0,278	2.135.443.846	0,302	2.203.178.817	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	616.522.884	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	616.522.884	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	400	236	5.767.673.225	160	1.513.130.668	160,0	1.575.765.216	160	1.641.066.841	160	1.709.151.305	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	75.507.700	1	151.313.067	1,0	157.576.522	1	164.106.685	1	170.915.131	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			155	1.261.817.601	155,0	1.318.188.694	155	1.376.960.156	155	1.438.236.174	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	400	86	5.692.165.525	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Bengalon)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.386.180.030	0,5	1.513.130.668	0,5	1.575.765.216	0,5	1.641.066.841	0,5	1.709.151.305	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	655.875	1.386.180.030	655.875	1.513.130.668	655.875,0	1.575.765.216	655.875	1.641.066.841	655.875	1.709.151.305	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	4	43.341.000	4	302.626.135	4,0	315.153.045	4	328.213.369	4	341.830.262	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	6	12	689.228.626	12	453.939.200	12,0	472.729.564	12	492.320.052	12	512.745.391	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	655.874,58	653.610.404	655.874,58	453.939.200	655.874,6	472.729.564	655.874,58	492.320.052	655.874,58	512.745.391	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A			4	302.626.133	4,0	315.153.043	4	328.213.368	4	341.830.261	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Bengalon)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,1	760.431.180	0,1	435.556.567	0,1	453.586.000	0,1	472.383.155	0,1	491.981.354	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	7	760.431.180	7	435.556.567	7,0	453.586.000	7	472.383.155	7	491.981.354	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	640.546.335	3	304.889.596	3,0	317.510.200	3	330.668.208	3	344.386.947	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Kelompok	5	4	119.884.845	4	130.666.971	4,0	136.075.800	4	141.714.947	4	147.594.407	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Bengalon)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1100	301.813.024	1000	435.556.567	1.000,0	453.586.000	1000	472.383.155	1000	491.981.354	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	7	301.813.024	7	435.556.567	7,0	453.586.000	7	472.383.155	7	491.981.354	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	1.100	301.813.024	1.000	435.556.567	1.000,0	453.586.000	1.000	472.383.155	1.000	491.981.354	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Bengalon)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	119.884.845	0,3	435.556.567	0,3	453.586.000	0,3	472.383.155	0,3	491.981.354	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	7	119.884.845	3	435.556.567	3,0	453.586.000	3	472.383.155	3	491.981.354	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	43.555.656	10,0	45.358.600	10	47.238.315	10	49.198.135	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	5	4	119.884.845	4	392.000.911	4,0	408.227.400	4	425.144.840	4	442.783.219	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Bangalon)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	692.196.334	0,53	435.556.567	0,5	453.586.000	0,53	472.383.155	0,53	491.981.354	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	7	692.196.334	3	435.556.567	3,0	453.586.000	3	472.383.155	3	491.981.354	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	2	51.650.000	2	21.777.829	2,0	22.679.300	2	23.619.159	2	24.599.069	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	21.777.828	10,0	22.679.300	10	23.619.157	10	24.599.067	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	640.546.334	3	392.000.910	3,0	408.227.400	3	425.144.839	3	442.783.218	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Bangalon)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Bangalon)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	454.641.660	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	454.641.660	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	454.641.660	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Bengalon)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	1.427.405.938	86.53	546.240.000	87.22	972.467.047	87.92	1.351.240.000	88.63	2.001.240.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	60.660.000	100	191.240.000	100,0	241.240.000	100	291.240.000	100	291.240.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	60.660.000	4	141.240.000	4,0	141.240.000	4	141.240.000	4	141.240.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	4	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	0	0	100	50.000.000	100,0	200.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0			2,0	100.000.000			2	100.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49	0	0	10	50.000.000	10,0	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	195.000.000	100,0	290.000.000	100	610.000.000	100	610.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	4	185.000.000	4,0	280.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	1.366.745.938	100	110.000.000	100,0	241.227.047	100	300.000.000	100	800.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	4	386.977.913	0		0,0		0		4	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	8	80.535.425	8	50.000.000	8,0	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	899.232.600	1	10.000.000	1,0	41.227.047	2	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Bengalon)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1.251.404.800	100	916.400.000	100,0	995.400.000	100	1.196.590.000	100	1.196.590.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	10.000.000	6	10.000.000	6,0	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	805.400.000	100	805.400.000	100,0	805.400.000	100	805.400.000	100	805.400.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	3	212.240.000	4	212.240.000	4,0	212.240.000	4	212.240.000	4	212.240.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	593.160.000	12	593.160.000	12,0	593.160.000	12	593.160.000	12	593.160.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	436.004.800	100	101.000.000	100,0	180.000.000	100	381.190.000	100	381.190.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	42.728.000	36	50.000.000	36,0	70.000.000	36	215.000.000	36	215.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	77	11	7.272.000	57	1.000.000	57,0	40.000.000	57	66.190.000	57	66.190.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3	386.004.800	4	50.000.000	4,0	70.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Batu Ayau)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,150	0,193	6.170.675.092	0,215	3.481.075.440	0,2	3.682.074.560	0,258	3.425.035.727	0,28	3.587.761.124	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	723.141.908	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	723.141.908	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	190	5.447.533.184	190	3.124.227.916	190,0	3.274.249.248	190	2.930.658.722	190	3.093.733.612	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			185	2.711.805.125	185,0	2.846.824.324	185	2.537.592.850	185	2.684.360.251	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	90	40	5.179.113.168	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	10	9	268.420.016	9	312.422.791	9,0	327.424.924	9	293.065.872	9	309.373.361	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Batu Ayau)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	872.526.728	0,5	3.124.227.916	0,5	3.274.249.248	0,5	2.930.658.722	0,5	3.093.733.612	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	194.381	872.526.728	194.381	3.124.227.916	194.381,0	3.274.249.248	194.381	2.930.658.722	194.381	3.093.733.612	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	13	15	373.992.000	15	624.845.585	15,0	654.849.851	15	586.131.746	15	618.746.724	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	29	30	365.378.800	30	937.268.374	30,0	982.274.774	30	879.197.616	30	928.120.083	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	194.381	133.155.928	194.381	937.268.374	194.381,0	982.274.774	194.381	879.197.616	194.381	928.120.083	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A			4	624.845.583	4,0	654.849.849	4	586.131.744	4	618.746.722	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,05	246.794.100	0,05	108.259.070	0,1	112.740.347	0,08	97.843.703	0,1	101.903.036	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	3	246.794.100	3	108.259.070	3,0	112.740.347	3	97.843.703	3	101.903.036	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	165.884.100	2	75.781.349	2,0	78.918.242	2	68.490.592	2	71.332.125	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Kelompok	6	2	80.910.000	1	32.477.721	1,0	33.822.105	1	29.353.111	1	30.570.911	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1500	111.329.980	1000	126.302.248	1.000,0	131.530.405	1000	97.843.703	1000	101.903.036	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	3	111.329.980	3	126.302.248	3,0	131.530.405	3	97.843.703	3	101.903.036	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	200	111.329.980	1.000	126.302.248	1.000,0	131.530.405	1.000	97.843.703	1.000	101.903.036	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	150.210.000	0,3	97.843.703	0,3	97.843.703	0,3	97.843.703	0,3	101.903.036	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	3	150.210.000	3	97.843.703	3,0	97.843.703	3	97.843.703	3	101.903.036	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	69.300.000	10	9.784.370	10,0	9.784.370	10	9.784.370	10	10.190.303	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	6	2	80.910.000	2	88.059.333	2,0	88.059.333	2	88.059.333	3	91.712.733	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	235.184.100	0,53	126.302.248	0,5	131.530.405	0,53	97.843.703	0,53	101.903.036	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	%	4	3	235.184.100	3	126.302.248	3,0	131.530.405	3	97.843.703	3	101.903.036	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	6.315.113	1,0	6.576.521	1	4.892.186	1	5.095.153	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kanasitasnya	Orang	N/A	1	69.300.000	10	6.315.112	10,0	6.576.520	10	4.892.185	10	5.095.151	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	165.884.100	2	113.672.023	2,0	118.377.364	2	88.059.332	2	91.712.732	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Batu Ayau)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Batu Ayau)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	706.078.685	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	10	706.078.685	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	10	706.078.685	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	70.920.000	86.53	567.160.000	87.22	837.160.000	87.92	1.332.160.000	88.63	1.732.160.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	70.920.000	100	202.160.000	100,0	252.160.000	100	302.160.000	100	302.160.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	70.920.000	12	152.160.000	12,0	152.160.000	12	152.160.000	12	152.160.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	10	0	0	3	50.000.000	3,0	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	0	0	2	50.000.000	2,0	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	14	0	0	3	50.000.000	3,0	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	5	10.000.000	5,0	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	5	10.000.000	5,0	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	0	0	14	185.000.000	14,0	280.000.000	14	600.000.000	14	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	75.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0	1	10.000.000			1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000			1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	10.000.000	1,0	45.000.000	1	30.000.000	1	230.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	30.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Batu Ayau)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	949.182.000	100	1.042.502.000	100,0	1.121.502.000	100	1.476.502.000	100	1.466.502.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	30.000.000	100,0	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	10.000.000	7	30.000.000	7,0	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	889.182.000	100	911.502.000	100,0	911.502.000	100	911.502.000	100	911.502.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	195.702.000	12	195.702.000	12,0	195.702.000	12	195.702.000	12	195.702.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	693.480.000	12	715.800.000	12,0	715.800.000	12	715.800.000	12	715.800.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	180.000.000	100	535.000.000	100	525.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	35	50.000.000	96	50.000.000	96,0	70.000.000	96	385.000.000	96	385.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	0	0	30	1.000.000	30,0	40.000.000	30	50.000.000	30	40.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Utara)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	4.156.798.809	0,225	3.074.278.120	0,2	2.696.347.250	0,268	2.857.017.465	0,29	3.433.945.067	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	167.378.664	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	167.378.664	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	180	3.989.420.145	170	2.717.430.596	165,0	2.288.521.938	165	2.362.640.460	165	2.939.917.555	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	71.969.500	1	271.743.060	1,0	228.852.194	1	236.264.046	1	293.991.756	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/a			165	2.345.687.536	160,0	1.959.669.744	160	2.026.376.414	160	2.545.925.800	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	185	180	3.917.450.645	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Utara)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	725.683.528	0,5	2.717.430.596	0,5	2.288.521.938	0,5	2.362.640.460	0,5	2.939.917.555	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	260.147	725.683.528	260.147	2.717.430.596	260.147,0	2.288.521.938	260.147	2.362.640.460	260.147	2.939.917.555	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	12	105.019.990	12	543.486.119	12,0	457.704.388	12	472.528.092	12	587.983.511	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	69	12	317.772.538	12	815.229.179	12,0	686.556.581	12	708.792.138	12	881.975.267	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegaunya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	260.147	177.479.000	260.147	815.229.179	260.147,0	686.556.581	260.147	708.792.138	260.147	881.975.267	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Operasi	N/A	4	125.412.000	4	543.486.119	4,0	457.704.388	4	472.528.092	4	587.983.511	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Berau Utara)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,1	362.135.647	0,1	280.844.584	0,1	292.469.868	0,1	253.825.146	0,1	264.355.826	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	5	362.135.647	5	280.844.584	5,0	292.469.868	5	253.825.146	5	264.355.826	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	4	184.899.140	4	196.591.209	4,0	204.728.908	4	177.677.602	4	185.049.078	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	1	177.236.507	1	84.253.375	1,0	87.740.960	1	76.147.544	1	79.306.748	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Utara)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1000	138.417.413	500	327.652.015	500,0	341.214.846	500	253.825.146	500	264.355.826	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan	Kelompok	3	5	138.417.413	5	327.652.015	5,0	341.214.846	5	253.825.146	5	264.355.826	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat													
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	1.000	138.417.413	500	327.652.015	500,0	341.214.846	500	253.825.146	500	264.355.826	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Utara)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	198.236.508	0,3	100.000.000	0,3	100.000.000	0,3	253.825.146	0,3	264.355.826	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	5	198.236.508	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	253.825.146	5	264.355.826	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	21.000.000	10	10.000.000	10,0	10.000.000	10	25.382.515	10	26.435.583	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	3	1	177.236.508	1	90.000.000	1,0	90.000.000	1	228.442.631	1	237.920.243	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	247.899.140	0,53	327.652.015	0,5	341.214.846	0,53	253.825.146	0,53	264.355.826	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	5	247.899.140	5	327.652.015	5,0	341.214.846	5	253.825.146	5	264.355.826	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	3	42.000.000	3	16.382.601	3,0	17.060.742	3	12.691.257	3	13.217.791	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	21.000.000	10	16.382.601	10,0	17.060.742	10	12.691.257	10	13.217.791	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	4	184.899.140	4	294.886.814	4,0	307.093.361	4	228.442.631	4	237.920.243	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Berau Utara)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,54	48.521.660	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	2	48.521.660	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	48.521.660	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Berau Utara)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	302.716.340	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	302.716.340	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	302.716.340	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Utara)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	2.040.108.280	86.53	617.160.000	87.22	1.012.160.000	87.92	1.432.160.000	88.63	1.732.160.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	67.140.000	100	202.160.000	100,0	252.160.000	100	302.160.000	100	302.160.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	67.140.000	12	152.160.000	12,0	152.160.000	12	152.160.000	12	152.160.000	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%		100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0			41,0	50.000.000			41	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42	0	0	19	50.000.000	19,0	100.000.000	19	150.000.000	19	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	1.972.968.280	100	100.000.000	100,0	200.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Paket	2	0	0			3,0	50.000.000			3	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	4	50.000.000	3,0	50.000.000	5	100.000.000	8	50.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	1.972.968.280	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Utara)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	728.519.250	100	789.519.250	100,0	838.519.250	100	1.123.519.250	100	1.123.519.250	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	668.519.250	100	678.519.250	100,0	678.519.250	100	678.519.250	100	678.519.250	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	118.799.250	12	118.799.250	12,0	118.799.250	12	118.799.250	12	118.799.250	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	549.720.000	12	549.720.000	12,0	549.720.000	12	549.720.000	12	549.720.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	22	24	30.050.000	24	50.000.000	24,0	70.000.000	24	285.000.000	24	285.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	9.950.000	32	1.000.000	32,0	10.000.000	32	50.000.000	32	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	10.000.000	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	3.733.590.988	0,225	2.564.382.196	0,2	2.686.041.694	0,268	2.346.284.834	0,29	2.922.767.162	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	188.399.988	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	188.399.988	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	135	180	3.545.191.000	180	2.207.534.672	160,0	2.278.216.382	150	1.851.907.829	150	2.428.739.650	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				175	2.107.534.672	155,0	2.178.216.382	145	1.751.907.829	145	2.328.739.650	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	135	180	3.545.191.000	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.048.387.960	0,5	2.207.534.672	0,5	2.278.216.382	0,5	1.851.907.829	0,5	2.428.739.650	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	334.456	1.048.387.960	334.456	2.207.534.672	334.456,0	2.278.216.382	334.456	1.851.907.829	334.456	2.428.739.650	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	12	190.968.000	12	441.506.936	12,0	455.643.278	12	370.381.568	12	485.747.930	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	12	776.283.300	12	662.260.401	12,0	683.464.914	12	555.572.348	12	728.621.895	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegaunya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	334.455,70	81.136.660	334.455,70	662.260.401	334.455,7	683.464.914	334.455,70	555.572.348	334.455,70	728.621.895	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	441.506.934	4,0	455.643.276	4	370.381.565	4	485.747.930	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,05	1.216.733.561	0,05	274.685.517	0,1	286.055.853	0,1	297.910.355	0,1	310.270.038	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	6	1.216.733.561	6	274.685.517	6,0	286.055.853	6	297.910.355	6	310.270.038	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	1.177.943.561	3	192.279.861	3,0	200.239.097	3	208.537.248	3	217.189.026	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	38.790.000	3	82.405.656	3,0	85.816.756	3	89.373.107	3	93.081.012	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1000	134.280.000	1000	274.685.517	1.000,0	286.055.853	1000	297.910.355	1000	310.270.038	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	200	134.280.000	400	274.685.517	200,0	286.055.853	200	297.910.355	200	310.270.038	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	200	134.280.000	400	274.685.517	200,0	286.055.853	200	297.910.355	200	310.270.038	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	64.735.000	0,3	274.685.517	0,3	286.055.853	0,3	297.910.355	0,3	310.270.038	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	8	64.735.000	8	274.685.517	8,0	286.055.853	8	297.910.355	8	310.270.038	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	5	25.945.000	10	27.468.551	10,0	28.605.585	10	29.791.035	10	31.027.003	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	38.790.000	3	247.216.966	3,0	257.450.268	3	268.119.320	3	279.243.035	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	1.255.079.701	0,53	274.685.517	0,5	286.055.853	0,53	297.910.355	0,53	310.270.038	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	10	1.255.079.701	5	274.685.517	5,0	286.055.853	5	297.910.355	5	310.270.038	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	2	51.191.140	1	13.734.277	1,0	14.302.794	1	14.895.519	1	15.513.503	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	5	25.945.000	10	13.734.275	10,0	14.302.792	10	14.895.517	10	15.513.501	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	1.177.943.561	3	247.216.965	3,0	257.450.267	3	268.119.319	3	279.243.034	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Berau Tengah)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindungnya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	317.284.010	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	317.284.010	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	317.284.010	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	60.040.000	86.53	574.200.000	87.22	1.028.309.317	87.92	1.389.200.000	88.63	1.939.200.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	60.040.000	100	189.200.000	100,0	239.200.000	100	289.200.000	100	289.200.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	60.040.000	12	139.200.000	12,0	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0			1,0	50.000.000			1	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	6	50.000.000	6,0	100.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	185.000.000	100,0	280.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	100.000.000	100,0	259.109.317	100	200.000.000	100	700.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	0	0			1,0	50.000.000			1	50.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	41	0	0	9	50.000.000	9,0	109.109.317	9	100.000.000	9	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Tengah)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	941.678.000	100	992.058.000	100,0	1.041.058.000	100	1.296.058.000	100	1.296.058.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	11.520.317	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	5	11.520.317	5	10.000.000	5,0	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	880.160.683	100	881.058.000	100,0	881.058.000	100	881.058.000	100	881.058.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	155.480.683	12	155.418.000	12,0	155.418.000	12	155.418.000	12	155.418.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	724.680.000	12	725.640.000	12,0	725.640.000	12	725.640.000	12	725.640.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	49.997.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	25	49.997.000	25	50.000.000	25,0	70.000.000	25	255.000.000	25	255.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	0	0	1	1.000.000	1,0	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	3.596.951.696	0,225	2.083.781.141	0,2	2.206.243.639	0,268	2.367.323.973	0,29	2.444.679.170	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	332.606.656	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan	Dokumen	2	1	332.606.656	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Pengelolaan Hutan yang Tersusun													
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	130	3.264.345.040	110	1.726.933.617	110,0	1.798.418.327	100	1.872.946.968	100	1.950.651.658	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	94.000.000	1	172.693.362	1,0	179.841.833	1	187.294.697	1	195.065.166	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			105	1.454.240.255	105,0	1.518.576.494	95	1.585.652.271	95	1.655.586.492	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	111	130	3.170.345.040	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.479.558.240	0,5	1.726.933.617	0,5	1.798.418.327	0,5	1.872.946.968	0,5	1.950.651.658	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	149.826	1.479.558.240	149.826	1.726.933.617	149.826,0	1.798.418.327	149.826	1.872.946.968	149.826	1.950.651.658	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	4	587.517.080	24	345.386.724	24,0	359.683.666	24	374.589.395	24	390.130.333	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	12	749.995.320	21	518.080.085	21,0	539.525.498	21	561.884.090	21	585.195.497	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	149.826	84.822.920	149.826	518.080.085	149.826,0	539.525.498	149.826	561.884.090	149.826	585.195.497	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4,00	57.222.920	4,00	345.386.723	4,0	359.683.665	4,00	374.589.393	4,00	390.130.331	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,205	882.548.537	0,3	495.741.298	0,4	430.218.349	0,35	448.047.121	0,4	466.635.668	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	3	882.548.537	3	495.741.298	3,0	430.218.349	3	448.047.121	3	466.635.668	
3.28.05.1.01.0009.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	818.230.577	1	347.018.908	1,0	301.152.844	1	313.632.984	1	326.644.967	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Kelompok	3	2	64.317.960	2	148.722.390	2,0	129.065.505	2	134.414.137	2	139.990.701	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	500	80.070.000	500	578.364.848	500,0	430.218.349	500	448.047.121	500	466.635.668	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	3	80.070.000	3	578.364.848	3,0	430.218.349	3	448.047.121	3	466.635.668	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	500	80.070.000	500	578.364.848	500,0	430.218.349	500	448.047.121	500	466.635.668	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	145.677.960	0,3	100.000.000	0,3	430.218.349	0,3	448.047.121	0,3	466.635.668	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	3	145.677.960	3	100.000.000	3,0	430.218.349	3	448.047.121	3	466.635.668	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	4	81.360.000	10	10.000.000	10,0	43.021.835	10	44.804.712	10	46.663.567	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	3	2	64.317.960	2	90.000.000	2,0	387.196.514	2	403.242.409	2	419.972.101	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	978.310.577	0,53	578.364.848	0,5	430.218.349	0,53	448.047.121	0,53	466.635.668	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	3	978.310.577	3	578.364.848	3,0	430.218.349	3	448.047.121	3	466.635.668	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	1	78.720.000	1	28.918.242	1,0	21.510.917	1	22.402.356	1	23.331.783	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	4	81.360.000	10	28.918.242	10,0	21.510.917	10	22.402.356	10	23.331.783	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	818.230.577	1	520.528.363	1,0	387.196.514	1	403.242.409	1	419.972.101	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Berau Pantai)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	245.136.660	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	245.136.660	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	245.136.660	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	808.771.200	86.53	559.800.000	87.22	854.800.000	87.92	1.174.800.000	88.63	1.774.800.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	58.320.000	100	124.800.000	100,0	124.800.000	100	124.800.000	100	124.800.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	58.320.000	12	124.800.000	12,0	124.800.000	12	124.800.000	12	124.800.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0			2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	185.000.000	100,0	280.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	750.451.200	100	200.000.000	100,0	300.000.000	100	300.000.000	100	800.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	0	2	50.000.000					2	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	4	750.451.200	1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Berau Pantai)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	749.357.600	100	810.357.600	100,0	899.357.600	100	1.094.357.600	100	1.094.357.600	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Paket	N/A	10	10.000.000	5	10.000.000	5,0	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	689.357.600	100	699.357.600	100,0	699.357.600	100	699.357.600	100	699.357.600	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	139.637.600	12	139.637.600	12,0	139.637.600	12	139.637.600	12	139.637.600	
3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	0	0	6	10.000.000	6,0	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	549.720.000	12	549.720.000	12,0	549.720.000	12	549.720.000	12	549.720.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	190.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	50.000.000	20	50.000.000	20,0	70.000.000	20	235.000.000	20	235.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	0	0	1	1.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Manubar)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	4.679.889.602	0,225	2.832.436.857	0,2	2.944.495.207	0,268	2.594.728.367	0,29	3.160.774.138	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	443.051.377	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	443.051.377	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	121	191	4.236.838.225	5	2.475.589.333	5,0	2.536.669.895	5	2.100.351.362	5	2.666.746.626	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2	2	135.443.810	1	247.558.934	1,0	253.666.990	1	210.035.137	1	266.674.663	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/a			171	2.128.030.399	160,0	2.183.002.905	150	1.790.316.225	150	2.300.071.963	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	121	191	4.101.394.415	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Manubar)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	2.273.071.367	0,5	2.475.589.333	0,5	2.536.669.895	0,5	2.100.351.362	0,5	2.666.746.626	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	239.248	2.273.071.367	239.248	2.475.589.333	239.248,0	2.536.669.895	239.248	2.100.351.362	239.248	2.666.746.626	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan	Laporan	2	4	488.060.325	4	495.117.869	4,0	507.333.980	4	420.070.274	4	533.349.327	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan													
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	50	12	605.490.988	12	742.676.799	12,0	761.000.968	12	630.105.408	12	800.023.987	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	239.248,00	557.199.760	239.247,97	742.676.799	239.248,0	761.000.968	239.247,97	630.105.408	239.247,97	800.023.987	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4	622.320.294	4	495.117.866	4,0	507.333.979	4	420.070.272	4	533.349.325	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Manubar)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,03	290.278.753	0,03	250.428.108	0,1	260.794.332	0,08	271.601.966	0,1	282.870.169	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	290.278.753	5	250.428.108	5,0	260.794.332	5	271.601.966	5	282.870.169	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	248.325.893	1	175.299.676	1,0	182.556.032	1	190.121.376	1	198.009.118	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	41.952.860	4	75.128.432	4,0	78.238.300	4	81.480.590	4	84.861.051	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Manubar)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	Ha	N/A	300	102.492.945	300	250.428.108	300,0	260.794.332	300	271.601.966	300	282.870.169	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	300	102.492.945	300	250.428.108	300,0	260.794.332	300	271.601.966	300	282.870.169	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasnya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	300	102.492.945	300	250.428.108	300,0	260.794.332	300	271.601.966	300	282.870.169	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Manubar)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	110.855.250	0,3	250.428.108	0,3	260.794.332	0,3	271.601.966	0,3	282.870.169	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	110.855.250	5	250.428.108	5,0	260.794.332	5	271.601.966	5	282.870.169	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	68.902.391	10	25.042.810	10,0	26.079.433	10	27.160.196	10	28.287.016	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	41.952.859	4	225.385.298	4,0	234.714.899	4	244.441.770	4	254.583.153	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Manubar)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	411.308.283	0,53	250.428.108	0,5	260.794.332	0,53	271.601.966	0,53	282.870.169	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	411.308.283	5	250.428.108	5,0	260.794.332	5	271.601.966	5	282.870.169	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	1	94.080.000	1	12.521.406	1,0	13.039.718	1	13.580.098	1	14.143.509	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	68.902.391	1	12.521.405	1,0	13.039.716	1	13.580.098	1	14.143.508	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		N/A	1	248.325.892	1	225.385.297	1,0	234.714.898	1	244.441.769	1	254.583.152	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Manubar)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,54	68.373.270	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	2	68.373.270	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	68.373.270	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Manubar)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	310.531.580	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	310.531.580	1	100.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	ORang	N/A	14	310.531.580	14	100.000.000	14,0	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Manubar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	60.600.000	86,53	504.200.000	87,2	765.647.377	87.92	1.088.861.755	88.63	1.815.056.489	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	60.600.000	100	139.200.000	100,0	139.200.000	100	139.200.000	100	139.200.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	60.600.000	12	139.200.000	12,0	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0			2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	2	50.000.000	2,0	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	530.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	100.000.000	100,0	166.447.377	100	269.661.755	100	795.856.489	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0			24,0	68.180.366			24	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	10	25.000.000	10,0	28.267.011	20	119.661.755	22	145.856.489	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Manubar)	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	935.910.000	100	986.850.000	100,0	1.035.850.000	100	1.302.352.788	100	1.335.850.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terseleenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	10.000.000	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	871.080.740	100	875.850.000	100,0	875.850.000	100	875.850.000	100	875.850.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	221.280.740	4	226.050.000	4,0	226.050.000	4	226.050.000	4	226.050.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	649.800.000	12	649.800.000	12,0	649.800.000	12	649.800.000	12	649.800.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	54.829.260	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	416.502.788	100	450.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	35	54.829.260	35	50.000.000	35,0	70.000.000	35	266.502.788	35	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	0	0	94	1.000.000	94,0	10.000.000	94	50.000.000	94	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Kelinjau)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,207	5.752.021.290	0,231	2.782.867.246	0,3	2.934.267.722	0,278	3.125.518.258	0,302	3.234.329.367	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	500.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	500.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	100	345	5.252.021.290	260	2.426.019.722	220,0	2.526.442.410	185	2.631.141.253	175	2.740.301.855	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/a			255	2.326.019.722	215,0	2.426.442.410	180	2.531.141.253	170	2.640.301.855	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	380	345	5.252.021.290	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Kelnjau)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	850.000.000	0,5	2.426.019.722	0,5	2.526.442.410	0,5	2.631.141.253	0,5	2.740.301.855	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	939.988	850.000.000	939.988	2.426.019.722	939.988,0	2.526.442.410	939.988	2.631.141.253	939.988	2.740.301.855	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	1	1	200.000.000	1	485.203.946	1,0	505.288.482	1	526.228.253	1	548.060.372	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	42	1	350.000.000	12	727.805.916	12,0	757.932.723	12	789.342.375	12	822.090.556	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegaunya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	939.988,17	100.000.000	939.988,17	727.805.916	939.988,2	757.932.723	939.988,17	789.342.375	939.988,17	822.090.556	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4	200.000.000	4	485.203.944	4,0	505.288.482	4	526.228.250	4	548.060.371	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Kelnjau)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,03	300.820.500	0,03	135.263.219	0,1	140.862.306	0,08	146.699.811	0,1	152.786.082	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	3	300.820.500	3	135.263.219	3,0	140.862.306	3	146.699.811	3	152.786.082	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	4	1	263.320.500	1	94.684.253	1,0	98.603.614	1	102.689.867	1	106.950.257	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	2	37.500.000	2	40.578.966	2,0	42.258.692	2	44.009.944	2	45.835.825	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Kelinjau)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	1500	516.900.000	500	135.263.219	500,0	140.862.306	500	146.699.811	500	152.786.082	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	1.500	516.900.000	500	135.263.219	500,0	140.862.306	500	146.699.811	500	152.786.082	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	1.500	516.900.000	500	135.263.219	500,0	140.862.306	500	146.699.811	500	152.786.082	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Kelinjau)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	62.600.000	0,3	135.263.219	0,3	140.862.306	0,3	146.699.811	0,3	152.786.082	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kelompok	4	3	62.600.000	3	135.263.219	3,0	140.862.306	3	146.699.811	3	152.786.082	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	5	2	25.100.000	10	20.000.000	10,0	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	2	37.500.000	2	115.263.219	2,0	120.862.306	2	126.699.811	2	132.786.082	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Kelinjau)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	338.620.500	0,53	135.263.219	0,5	140.862.306	0,53	146.699.811	0,53	152.786.082	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	3	338.620.500	3	135.263.219	3,0	140.862.306	3	146.699.811	3	152.786.082	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	1	50.200.000	1	6.763.162	1,0	7.043.116	1	7.334.992	1	7.639.305	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	5	2	25.100.000	10	6.763.160	10,0	7.043.115	10	7.334.990	10	7.639.304	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	263.320.500	1	121.736.897	1,0	126.776.075	1	132.029.829	1	137.507.473	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Kelinjau)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Kelinjau)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	262.277.280	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	1	262.277.280	1	100.000.000	1,0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	14	262.277.280	14	100.000.000	14,0	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Kelinjau)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	65.460.000	86,53	543.800.000	87,2	888.800.000	87.92	1.108.800.000	88.63	1.558.800.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	65.460.000	100	148.800.000	100,0	148.800.000	100	148.800.000	100	148.800.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	65.460.000	1	148.800.000	1,0	148.800.000	1	148.800.000	1	148.800.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	0	3,0	50.000.000			3	50.000.000	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	0	100	195.000.000	100,0	290.000.000	100	610.000.000	100	610.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	5	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	1	185.000.000	1,0	280.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	150.000.000	100,0	300.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	0	0	4	50.000.000	6,0	100.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	10	50.000.000	10,0	100.000.000	33	100.000.000	35	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	450.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Kelinjau)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	966.259.400	100	1.017.259.400	100,0	1.066.259.400	100	1.326.259.400	100	1.326.259.400	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	10.000.000	5	10.000.000	5,0	10.000.000	4	10.000.000	7	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%		100	906.259.400	100	906.259.400	100,0	906.259.400	100	906.259.400	100	906.259.400	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3	240.259.400	1	240.259.400	1,0	240.259.400	1	240.259.400	1	240.259.400	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	666.000.000	1	666.000.000	1,0	666.000.000	1	666.000.000	1	666.000.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%		100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	34	50.000.000	34	50.000.000	34,0	70.000.000	34	300.000.000	34	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	0	0	54	1.000.000	54,0	10.000.000	54	10.000.000	54	10.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	2.340.599.800	0,225	1.615.172.183	0,2	1.718.237.077	0,268	1.859.093.825	0,29	1.915.363.607	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	244.080.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	244.080.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	35	250	2.096.519.800	300	1.258.324.659	300,0	1.310.411.765	300	1.364.716.820	300	1.421.336.095	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	156.000.000	1	125.832.466	1,0	131.041.177	1	136.471.682	1	142.133.610	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	105	100	369.519.800	100	1.069.575.960	150,0	1.113.850.000	150	1.160.009.297	150	1.208.135.681	
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	N/A	150	1.571.000.000	200	62.916.233	150,0	65.520.588	150	68.235.841	150	71.066.805	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	2.156.223.300	0,5	1.258.324.659	0,5	1.310.411.765	0,5	1.364.716.820	0,5	1.421.336.095	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	109.115	2.156.223.300	109.115	1.258.324.659	109.115,0	1.310.411.765	109.115	1.364.716.820	109.115	1.421.336.095	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	2	2	931.743.100	2	251.664.932	2,0	262.082.353	2	272.943.364	2	284.267.219	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	4	4	1.199.480.200	4	377.497.398	4,0	393.123.530	4	409.415.046	4	426.400.829	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegaunya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	108.707	25.000.000	109.115	377.497.398	109.115,0	393.123.530	109.115	409.415.046	109.115	426.400.829	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	251.664.932	4,0	262.082.353	4	272.943.364	4	284.267.219	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,6	2.500.652.835	0,65	761.411.406	0,7	792.929.279	0,65	825.789.232	0,7	860.049.517	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	4	2.500.652.835	4	761.411.406	4,0	792.929.279	4	825.789.232	4	860.049.517	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	2.298.668.835	3	532.987.984	3,0	555.050.495	3	578.052.462	3	602.034.662	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	N/A	2	201.984.000	1	228.423.422	1,0	237.878.784	1	247.736.770	1	258.014.855	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	500	191.109.700	500	761.411.406	500,0	792.929.279	500	825.789.232	500	860.049.517	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	4	191.109.700	4	761.411.406	4,0	792.929.279	4	825.789.232	4	860.049.517	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	500	191.109.700	500	761.411.406	500,0	792.929.279	500	825.789.232	500	860.049.517	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	276.984.000	0,3	761.411.406	0,3	792.929.279	0,3	825.789.232	0,3	860.049.517	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	4	276.984.000	4	761.411.406	4,0	792.929.279	4	825.789.232	4	860.049.517	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	30	75.000.000	10	76.141.141	10,0	79.292.928	10	82.578.923	10	86.004.952	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kelompok	N/A	2	201.984.000	1	685.270.265	1,0	713.636.351	1	743.210.309	1	774.044.565	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	2.373.668.835	0,53	761.411.406	0,5	792.929.279	0,53	825.789.232	0,53	860.049.517	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	4	2.373.668.835	4	761.411.406	4,0	792.929.279	4	825.789.232	4	860.049.517	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	38.070.570	1,0	39.646.464	1	41.289.462	1	43.002.476	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	30	75.000.000	10	38.070.570	10,0	39.646.464	10	41.289.462	10	43.002.476	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	2.298.668.835	3	685.270.265	3,0	713.636.351	3	743.210.309	3	774.044.565	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A		0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A			2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	46.480.000	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	46.480.000	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	46.480.000	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	65.460.000	86.53	713.800.000	87.22	1.033.800.000	87.92	1.578.800.000	88.63	2.078.800.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	65.460.000	100	198.800.000	100,0	248.800.000	100	298.800.000	100	298.800.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	65.460.000	12	148.800.000	12,0	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	N/A	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	0	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%		100	0	100	100.000.000	100,0	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0	0	0	3,0	50.000.000	0	0	3	50.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0	0	0	3,0	50.000.000	0	0	3	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	5	50.000.000	5,0	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	3	10.000.000	3,0	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	150.000.000	100,0	125.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	0	0	1	25.000.000	1,0	25.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	0	0	1	50.000.000	2,0	50.000.000	10	100.000.000	15	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	450.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	25.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Delta Mahakam)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	995.917.200	100	1.046.917.200	100,0	1.095.917.200	100	1.355.917.200	100	1.355.917.200	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	10	10.000.000	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	935.917.200	100	935.917.200	100,0	935.917.200	100	935.917.200	100	935.917.200	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	204.157.200	12	204.157.200	12,0	204.157.200	12	204.157.200	12	204.157.200	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12	731.760.000	12	731.760.000	12,0	731.760.000	12	731.760.000	12	731.760.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	17	50.000.000	17	50.000.000	17,0	70.000.000	17	300.000.000	17	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	0	70	1.000.000	70,0	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Damai)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	4.501.833.798	0,225	2.243.930.622	0,2	2.373.022.350	0,268	2.541.014.196	0,29	2.625.575.441	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	670.002.528	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	670.002.528	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	175	3.831.831.270	60	1.887.083.098	60,0	1.965.197.038	60	2.046.637.191	60	2.131.547.929	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				55	1.787.083.098	55,0	1.865.197.038	55	1.946.637.191	55	2.031.547.929	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	75	85	3.831.831.270	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Damai)	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	%	0,51	0,5	1.082.474.262	0,5	1.887.083.098	0,5	1.965.197.038	0,5	2.046.637.191	0,5	2.131.547.929	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	Ha	N/A	516.533	1.082.474.262	516.533	1.887.083.098	516.533,0	1.965.197.038	516.533	2.046.637.191	516.533	2.131.547.929	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	10	12	239.368.272	12	377.416.621	12,0	393.039.409	12	409.327.439	12	426.309.588	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	10	12	592.622.300	12	566.124.929	12,0	589.559.111	12	613.991.157	12	639.464.378	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	516.533	171.022.790	516.533	566.124.929	516.533,0	589.559.111	516.533	613.991.157	516.533	639.464.378	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	4	79.460.900	4	377.416.619	4,0	393.039.407	4	409.327.438	4	426.309.585	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,125	337.185.160	0,125	234.792.294	0,1	244.511.289	0,125	212.203.445	0,125	221.007.326	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	337.185.160	4	234.792.294	4,0	244.511.289	4	212.203.445	4	221.007.326	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	290.349.250	2	164.354.605	2,0	171.157.902	2	148.542.411	2	154.705.128	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	2	46.835.910	2	70.437.689	2,0	73.353.387	2	63.661.034	2	66.302.198	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Damai)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	200	97.259.500	500	273.924.343	500,0	285.263.171	500	212.203.445	500	221.007.326	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	97.259.500	4	273.924.343	4,0	285.263.171	4	212.203.445	4	221.007.326	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	200	97.259.500	500	273.924.343	500,0	285.263.171	500	212.203.445	500	221.007.326	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Damai)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	210.935.910	0,3	100.000.000	0,3	100.000.000	0,3	212.203.445	0,3	221.007.326	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	210.935.910	4	100.000.000	4,0	100.000.000	4	212.203.445	4	221.007.326	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	20	164.100.000	10	10.000.000	10,0	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	2	46.835.910	2	90.000.000	2,0	90.000.000	2	192.203.445	2	201.007.326	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Damai)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	556.929.250	0,53	273.924.343	0,5	285.263.171	0,53	212.203.445	0,53	221.007.326	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	556.929.250	4	273.924.343	4,0	285.263.171	4	212.203.445	4	221.007.326	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	7	102.480.000	1	13.696.218	1,0	14.263.160	1	10.610.173	1	11.050.367	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	20	164.100.000	10	13.696.217	10,0	14.263.158	10	10.610.172	10	11.050.366	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	290.349.250	2	246.531.908	2,0	256.736.853	2	190.983.100	2	198.906.593	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Damai)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,54	63.480.000	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindungnya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	2	63.480.000	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	63.480.000	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Damai)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	338.343.800	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	338.343.800	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	338.343.800	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Damai)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	65.460.000	86.53	623.800.000	87.22	959.083.433	87.92	1.428.800.000	88.63	1.878.800.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	65.460.000	100	198.800.000	100,0	248.800.000	100	298.800.000	100	298.800.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	12	65.460.000	12	148.800.000	12,0	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	2	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	10.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	4	10.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	100.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0		1,0	50.000.000			1	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	0	0	20	50.000.000	20,0	100.000.000	20	150.000.000	20	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	0	4	10.000.000	4,0	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	13	10.000.000	13,0	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0	0	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	0	0	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	0	100	150.000.000	100,0	150.283.433	100	200.000.000	100	600.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0	2	25.000.000	4,0	50.000.000					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	4	50.000.000	1,0	20.283.433	10	100.000.000	10	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	Unit	1	0	0	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	50.000.000	1	450.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	25.000.000	1,0	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Damai)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1.894.215.600	100	976.124.000	100,0	1.016.124.000	100	1.276.124.000	100	1.276.124.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	10.000.000	12	10.000.000	8,0	10.000.000	8	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	866.124.000	100	866.124.000	100,0	866.124.000	100	866.124.000	100	866.124.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3	107.004.000	12	107.004.000	12,0	107.004.000	12	107.004.000	12	107.004.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12	759.120.000	12	759.120.000	12,0	759.120.000	12	759.120.000	12	759.120.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	1.018.091.600	100	100.000.000	100,0	140.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	24	50.000.000	24	50.000.000	24,0	70.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	968.091.600	3	50.000.000	3,0	70.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,203	4.584.445.708	0,225	2.639.415.558	0,2	2.764.180.988	0,268	2.927.662.316	0,29	#####	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	991.883.608	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1,00	494.377.005	1,00	494.027.512,0 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	991.883.608	1,00	356.847.524	1,0	407.825.312	1,00	494.377.005	1,00	494.027.512,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	145	3.592.562.100	135	2.282.568.034	140,0	2.356.355.676	165	2.433.285.311	165	#####	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	180.000.000	1	228.256.804	1,0	235.635.568	1	243.328.532	1	301.349.332,00	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/a			130	1.954.311.230	135,0	2.020.720.108	160	2.089.956.779	160	2.612.143.982,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	115	145	3.412.562.100	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.084.952.340	0,5	2.282.568.034	0,5	2.356.355.676	0,5	2.433.285.311	0,5	#####	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	408.153	1.084.952.340	408.153	2.282.568.034	408.153,0	2.356.355.676	408.153	2.433.285.311	408.153	3.013.493.314,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	3	3	168.060.000	3	456.513.608	3,0	471.271.137	3	486.657.063	3	602.698.664,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	12	754.732.340	12	684.770.410	12,0	706.906.702	12	729.985.593	12	904.047.994,00	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	410.738	162.160.000	408.153	684.770.410	408.153,0	706.906.702	408.153	729.985.593	408.153	904.047.994,00	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	456.513.606	4,0	471.271.135	4	486.657.062	4	602.698.662,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,15	1.031.492.260	0,2	192.960.153	0,2	200.947.547	0,2	209.275.058	0,2	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	6	1.031.492.260	6	192.960.153	6,0	200.947.547	6	209.275.058	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	901.725.385	2	135.072.107	2,0	140.663.282	2	146.492.540	2	152.570.212,00	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	4	129.766.875	4	57.888.046	4,0	60.284.265	4	62.782.518	4	65.387.235,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	2000	200.000.000	500	192.960.153	500,0	200.947.547	500	209.275.058	500	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	6	200.000.000	6	192.960.153	6,0	200.947.547	6	209.275.058	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	2.000	200.000.000	500	192.960.153	500,0	200.947.547	500	209.275.058	500	217.957.447,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	176.266.875	0,3	192.960.153	0,3	200.947.547	0,3	209.275.058	0,3	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	20	6	176.266.875	6	192.960.153	6,0	200.947.547	6	209.275.058	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	15	46.500.000	10	19.296.015	10,0	20.094.754	10	20.927.505	10	21.795.744,00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang	Kelompok	5	4	129.766.875	4	173.664.138	4,0	180.852.793	4	188.347.553	4	196.161.703,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	948.225.385	0,53	192.960.153	0,5	200.947.547	0,53	209.275.058	0,53	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	20	6	948.225.385	6	192.960.153	6,0	200.947.547	6	209.275.058	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	0	0	6	9.648.009	6,0	10.047.378	6	10.463.754	6	10.897.873,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	15	46.500.000	10	9.648.007	10,0	10.047.377	10	10.463.752	10	10.897.872,00	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	2	901.725.385	2	173.664.137	2,0	180.852.792	2	188.347.552	2	196.161.702,00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000,00	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	0	0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000,00	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	16.900.000	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000,00	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	258.033.700	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	258.033.700	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	258.033.700	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	438.579.532	86,53	574.000.000	87,2	1.061.724.734	87.92	1.528.315.106	88.63	#####	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	60.660.000	100	179.000.000	100,0	229.000.000	100	279.000.000	100	279.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	60.660.000	12	129.000.000	12,0	129.000.000	12	129.000.000	12	129.000.000,00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12			12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	10.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4			4	10.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	100.000.000	100,0	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2					1,0	50.000.000			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1			1	50.000.000	1,0	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORang	12			5	50.000.000	5,0	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	530.000.000	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2			2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5			5	10.000.000	5,0	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2			2	10.000.000	2,0	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12			12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	377.919.532	100	70.000.000	100,0	172.724.734	100	269.315.106	100	777.234.999,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti	Paket	N/A			1	5.000.000	1,0	50.000.000			1	25.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A			2	10.000.000	1,0	72.724.734	7	169.315.106	8	227.234.999,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	377.919.532	1	50.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2			1	5.000.000	1,0	25.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Mook Manor Bulatn)	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	%	100	100	862.060.000	100	913.060.000	100,0	962.060.000	100	1.212.060.000	100	#####	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	10.000.000	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	802.060.000	100	802.060.000	100,0	802.060.000	100	802.060.000	100	802.060.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	117.700.000	12	117.700.000	12,0	117.700.000	12	117.700.000	12	117.700.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	684.360.000	12	684.360.000	12,0	684.360.000	12	684.360.000	12	684.360.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	3	45.570.000	34	50.000.000	34,0	70.000.000	34	250.000.000	34	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	7	4.430.000	35	1.000.000	35,0	10.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Telake)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,160	0,207	4.234.341.420	0,231	4.693.421.883	0,3	4.465.301.892	0,278	4.782.162.167	0,302	4.521.935.893	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	750.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	750.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	145	3.484.341.420	165	4.336.574.359	180,0	4.057.476.580	180	4.287.785.162	180	4.027.908.381	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2	2	122.746.920	2	433.657.437	2,0	405.747.658	2	428.778.517	2	402.790.839	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				160	3.586.088.205	135,0	3.348.855.093	175	3.544.617.387	175	3.323.722.123	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	122	145	3.188.334.500	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	4	3	173.260.000	3	216.828.717	3,0	202.873.829	3	214.389.258	3	201.395.419	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHP Telake)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	1.379.993.080	0,5	4.336.574.359	0,5	4.057.476.580	0,5	4.287.785.162	0,5	4.027.908.381	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	245.390	1.379.993.080	245.390	4.336.574.359	245.390,0	4.057.476.580	245.390	4.287.785.162	245.390	4.027.908.381	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	8	6,00	229.993.080	6,00	1.300.972.308	6,0	1.217.242.974	6,00	1.286.335.548	6,00	1.208.372.514	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	10	5	950.000.000	5	1.300.972.308	5,0	1.217.242.974	5	1.286.335.548	5	1.208.372.514	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	249.694	200.000.000	245.389,80	867.314.872	245.389,8	811.495.316	245.389,80	857.557.034	245.389,80	805.581.677	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	867.314.872	4,0	811.495.316	4	857.557.032	4	805.581.676	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHP Telake)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,05	900.000.000	0,05	178.330.158	0,1	154.759.965	0,1	161.173.406	0,1	167.860.157	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	6	900.000.000	8	178.330.158	9,0	154.759.965	10	161.173.406	11	167.860.157	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	750.000.000	5	89.165.079	6,0	77.379.982	7	80.586.703	8	83.930.078	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	150.000.000	3	89.165.079	3,0	77.379.983	3	80.586.703	3	83.930.079	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Telake)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	100	124.000.000	100	208.051.851	100,0	154.759.965	100	161.173.406	100	167.860.157	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	6	124.000.000	8	208.051.851	9,0	154.759.965	10	161.173.406	11	167.860.157	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	100	124.000.000	100	208.051.851	100,0	154.759.965	100	161.173.406	100	167.860.157	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Telake)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	150.000.000	0,3	100.000.000	0,3	154.759.965	0,3	161.173.406	0,3	167.860.157	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	150.000.000	23	100.000.000	23,0	154.759.965	23	161.173.406	23	167.860.157	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A		0	10	10.000.000	10,0	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	150.000.000	3	90.000.000	3,0	134.759.965	3	141.173.406	3	147.860.157	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHP Telake)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	939	750.000.000	1650	208.051.851	1.650,0	154.759.965	1650	161.173.406	1650	167.860.157	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masvarakat	Kelompok	3	3	750.000.000	8	208.051.851	9,0	154.759.965	10	161.173.406	11	167.860.157	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	1	0	0	1	10.402.594	1,0	7.737.999	1	8.058.671	1	8.393.009	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	10.402.592	10,0	7.737.998	10	8.058.670	10	8.393.007	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	3	750.000.000	5	187.246.665	6,0	139.283.968	7	145.056.065	8	151.074.141	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHP Telake)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	N/A	0	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	SPesies	N/A		0	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A			1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHP Telake)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	308.500.000	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	14	308.500.000	14	100.000.000	14,0	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	14	308.500.000	14	100.000.000	14,0	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Telake)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	420.320.000	86:53:00	458.680.000	3,6	573.680.000	87.92	1.043.680.000	88.63	1.243.680.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	70.320.000	100	163.680.000	100,0	163.680.000	100	163.680.000	100	163.680.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	1	70.320.000	1	163.680.000	1,0	163.680.000	1	163.680.000	1	163.680.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0			1,0	50.000.000			1	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	0	0	5	50.000.000	5,0	50.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	230.000.000	100	430.000.000	100	530.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	0	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	1	10.000.000	1,0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	12	185.000.000	12,0	200.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	350.000.000	100	30.000.000	100,0	80.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	0	0	1	10.000.000			1	50.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	76	0	0	1	5.000.000	9,0	40.000.000	9	100.000.000	50	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	350.000.000	3	10.000.000	1,0	20.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1,0	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHP Telake)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	94	100	1.088.061.500	100	1.446.261.500	100,0	1.495.261.500	100	1.705.261.500	100	1.755.261.500	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	98,16	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	10.000.000	4	10.000.000	4,0	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	1.028.061.500	100	1.335.261.500	100,0	1.335.261.500	100	1.335.261.500	100	1.335.261.500	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	165.861.500	12	165.861.500	12,0	165.861.500	12	165.861.500	12	165.861.500	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12	862.200.000	12	1.169.400.000	12,0	1.169.400.000	12	1.169.400.000	12	1.169.400.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	101.000.000	100,0	150.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	40	42.000.000	40	50.000.000	40,0	70.000.000	40	250.000.000	40	300.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	38	8.000.000	38	1.000.000	38,0	10.000.000	38	10.000.000	38	10.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2			1	50.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,16	0,184	2.924.279.484	0,195	3.869.693.464	0,2	4.225.728.194	0,219	3.931.062.292	0,231	3.656.269.608	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	2	1	1.200.920.400	1	356.847.535	1,0	407.825.318	1	494.377.008	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1.200.920.400	1	356.847.535	1,0	407.825.318	1	494.377.008	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	83	1.723.359.084	40	2.458.992.151	90,0	2.701.798.557	90	2.405.679.699	90	2.213.569.468	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			25	2.358.992.151	25,0	2.601.798.557	25	2.305.679.699	25	2.113.569.468	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50	37	1.723.359.084	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	SK,Sertifikat	1	1	0	1	1.053.853.778	1,0	1.116.104.319	1	1.031.005.585	1	948.672.628	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang	N/A	0	0	500000	1.053.853.778	500.000,0	1.116.104.319	500000	1.031.005.585	500000	948.672.628	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	%	0,51	0,5	1.000.000.000	0,5	3.512.845.929	0,5	3.720.347.732	0,5	3.436.685.284	0,5	3.162.242.096	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	Ha	N/A	16.115	1.000.000.000	16.115	3.512.845.929	16.115,0	3.720.347.732	16.115	3.436.685.284	16.115	3.162.242.096	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	12	5	150.000.000	5	702.569.188	5,0	744.069.548	5	687.337.058	5	632.448.421	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	12	450.000.000	12	1.053.853.778	12,0	1.116.104.319	12	1.031.005.585	12	948.672.628	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	16.115	400.000.000	16.115	1.053.853.778	16.115,0	1.116.104.319	16.115	1.031.005.585	16.115	948.672.628	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	N/A	0	0	4	702.569.185	4,0	744.069.546	4	687.337.056	4	632.448.419	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,7	2.538.905.859	0,75	56.561.649	0,8	70.683.555	0,75	61.343.973	0,75	63.889.007	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	2.538.905.859	6	56.561.649	6,0	70.683.555	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	4	2.438.905.859	4	39.593.154	4,0	49.478.488	4	42.940.781	4	44.722.304	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	2	100.000.000	2	16.968.495	2,0	21.205.067	2	18.403.192	2	19.166.703	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Balikpapan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	Ha	N/A	50	100.000.000	50	56.561.649	50,0	82.464.147	50	61.343.973	50	63.889.007	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	100.000.000	6	56.561.649	6,0	82.464.147	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	N/A	50	100.000.000	50	56.561.649	50,0	82.464.147	50	61.343.973	50	63.889.007	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	100.000.000	0,3	56.561.649	0,3	61.343.973	0,3	61.343.973	0,3	63.889.007	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	100.000.000	6	56.561.649	6,0	61.343.973	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	5.656.164	10,0	6.134.397	10	6.134.397	10	6.388.900	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	2	100.000.000	2	50.905.485	2,0	55.209.576	2	55.209.576	2	57.500.107	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	2.438.905.859	0,53	56.561.649	0,5	82.464.147	0,53	61.343.973	0,53	63.889.007	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	2.438.905.859	6	56.561.649	6,0	82.464.147	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	0	0	1	2.828.083	1,0	4.123.208	1	3.067.200	1	3.194.451	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	0	0	10	2.828.082	10,0	4.123.207	10	3.067.198	10	3.194.450	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	4	2.438.905.859	4	50.905.484	4,0	74.217.732	4	55.209.575	4	57.500.106	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHL Balikpapan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,54	100.000.000	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	1	2	100.000.000	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	100.000.000	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	410.970.000	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah DAS yang dikelola	Dokumen	N/A	7	410.970.000	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	410.970.000	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHL Balikpapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	1.187.014.000	86.53	613.440.000	87.22	968.440.000	87.92	1.528.440.000	88.63	2.128.440.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	61.200.000	100	198.440.000	100,0	248.440.000	100	298.440.000	100	298.440.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	61.200.000	12	148.440.000	12,0	148.440.000	12	148.440.000	12	148.440.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	12	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	0	0	4	50.000.000	4,0	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	50.000.000	100,0	110.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	195	0	0	0		2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	0	0	10	50.000.000	10,0	60.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	709.810.000	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	0	0	10	10.000.000	10,0	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	0	0	20	10.000.000	20,0	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	3	10.000.000	3,0	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	709.810.000	12	185.000.000	12,0	280.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	416.004.000	100	100.000.000	100,0	200.000.000	100	300.000.000	100	800.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0	0			2,0	50.000.000			2	100.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	0	0	15	40.000.000	15,0	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2	416.004.000	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	50.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHL Balikpapan)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	%	100	100	1.506.734.392	100	1.160.156.000	100,0	1.169.156.000	100	1.579.156.000	100	1.579.156.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	397.578.392	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	14	397.578.392	50	10.000.000	50,0	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	1.059.156.000	100	1.059.156.000	100,0	1.059.156.000	100	1.059.156.000	100	1.059.156.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	275.436.000	12	275.436.000	12,0	275.436.000	12	275.436.000	12	275.436.000	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	783.720.000	1	783.720.000	1,0	783.720.000	1	783.720.000	1	783.720.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	91.000.000	100,0	100.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	22	47.970.000	54	50.000.000	54,0	50.000.000	54	320.000.000	54	320.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	3	2.030.000	99	1.000.000	99,0	10.000.000	99	100.000.000	99	100.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	N/A	0		2	40.000.000	2,0	40.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook														
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,150	0,193	8.534.826.494	0,215	1.596.808.101	0,2	1.699.112.832	0,258	1.839.177.049	0,28	1.894.620.524	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	Unit	1	1	985.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	985.000.000	1	356.847.524	1,0	407.825.312	1	494.377.005	1	494.027.512	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara														
Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara (Ha)	Ha	50	170	7.549.826.494	180	1.239.960.577	150,0	1.291.287.520	150	1.344.800.044	150	1.400.593.012	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	7	300.000.000	1	123.996.059	1,0	129.128.752	1	134.480.005	1	140.059.302	
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	N/A			45	953.966.490	45,0	997.594.392	45	1.043.080.037	45	1.090.504.060	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	20	86	6.649.826.494	5	100.000.000	5,0	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	11	600.000.000	1	61.998.028	1,0	64.564.376	1	67.240.002	1	70.029.650	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	%	0,51	0,5	2.729.535.974	0,5	1.239.960.577	0,5	1.291.287.520	0,5	1.344.800.044	0,5	1.400.593.012	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
Terlindungnya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan (Ha)	Ha	N/A	644.456	2.729.535.974	644.456	1.239.960.577	644.456,0	1.291.287.520	644.456	1.344.800.044	644.456	1.400.593.012	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	6	3	890.000.000	12	247.992.116	12,0	258.257.504	12	268.960.010	12	280.118.604	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	10	12	1.506.535.974	12	371.988.173	12,0	387.386.256	12	403.440.013	12	420.177.903	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	N/A	644.456	333.000.000	644.456	371.988.173	644.456,0	387.386.256	644.456	403.440.013	644.456	420.177.903	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Operasi	N/A			4	247.992.115	4,0	258.257.504	4	268.960.008	4	280.118.602	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD KPHL Batu Rook)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Milyar Rupiah	N/A	0,05	1.029.099.999	0,05	169.850.527	0,1	147.401.102	0,1	153.509.582	0,1	159.878.377	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	sa	3	1.029.099.999	3	169.850.527	3,0	147.401.102	3	153.509.582	3	159.878.377	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	777.850.533	1	118.895.369	1,0	103.180.771	1	107.456.707	1	111.914.864	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Kelompok	4	2	251.249.466	1	50.955.158	1,0	44.220.331	1	46.052.875	1	47.963.513	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Batu Rook)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat	Ha	N/A	5000	123.325.000	1000	198.158.948	1.000,0	147.401.102	1000	153.509.582	1000	159.878.377	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Luas area kelola masyarakat meningkat	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	123.325.000	3	198.158.948	3,0	147.401.102	3	153.509.582	3	159.878.377	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial														
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Ha	N/A	5.000	123.325.000	1.000	198.158.948	1.000,0	147.401.102	1.000	153.509.582	1.000	159.878.377	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	N/A	0,3	307.949.467	0,3	147.401.102	0,3	147.401.102	0,3	153.509.582	0,3	159.878.377	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	307.949.467	3	147.401.102	3,0	147.401.102	3	153.509.582	3	159.878.377	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	56.700.000	10	14.740.110	10,0	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	4	2	251.249.467	2	132.660.992	2,0	127.401.102	2	133.509.582	2	139.878.377	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	N/A	0,53	897.550.534	0,53	198.158.948	0,5	147.401.102	0,53	153.509.582	0,53	159.878.377	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	7	897.550.534	7	198.158.948	7,0	147.401.102	7	153.509.582	7	159.878.377	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	2	63.000.000	2	9.907.948	2,0	7.370.056	2	7.675.480	2	7.993.920	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A	1	56.700.000	10	9.907.947	10,0	7.370.055	10	7.675.479	10	7.993.918	
3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	N/A	1	777.850.534	1	178.343.053	1,0	132.660.991	1	138.158.623	1	143.890.539	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya														
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD KPHL Batu Rook)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,540	450.000.000	0,547	16.900.000	0,6	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi														
Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES	Data spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	N/A	2	450.000.000	2	16.900.000	2,0	17.400.000	2	17.900.000	2	18.350.000	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	N/A	1	450.000.000	1	16.900.000	1,0	17.400.000	1	17.900.000	1	18.350.000	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)														
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,955	64,959	505.789.706	64,962	100.000.000	65,0	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS yang Disusun	Dokumen	N/A	7	505.789.706	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	N/A	7	505.789.706	7	100.000.000	7,0	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHL Batu Rook)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	85.84	5.523.800.000	86.53	612.160.000	87.22	1.057.160.000	87.92	1.567.160.000	88.63	2.167.160.000	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Keuangan	%	100	100	58.800.000	100	187.160.000	100,0	237.160.000	100	287.160.000	100	287.160.000	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	58.800.000	12	137.160.000	12,0	137.160.000	12	137.160.000	12	137.160.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	12	0	0	12	50.000.000	12,0	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tertib administrasi aset daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%		0	0	2	50.000.000	2,0	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	2	50.000.000	2,0	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan SDM perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	0	100	100.000.000	100,0	210.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	0	2,0	50.000.000	0	0	2	50.000.000	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	0	0	2	50.000.000	2,0	80.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	0	0	15	50.000.000	15,0	80.000.000	15	150.000.000	15	200.000.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	215.000.000	100,0	310.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	0	0	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	0	0	20	185.000.000	20,0	280.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang/jasa penunjang kegiatan pemerintahan daerah	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	5.465.000.000	100	60.000.000	100,0	200.000.000	100	200.000.000	100	700.000.000	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	0			2,0	50.000.000			2	50.000.000	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A			1	25.000.000			1	50.000.000	1	50.000.000	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	2	4.890.000.000	1	25.000.000	1,0	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	13	575.000.000	1	10.000.000	1,0	50.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD KPHL Batu Rook)	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	%	100	100	517.563.260	100	498.850.000	100,0	597.850.000	100	677.850.000	100	677.850.000	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kegiatan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100,0	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12,0	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan penunjang teknis dan operasional perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	457.563.260	100	397.850.000	100,0	397.850.000	100	397.850.000	100	397.850.000	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	152.763.260	12	93.050.000	12,0	93.050.000	12	93.050.000	12	93.050.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	304.800.000	12	304.800.000	12,0	304.800.000	12	304.800.000	12	304.800.000	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya aset dan sarana prasarana pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	50.000.000	100	91.000.000	100,0	190.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	21	50.000.000	21	50.000.000	21,0	70.000.000	21	120.000.000	21	120.000.000	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	0		15	1.000.000	15,0	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	1	40.000.000	1,0	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

C

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Untuk mendukung program prioritas ditetapkan sub kegiatan prioritas. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Renstra Dinas Lingkunga Hidup tahun 2025-2029.

Tabel 20. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
			3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
			3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
			3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	
			3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	
			3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	
			3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.03.1.06.0006 Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
3	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
			3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
			3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
			3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	
			3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	
			3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	
			3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
			3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
			3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
			3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
			3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
			3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
			3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
			3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
			3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
			3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
6	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
			3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
			3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
			3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	
			3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
			3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
			3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
			3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	
			3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
			3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	
			3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
			3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
			3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
			3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
			3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
			3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
			3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	
			3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang/UPTD di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 21. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Rumus			2024	2025	2026	TARGET TAHUN		2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	2027	2028	(10)	(11)	(12)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	%	$\frac{LPE_t - LPE_{t-1}}{LPE_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : - LPE_t : LPE tahun sekarang - LPE_{t-1} : LPE tahun sebelumnya			0,72	0,84	0,88	0,94	0,99	1,05	1,09	
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	Rumus Umum Laju Pertumbuhan Ekonomi: $\text{Laju Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{PDRB Tahun Ini} - \text{PDRB Tahun Lalu}}{\text{PDRB Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$			1,51	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	
3	Persentase Tutupan Lahan	%	Rumus /Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase Tutupan Lahan} = \frac{\text{Luas Daratan yang ditutupi Vegetasi}}{\text{Total Luas Daratan}} \times 100 \%$			47,00	47,7	47,9	48,09	48,22	48,35	48,64	
4	Meningkatnya tutupan lahan diwilayah DAS	Ha	Rumus /Formulasi Perhitungan : $\text{Jumlah Luas Areal Penanaman di wilayah DAS}$			350.070	438.951	465.671	489.474	506.194	522.914	542.914	
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan	%	Rumus /Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase Penurunan Emisi} = \frac{\text{Baseline Emisi GRK} - \text{Emisi GRK Tahun Berjalan}}{\text{Baseline Emisi GRK}} \times 100\%$			50,15	24,2	25,48	26,56	27,64	28,72	29,8	
6	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	Juta ton CO ₂ e	Rumus /Formulasi Perhitungan : $\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi BaU} - \text{Emisi Aktual/Mitigasi}$			3,42	1,65	1,74	1,81	1,88	1,96	2,63	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Rumus	2024	2025	2026	TARGET TAHUN		2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2027	2028	(10)	(11)	(12)
	dari Business as Usual (BaU)										
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi penilaian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penilaian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah. Komponen penilaian terdiri dari : Perencanaan Kinerja 30% + Pengukuran Kinerja 25% + Pelaporan Kinerja 15% + Evaluasi Kinerja 10% + Capaian Kinerja 20%	76,4	77	77,5	78	78,5	79	79,5	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM = ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi IKM = SKM Unit Pelayanan x 25	85,16	85,5	87	87,5	88	88,5	89	

Tabel 22. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	
2	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	n/a	0,533	0.540	0.547	0,555	0,568	0,572	
3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	1	6	6	6	6	6	6	
4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	10	10	10	10	10	10	10	
5	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	64,95	64,95	65,04	65,12	65,20	65,28	65,36	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung upaya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada isu strategis pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Renstra ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.

Program-program yang dirumuskan, seperti Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis: meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, menurunkan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, menjaga kelestarian sumber daya alam, memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui implementasi Renstra ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk memperkuat fungsi perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keseluruhan upaya ini diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung sasaran pembangunan nasional.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2025-2029 menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2029. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan target-target pembangunan sektor Kehutanan dapat tercapai sesuai rencana.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan sektor Kehutanan dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pendekatan Pentahelix dengan para

- pihak diantaranya KLHK dan UPT KLHK, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Otorita IKN, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi, Mitra pembangunan, dan Media.
2. Renstra Dishut Kaltim menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renja Dishut Kaltim) tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Dishut Kaltim dengan menggunakan evaluasi hasil Renja Dishut Kaltim secara periodik.

Renstra Dishut Kaltim menjadi salah satu tolok ukur kinerja pada penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Samarinda, 7 November 2025

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP. 19750807 200003 1 003



**METADATA INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA RPJMD
TAHUN 2025-2045**

Metadata terdiri dari nama indikator, definisi, rumus perhitungan, interpretasi dan sumber data. Penjabaran masing-masing metadata sebagai berikut:

A. METADATA INDIKATOR TUJUAN

Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan

1.	Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)
	Definisi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan adalah persentase perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sub sektor kehutanan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan sub sektor kehutanan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), Hak Guna Usaha (HGU), Pemegang Izin Sah Lainnya (ISL) dan pemegang Perhutanan Sosial dengan hasil produk sebagai berikut: • Hasil hutan kayu (Hutan Tanaman/Hutan Alam/ Kegiatan Non Kehutanan) • Hasil hutan non-kayu (getah, rotan, madu, dll.) • Jasa Lingkungan (Ekowisata dan Karbon)
	Rumus Perhitungan	Rumus Umum Laju Pertumbuhan Ekonomi: $\text{Laju Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{PDRB Tahun Ini} - \text{PDRB Tahun Lalu}}{\text{PDRB Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$
	Interpretasi	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (%) menggambarkan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Timur dalam kurun waktu tertentu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kontribusi sub sektor kehutanan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Jika nilainya positif, berarti terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di bidang kehutanan seperti produksi hasil hutan kayu dan non-kayu, jasa lingkungan, serta kegiatan rehabilitasi dan konservasi yang bernilai ekonomi. Sebaliknya, jika nilainya negatif, menunjukkan penurunan kinerja ekonomi kehutanan, yang dapat disebabkan oleh berkurangnya produksi, pembatasan izin pemanfaatan hutan, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal seperti cuaca dan pasar global. Dengan demikian, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting bagi Dishut Kaltim dalam menilai efektivitas kebijakan pengelolaan hutan dan

		kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
	Sumber Data	Badan Pusat Statistik
2.	Nama Indikator	Persentase Tutupan Lahan (%)
	Definisi	Vegetasi adalah kumpulan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah atau area tertentu berupa hutan primer dan hutan sekunder. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang di tutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. Luas Daratan yang ditutupi Vegetasi adalah luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain yang berupa hutan primer dan hutan sekunder. Total Luas Daratan adalah luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain Persentase tutupan lahan adalah proporsi luas daratan yang ditutupi oleh vegetasi dibandingkan dengan total luas daratan yang dinyatakan dalam persen (%).
	Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tutupan Lahan} = \frac{\text{Luas Daratan yang ditutupi Vegetasi}}{\text{Total Luas Daratan}} \times 100 \%$
	Interpretasi	Persentase tutupan lahan merupakan indikator yang menggambarkan proporsi luas wilayah yang masih tertutup oleh vegetasi alami atau buatan, seperti hutan, semak, perkebunan, dan vegetasi lainnya, dibandingkan dengan total luas wilayah suatu daerah. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi lingkungan masih relatif baik dan terjaga, dengan fungsi ekologi seperti penyerapan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian erosi yang tetap berjalan optimal. Sebaliknya, nilai persentase tutupan lahan yang rendah mengindikasikan adanya penurunan kualitas lingkungan, akibat konversi hutan menjadi lahan non-vegetatif seperti permukiman, pertambangan, atau lahan terbuka. Oleh karena itu, indikator ini penting digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pelestarian lingkungan, rehabilitasi hutan, serta efektivitas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan di suatu.
	Sumber Data	Peta Tutupan Lahan Kementerian Kehutanan
3.	Nama Indikator	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (%)
	Definisi	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu (juta ton CO₂e). Baseline Bussines as Usual Emisi GRK (Baseline Emisi GRK) adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada Sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (10 Tahun) tanpa intervensi kebijakan dan /atau teknologi mitigasi (juta ton CO₂e). Sektor Kehutanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Emisi Tahun Berjalan adalah emisi GRK pada tahun berjalan (juta ton CO₂e). Persentase penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dibandingkan Baseline Emisi GRK, yang dinyatakan dalam bentuk persentase(%). Indikator ini menunjukkan efektivitas upaya pengurangan emisi melalui perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penurunan Emisi} = \frac{\text{Baseline Emisi GRK} - \text{Emisi GRK Tahun Berjalan}}{\text{Baseline Emisi GRK}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan seperti deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan penggunaan lahan. Nilai persentase yang tinggi menandakan adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan hutan secara lestari, penerapan program rehabilitasi dan konservasi hutan, serta peningkatan praktik penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah atau negatif mengindikasikan bahwa upaya pengendalian emisi belum optimal, dan kemungkinan masih terjadi peningkatan aktivitas yang berdampak terhadap pelepasan karbon ke atmosfer. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran penting bagi efektivitas kebijakan mitigasi perubahan iklim, sekaligus mencerminkan kontribusi sektor kehutanan dan tata guna lahan terhadap pencapaian target penurunan emisi di tingkat
Sumber Data	Peta tutupan lahan, Data kerusakan hutan.

B. METADATA INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Definisi	Sektor Kehutanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan sistem pengelolaan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto dari sektor kehutanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah (nasional atau daerah) dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{PDRB Sektor Kehutanan}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100$
Interpretasi	Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan besarnya peran dan sumbangan kegiatan ekonomi di bidang kehutanan terhadap total nilai tambah ekonomi daerah dalam satu periode tertentu. Nilai kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa sektor kehutanan masih menjadi komponen penting dalam perekonomian daerah, baik melalui produksi hasil hutan kayu dan non-kayu, jasa lingkungan, maupun kegiatan industri turunan kehutanan yang memberikan dampak ekonomi signifikan. Sebaliknya, nilai kontribusi yang rendah atau menurun dapat mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi kehutanan, pergeseran struktur ekonomi ke sektor lain, atau kebijakan pembatasan pemanfaatan hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, indikator ini penting untuk menilai peran strategis sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya hutan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

2. Meningkatnya Pengelolaan Hutan

Nama Indikator	Meningkatnya tutupan lahan di wilayah DAS (Ha)
Definisi	Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang di tutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

	Meningkatnya tutupan lahan di wilayah DAS adalah Kenaikan tutupan lahan yang berada di kawasan wilayah Daerah Aliran Sungai.
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah Luas Areal Penanaman di wilayah DAS</i>
Interpretasi	Meningkatnya tutupan lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan dan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan serta konservasi sumber daya hutan di kawasan tersebut. Kenaikan luas tutupan lahan (dalam hektare) mencerminkan bertambahnya area yang kembali tertutup vegetasi alami atau hasil penanaman kembali, seperti hutan, semak belukar, atau vegetasi lainnya, yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem DAS. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan DAS dalam menyerap air, mengurangi erosi dan sedimentasi, menurunkan risiko banjir serta kekeringan, serta memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan dan pemulihan fungsi ekologis DAS, sekaligus mendukung tujuan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Sumber Data	Realisasi Penanaman di wilayah DAS

3. Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO₂e)
Definisi	Gas Rumah Kaca (GRK) Adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu (juta ton CO₂e). Baseline Business as Usual Emisi GRK (Baseline Emisi GRK) adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada Sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (10 Tahun) tanpa intervensi kebijakan dan /atau teknologi mitigasi (juta ton CO₂e). Emisi Aktual / Mitigasi adalah emisi GRK yang terjadi pada tahun berjalan (juta ton CO₂e) Penurunan emisi GRK sektor kehutanan dari skenario Business as Usual (BaU) adalah selisih antara jumlah emisi yang diperkirakan akan terjadi tanpa intervensi kebijakan (BaU) dengan jumlah emisi aktual atau proyeksi dengan intervensi kebijakan dan program mitigasi. Nilai ini dihitung dalam satuan juta ton setara karbon dioksida (juta ton CO₂e).

	Indikator ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor kehutanan dalam pengurangan emisi GRK melalui berbagai upaya seperti perlindungan hutan, reforestasi, pencegahan kebakaran, restorasi gambut, dan implementasi REDD+
Rumus Perhitungan	$\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi BaU} - \text{Emisi Aktual/Mitigasi}$
Interpretasi	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dari <i>Business as Usual</i> (BAU) merupakan indikator yang menunjukkan selisih atau pengurangan jumlah emisi karbon yang berhasil dicapai dibandingkan dengan kondisi normal tanpa adanya intervensi kebijakan atau kegiatan mitigasi (skenario BAU). Nilai penurunan yang tinggi menandakan bahwa upaya pengelolaan hutan berkelanjutan, pencegahan deforestasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta program rehabilitasi dan konservasi hutan berjalan efektif dalam menekan laju emisi. Sebaliknya, nilai penurunan yang rendah atau bahkan tidak signifikan menunjukkan bahwa aktivitas mitigasi belum optimal, dan potensi pelepasan emisi masih mendekati kondisi BAU. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan, serta menggambarkan kontribusi daerah terhadap pencapaian target penurunan emisi nasional sesuai komitmen <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC).
Sumber Data	Peta Citra satelit, Peta tutupan lahan, aktivitas kebakaran hutan dan Lahan, aktifitas pembukaan lahan

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

1 .	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)
	Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi 9 unsur terdiri dari : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana

		7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)																									
	Rumus Perhitungan	1. Menghitung Nilai Persepsi yang terdiri dari 4 kriteria penilaian dengan nilai 1 = Tidak Baik 2 = Kurang Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik 2. Mengolah Data Responden SKM untuk 9 Unsur Pelayanan 3. Menghitung jumlah Nilai masing – masing Unsur Pelayanan IKM Per Unsur = Total Nilai per unsur Jumlah Responden 4. Menghitung Skor Total IKM untuk semua Unsur Skor KM Total = Total Nilai Semua Unsur Jumlah Responden x Jumlah Unsur × 100 4 Hasil Akhir penilaian IKM dituangkan dalam scoring mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																							
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																							
	Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang menilai berbagai aspek pelayanan, seperti kemudahan prosedur, kecepatan, kejelasan informasi,																									

		profesionalitas petugas, serta sarana dan prasarana pelayanan. Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kinerja dan pelayanan perangkat daerah, yang berarti pelayanan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Sebaliknya, nilai IKM yang rendah menandakan adanya ketidakpuasan masyarakat akibat pelayanan yang belum optimal, baik dari sisi kecepatan, kualitas, maupun responsivitas petugas. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat evaluasi penting untuk mengukur efektivitas pelayanan publik, serta mendorong perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
	Sumber Data	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
2	Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)
	Definisi	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Rumus Perhitungan	1. Perencanaan kinerja (bobot 30) 2. Pengukuran kinerja (bobot 25) 3. Pelaporan kinerja (bobot 15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (bobot 10) 5. Capaian Akuntabilitas Kinerja (bobot 20) Kriteria hasil penilaian SAKIP - AA = > 90 – 100 = Sangat Memuaskan - A = > 80 – 90 = Memuaskan - BB = > 70 – 80 = Sangat Baik - B = > 60 – 70 = Baik - CC = > 50 – 60 = Cukup (Memadai) - C = > 30 – 50 = Kurang - D = > 0 – 30 = Sangat Kurang
	Interpretasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai ini biasanya diperoleh melalui hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki perencanaan yang terarah, pelaksanaan program yang efektif, serta pertanggungjawaban kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan adanya

		kelemahan dalam manajemen kinerja, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, kurangnya efisiensi penggunaan anggaran, atau lemahnya sistem pelaporan. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendorong peningkatan kualitas kinerja birokrasi daerah secara berkelanjutan.
	Sumber Data	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim

C. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS

1. Program Pengelolaan Hutan

1.	Nama Indikator	Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) (M ³)
	Definisi	Produksi Hasil Hutan Kayu adalah jumlah volume kayu yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan hutan dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun), baik dari hutan alam maupun hutan tanaman, yang dilakukan sesuai dengan izin pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produksi kayu meliputi hasil yang telah dipanen dan tercatat secara resmi, umumnya dalam bentuk Kayu bulat
	Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu (m³) = HA + HT + Non Kehutanan
	Interpretasi	Indikator <i>Produksi Hasil Hutan Kayu</i> mencerminkan tingkat pemanfaatan sumber daya hutan yang berupa kayu dari kawasan hutan negara maupun hutan hak. Nilai indikator ini dapat memberikan gambaran tentang: 1. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan • Produksi tinggi → menunjukkan tingginya aktivitas pemanenan kayu di suatu wilayah. • Produksi rendah → aktivitas pemanenan rendah atau ketersediaan kayu terbatas. 2. Kondisi dan Ketersediaan Potensi Kayu • Jika tren produksi terus meningkat tanpa pengendalian → berpotensi menyebabkan penurunan stok tegakan (<i>over logging</i>). • Jika tren produksi stabil sesuai rencana kelestarian → menunjukkan pemanenan berkelanjutan.

		3. Efektivitas Pengelolaan Hutan Produksi yang mengikuti RKT/RKU (Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja Usaha) menandakan: • Kepatuhan terhadap prinsip kelestarian • Kelembagaan dan tata kelola pemanfaatan hutan yang baik (<i>good forest governance</i>) 4. Dampak pada Sosial Ekonomi Produksi kayu juga menjadi: • Kontribusi terhadap PAD, PNBP, dan ekonomi masyarakat Indikator perkembangan industri kehutanan
	Sumber Data	SIPUHH Online : Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
2.	Nama Indikator	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Ton)
	Definisi	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah jumlah total hasil hutan yang berasal dari sumber daya hutan selain kayu, yang diproduksi dan/atau dikumpulkan secara legal dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan dalam satu periode tertentu, biasanya dihitung dalam satuan ton per tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi gambaran kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
	Rumus Perhitungan	HHBK (Ton) = Jumlah dari Jenis HHBK
	Interpretasi	Nilai produksi HHBK yang tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan non-kayu telah berjalan produktif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah tanpa mengganggu kelestarian hutan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan pembinaan usaha kehutanan masyarakat, pengembangan kemitraan hutan sosial, dan dukungan terhadap ekonomi hijau. Sebaliknya, produksi HHBK yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan potensi hasil hutan belum optimal, bisa disebabkan oleh kurangnya pembinaan, akses pasar yang terbatas, minimnya inovasi produk, atau belum berkembangnya kelembagaan pengelola HHBK.
	Sumber Data	SIPUHH Online : Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan

3.	Nama Indikator	Jumlah Unit Pengelola Hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan Karbon (Unit)
	Definisi	Indikator ini mengukur jumlah unit pengelola hutan—baik hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi—yang telah melaksanakan kegiatan terkait jasa lingkungan karbon. Kegiatan ini bisa meliputi: • Pengelolaan hutan untuk penyerapan karbon (carbon sequestration), misalnya melalui penanaman pohon, reforestasi, atau rehabilitasi lahan kritis. • Partisipasi dalam skema perdagangan karbon atau program mitigasi perubahan iklim berbasis hutan. • Monitoring dan pelaporan karbon hutan, termasuk penghitungan stok karbon di dalam hutan yang dikelola. Satuan yang digunakan adalah unit, yaitu jumlah pengelola hutan yang melakukan kegiatan tersebut, tanpa memperhitungkan ukuran luas hutan yang dikelola.
	Rumus Perhitungan	Jumlah perizinan yang sudah melakukan persiapan pemanfaatan jasa lingkungan karbon (Unit)
	Interpretasi	• Nilai tinggi menunjukkan bahwa banyak unit pengelola hutan yang aktif berpartisipasi dalam • pengelolaan hutan berbasis jasa lingkungan karbon, mencerminkan kontribusi besar terhadap mitigasi perubahan iklim. • Nilai rendah mengindikasikan adanya potensi peningkatan partisipasi unit pengelola hutan dalam kegiatan karbon atau rendahnya implementasi program terkait
	Sumber Data	RKUPH dan RKT dalam Aplikasi SIPASHUT (Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan) dan Aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)
4.	Nama Indikator	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)
	Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total lahan yang memiliki potensi atau kebutuhan untuk direhabilitasi yang telah berhasil dilakukan tindakan rehabilitasi, dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan program pemulihan lahan dari kerusakan atau degradasi
	Rumus Perhitungan	<i>Persentase Rehabilitasi Lahan =</i>

		$= \frac{\text{Luas Lahan yang dapat di rehabilitasi}}{\text{Luas Arahan RL dalam Rencana Umum RHL (RURHL)}} \times 100\%$
	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya rehabilitasi lahan telah mencapai target terhadap total lahan yang memerlukan atau berpotensi untuk direhabilitasi. • Semakin tinggi persentasenya → berarti program rehabilitasi semakin berhasil dan lahan terdegradasi semakin berkurang. • Semakin rendah persentasenya → menandakan upaya rehabilitasi masih kurang optimal sehingga masih banyak lahan yang belum dipulihkan.
	Sumber Data	1. Arahan Rehabilitasi Lahan dalam rencana Umum RHL DAS (RURHL DAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sasaran meliputi : a. Data lahan kritis dan potensi rehabilitasi b. Lahan potensi Bencana dan potensi rehabilitasi c. Lahan basah, resapan, DTA Danau / Waduk d. DAS Prioritas yang dipulihkan e. Lahan terbuka, pemukiman, perkebunan, pertanian f. Program unggulan, Wisata 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) : a. Data target dan realisasi penanaman pada DAS Prioritas b. Monitoring dan evaluasi (money) kegiatan RHL 3. Peta Tematik & Sistem informasi Geospasial - Citra Satelit (misal : Landsat, Sentinel) untuk verifikasi lahan terdegradasi
5.	Nama Indikator	Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar hutan konservasi (%)
	Definisi	Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar hutan konservasi adalah perbandingan antara luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan dengan total luas kawasan hutan di luar kawasan konservasi, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat degradasi atau kerusakan hutan produksi dan hutan lindung pada tahun berjalan, di luar wilayah yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan konservasi (seperti taman nasional, cagar alam, atau suaka margasatwa).

Rumus Perhitungan	Persentase kerusakan hutan (di luar konservasi) $\frac{\text{Luas Kerusakan Hutan} \times (\text{Deforestasi} + \text{Degradasi})}{\text{Luas Kawasan Hutan Prov. Kaltim}} \times 100$
Interpretasi	• Nilai persentase tinggi (misalnya >30%) → menunjukkan tingkat kerusakan hutan yang signifikan, menandakan lemahnya pengelolaan kawasan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dampaknya dapat berupa penurunan fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana lingkungan (banjir, longsor, kekeringan). • Nilai persentase sedang (10–30%) → menunjukkan adanya tekanan terhadap hutan yang perlu segera ditangani melalui kegiatan rehabilitasi, penegakan hukum, dan perbaikan tata kelola. Nilai persentase rendah (10%) → menunjukkan kondisi kawasan relatif baik atau terjaga, menandakan efektivitas pengawasan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik.
Sumber Data	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1.	Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)
	Definisi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Dinas Kehutanan, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan hasil konservasi di wilayah kerja kehutanan (baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi). Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati telah dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
	Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPK – D) : $IPK_i = (IPA_i \times WIPA) + (IPB_i \times WIPB)$ Keterangan : IPA_i adalah skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i WIPA adalah bobot untuk sub-indeks pengurangan ancaman WIPB adalah bobot untuk sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan WIPA + WIPB = 1.

	Interpretasi	Berdasarkan rentang nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, nilai 0,00–0,25 dikategorikan 'kurang, yang berarti pengelolaan keanekaragaman hayati belum berjalan efektif dan masih memerlukan perencanaan serta pelaksanaan yang lebih kuat. Nilai >0,25–0,50 menunjukkan kategori cukup, di mana upaya pengelolaan telah dilakukan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam aspek pelaksanaan serta pemantauan. Sementara itu, nilai >0,50–0,75 termasuk kategori baik, yang menandakan pengelolaan keanekaragaman hayati telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam efektivitas hasil dan keberlanjutan kegiatan. Adapun nilai >0,75–1,00 dikategorikan sangat baik, menunjukkan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati telah dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap kelestarian ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
	Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2.	Nama Indikator	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)
	Definisi	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha) adalah luas wilayah dengan fungsi ekologis tinggi yang berperan sebagai penyangga kawasan konservasi atau kawasan suaka alam (KSA/KPA), serta memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya air, dan keseimbangan ekosistem, yang telah dikelola secara aktif oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan. Kawasan bernilai ekosistem penting dapat meliputi ekosistem hutan mangrove, gambut, karst, sempadan sungai, hutan lindung, atau area koridor satwa liar yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi utama. Pengelolaan yang dimaksud mencakup perencanaan, perlindungan, rehabilitasi, pemantauan, dan kemitraan konservasi dengan masyarakat atau lembaga lain. Satuan pengukuran yang digunakan adalah hektar (Ha).
	Rumus Perhitungan	<i>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP), daerah penyangga di KSA/KPA dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha) = Luas KBEP + Luas Daerah Penyangga di KSA/KPA + Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Provinsi.</i>

Interpretasi	Semakin luas kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga yang berhasil dikelola, semakin baik pula kinerja pengelolaan lingkungan dan konservasi daerah. Luas pengelolaan yang besar menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjaga fungsi ekologis, mencegah degradasi lingkungan, dan melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan konservasi. Sebaliknya, luas yang kecil menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting masih terbatas, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan habitat, penurunan kualitas lingkungan, serta melemahnya fungsi penyangga terhadap kawasan konservasi. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran penting bagi Dinas Kehutanan dalam menilai efektivitas pengelolaan ekosistem strategis dan peran daerah dalam mendukung keberlanjutan kawasan konservasi di tingkat provinsi.
Sumber Data	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Nama Indikator	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)
Definisi	Total area Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub-DAS yang menjadi objek intervensi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah atau lembaga terkait, melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi, perlindungan sumber daya air, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$\text{Luas Das Sub Das yang dikelola} =$ $= \text{Luas Das Tahun sebelumnya} + \text{Luas DAS yang dikelola Tahun Berjalan}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan seberapa besar cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub-DAS yang telah mendapatkan intervensi pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan total kebutuhan pengelolaan di wilayah tersebut. • Semakin besar luas DAS/Sub-DAS yang dikelola → menunjukkan peningkatan upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem • kualitas tata air dan fungsi lingkungan semakin terjaga risiko kerusakan lingkungan (banjir, erosi, sedimentasi) dapat berkurang
Sumber Data	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ○ Data penetapan dan pembinaan DAS nasional ○ Data program dan realisasi pengelolaan DAS

		○ Sistem Informasi Pengelolaan DAS 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) ○ Data cakupan wilayah intervensi DAS/Sub-DAS ○ Laporan pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air ○ Monitoring dan Evaluasi program Das Prioritas
2.	Nama Indikator	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)
	Definisi	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai adalah ukuran yang menunjukkan proporsi luas kawasan sempadan sungai yang memiliki tutupan lahan bervegetasi atau berfungsi ekologis, dibandingkan dengan total luas sempadan sungai yang seharusnya dilindungi sesuai ketentuan. Indikator ini menilai kondisi perlindungan dan kelestarian wilayah sempadan sungai, yang berperan sebagai: ● Sabuk hijau pelindung sungai ● Pengendali erosi dan sedimentasi ● Pelindung Kualitas air & habitat ekosistem perairan
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Target per Tahun}}{\text{Sempadan sungai prov kaltim Clear \& Clean}} \times 100\% =$ = Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai
	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan seberapa baik kondisi perlindungan ekosistem sempadan sungai melalui keberadaan tutupan lahan yang vegetatif dan berfungsi ekologis. ● Persentase tinggi → sempadan sungai lebih sehat, terjaga dari erosi dan pencemaran ● Persentase rendah → sempadan sungai terdegradasi, rawan longsor, banjir, dan penurunan kualitas air Dengan kata lain, semakin besar nilai indikator, semakin baik kondisi ketahanan dan keberlanjutan fungsi sungai.
	Sumber Data	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Peta Kawasan Hutan Prov. Kaltim - Peta Tutupan Lahan Nasional - Data dan Peta Pemukiman - Data Kondisi sempadan sungai pada program pengelolaan DAS - Data Perizinan - Data Wil. Administrasi Kaltim

	2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
	- Peta dasar dan batas sempadan sungai
	- Dokumen penetapan wilayah sempadan dalam SIG

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

1.	Nama Indikator	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)
	Definisi	Indikator ini mengukur nilai ekonomi total (dalam miliar rupiah) dari transaksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial. Transaksi ini mencakup kegiatan ekonomi yang berasal dari: • Pemanfaatan hasil hutan (kayu, rotan, buah, madu, jamur, dll.) secara berkelanjutan. • Jasa lingkungan yang dijual, misalnya karbon atau ekowisata. • Produk olahan non-kayu (HHBK: Hasil Hutan Bukan Kayu) yang dikelola oleh masyarakat. Satuan yang digunakan adalah miliar rupiah, merepresentasikan nilai moneter dari semua kegiatan ekonomi kelompok masyarakat kehutanan dalam periode tertentu.
	Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Ekonomi = Harga per Unit (P) × Jumlah Unit yang Ditransaksikan (Q) Keterangan: Harga per Unit (P) = harga jual atau harga pasar produk. Jumlah Unit (Q) = volume penjualan atau jumlah barang/jasa yang ditransaksikan.
	Interpretasi	• Nilai tinggi: Menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kehutanan berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi hutan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan lokal dan kontribusi terhadap ekonomi hijau. • Nilai rendah: Mengindikasikan pemanfaatan hutan oleh masyarakat belum optimal, adanya kendala akses pasar, kapasitas produksi rendah, atau program perhutanan sosial belum efektif.
	Sumber Data	Aplikasi GoKUPS dan Aplikasi Sistem informasi Penyuluhan (Simluh)
2.	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)

	Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan kelas atau level kemampuan dan kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan kelembagaan, Kawasan dan usaha pada suatu kondisi KTH dalam periode tertentu. • Kelas KTH biasanya ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja, misalnya: kemampuan pengelolaan hutan, kapasitas produksi, penerapan prinsip kehutanan berkelanjutan, dan kemampuan organisasi kelompok. • Peningkatan kelas berarti KTH berhasil naik ke kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. (Pemula ke Madya, Madya ke Utama) • Satuan yang digunakan adalah persentase (%), yaitu jumlah KTH yang mengalami peningkatan kelas dibanding total KTH yang dinilai.
	Rumus Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Kelas KTH</i> $= \frac{\text{Jumlah UPTD Lingkup Dishut}}{\text{Jumlah KTH 311 (Thn 2024)}} \times 100$
	Interpretasi	• Persentase tinggi: Menunjukkan bahwa banyak KTH yang berkembang dalam kapasitas dan kinerjanya, baik dari sisi pengelolaan hutan, produktivitas, maupun manajemen kelompok. • Persentase rendah: Mengindikasikan bahwa perbaikan kinerja KTH masih lambat, mungkin karena keterbatasan pelatihan, dukungan teknis, atau akses sumber daya.
	Sumber Data	Dokumen form hasil penilaian peningkatan kelas KTH
3.	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
	Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan kelas atau tingkat kinerja kelompok usaha yang tergabung dalam program Perhutanan Sosial dalam periode tertentu. • Kelas KUPS biasanya ditentukan berdasarkan penilaian kinerja usaha, meliputi: ◦ Kapasitas produksi dan pengelolaan usaha berbasis hutan. ◦ Penerapan prinsip kehutanan berkelanjutan. ◦ Manajemen keuangan, pemasaran, dan organisasi kelompok.

		Peningkatan kelas berarti kelompok usaha berhasil naik ke level kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (Kelas Blue – Silver – Gold dan Platinum).
	Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kelas KUPS} = \frac{\text{Jumlah UPTD Lingkup Dishut}}{\text{Jumlah KUPS 267 (Thn 2024)}} \times 100$
	Interpretasi	- Persentase tinggi: Menunjukkan bahwa banyak KUPS yang berkembang secara usaha dan manajemen, mencerminkan keberhasilan pembinaan dan dukungan sosial. - Persentase rendah: Menandakan kemajuan usaha KUPS masih terbatas, mungkin karena kendala teknis, akses modal, pasar, atau kapasitas internal kelompok.
	Sumber Data	Dokumen form hasil penilaian peningkatan kelas KUPS
4.	Nama Indikator	Luas kawasan yang dikelola Masyarakat (Ha)
	Definisi	Indikator ini mengukur total luas wilayah hutan atau lahan yang dikelola langsung oleh masyarakat, baik melalui program Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan, atau skema lain yang memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat. - Kawasan yang dikelola masyarakat dapat mencakup: - Hutan kemasyarakatan (HKm). - Hutan desa (HD). - Hutan tanaman rakyat (HTR). - Hutan Adat (HA) - Kemitraan Kehutanan - Fokusnya adalah luas fisik areal pengajuan persetujuan PS oleh kelompok Masyarakat yang berada di dalam Kawasan hutan, bukan luas hutan secara keseluruhan.
	Rumus Perhitungan	Jumlah total keseluruhan luasan areal usulan pengajuan PS oleh kelompok Masyarakat di dalam Kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)
	Interpretasi	Luas besar: Menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan.

		• Luas kecil: Mengindikasikan keterlibatan masyarakat yang terbatas, atau masih banyak kawasan yang dikelola oleh pihak lain (pemerintah/swasta).
	Sumber Data	Dokumen Proposal usulan pengajuan PS (HKm, HD, HTR, HA dan KK) dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Kepala,



Ir. H. Joko Istanto, S.P., M. Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197508072000031003

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Program Pengelolaan Hutan

1.	Nama Indikator	Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) (M ³)
	Definisi	Produksi Hasil Hutan Kayu adalah jumlah volume kayu yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan hutan dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun), baik dari hutan alam maupun hutan tanaman, yang dilakukan sesuai dengan izin pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produksi kayu meliputi hasil yang telah dipanen dan tercatat secara resmi, umumnya dalam bentuk Kayu bulat
	Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu (m³) = HA + HT + Non Kehutanan
	Cara Perhitungan	Realisasi Produksi Kayu dari Ijin PBPH Hutan Alam + Realisasi Produksi Kayu dari Ijin PBPH Hutan Tanaman + Realisasi Produksi Kayu dari Ijin Non Kehutanan
	Interpretasi	Indikator <i>Produksi Hasil Hutan Kayu</i> mencerminkan tingkat pemanfaatan sumber daya hutan yang berupa kayu dari kawasan hutan negara maupun hutan hak. Nilai indikator ini dapat memberikan gambaran tentang: 1. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan • Produksi tinggi → menunjukkan tingginya aktivitas pemanenan kayu di suatu wilayah. • Produksi rendah → aktivitas pemanenan rendah atau ketersediaan kayu terbatas. 2. Kondisi dan Ketersediaan Potensi Kayu • Jika tren produksi terus meningkat tanpa pengendalian → berpotensi menyebabkan penurunan stok tegakan (<i>over logging</i>).

		• Jika tren produksi stabil sesuai rencana kelestarian → menunjukkan pemanenan berkelanjutan. 3. Efektivitas Pengelolaan Hutan Produksi yang mengikuti RKT/RKU (Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja Usaha) menandakan: • Kepatuhan terhadap prinsip kelestarian • Kelembagaan dan tata kelola pemanfaatan hutan yang baik (<i>good forest governance</i>) 4. Dampak pada Sosial Ekonomi Produksi kayu juga menjadi: • Kontribusi terhadap PAD, PNPB, dan ekonomi masyarakat • Indikator perkembangan industri kehutanan
	Sumber Data	SIPUHH Online : Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
2.	Nama Indikator	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Ton)
	Definisi	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah jumlah total hasil hutan yang berasal dari sumber daya hutan selain kayu, yang diproduksi dan/atau dikumpulkan secara legal dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan dalam satu periode tertentu, biasanya dihitung dalam satuan ton per tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi gambaran kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
	Rumus Perhitungan	HHBK (Ton) = Jumlah dari Jenis HHBK
	Cara Perhitungan	Jumlah HHBK didapat dari jumlah realisasi seluruh jenis HHBK pada Aplikasi SIPUHH
	Interpretasi	Nilai produksi HHBK yang tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan non-kayu telah berjalan produktif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah tanpa mengganggu kelestarian hutan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan pembinaan usaha kehutanan masyarakat, pengembangan

		kemitraan hutan sosial, dan dukungan terhadap ekonomi hijau. Sebaliknya, produksi HHBK yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan potensi hasil hutan belum optimal, bisa disebabkan oleh kurangnya pembinaan, akses pasar yang terbatas, minimnya inovasi produk, atau belum berkembangnya kelembagaan pengelola HHBK.
	Sumber Data	SIPUHH Online : Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
3.	Nama Indikator	Jumlah Unit Pengelola Hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan Karbon (Unit)
	Definisi	Indikator ini mengukur jumlah unit pengelola hutan—baik hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi—yang telah melaksanakan kegiatan terkait jasa lingkungan karbon. Kegiatan ini bisa meliputi: • Pengelolaan hutan untuk penyerapan karbon (carbon sequestration), misalnya melalui penanaman pohon, reforestasi, atau rehabilitasi lahan kritis. • Partisipasi dalam skema perdagangan karbon atau program mitigasi perubahan iklim berbasis hutan. • Monitoring dan pelaporan karbon hutan, termasuk penghitungan stok karbon di dalam hutan yang dikelola. Satuan yang digunakan adalah unit, yaitu jumlah pengelola hutan yang melakukan kegiatan tersebut, tanpa memperhitungkan ukuran luas hutan yang dikelola.
	Rumus Perhitungan	Jumlah perizinan yang sudah melakukan persiapan pemanfaatan jasa lingkungan karbon (Unit)
	Cara Perhitungan	Identifikasi berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) / Rencana Kerja Tahunan (RKT)
	Interpretasi	• Nilai tinggi menunjukkan bahwa banyak unit pengelola hutan yang aktif berpartisipasi dalam • pengelolaan hutan berbasis jasa lingkungan karbon, mencerminkan kontribusi besar terhadap mitigasi perubahan iklim.

		• Nilai rendah mengindikasikan adanya potensi peningkatan partisipasi unit pengelola hutan dalam kegiatan karbon atau rendahnya implementasi program terkait.
	Sumber Data	RKUPH dan RKT dalam Aplikasi SIPASHUT (Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan) dan Aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)

- a. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)	6.293.432,95	6.346.336,31	6.402.024,00	6.461.888,27	6.525.929.11	6.594.146.54	6.665.844,44
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.545	1.595	1.645	1.695	1.745	1.795	1.845
	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	1	2	3	4	5	6	7

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan



Susilo Pranoto, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197404141998031007

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Program Pengelolaan Hutan

1.	Nama Indikator	persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)
	Definisi	Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar hutan konservasi adalah perbandingan antara luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan dengan total luas kawasan hutan di luar kawasan konservasi, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat degradasi atau kerusakan hutan produksi dan hutan lindung pada tahun berjalan, di luar wilayah yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan konservasi (seperti taman nasional, cagar alam, atau suaka margasatwa).
	Rumus Perhitungan	Persentase kerusakan hutan (di luar konservasi) $\text{Luas Kerusakan Hutan} \frac{(\text{Deforestasi} + \text{Degradasi})}{\text{Luas Kawasan Hutan Prov. Kaltim}} \times 100$
	Cara Perhitungan	$\text{Kerusakan Tahun 2024 (Baseline)} = \frac{39.072,37}{7.592.618,58} \times 100 = 0,51\%$
	Interpretasi	• Nilai persentase tinggi (misalnya >30%) → menunjukkan tingkat kerusakan hutan yang signifikan, menandakan lemahnya pengelolaan kawasan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dampaknya dapat berupa penurunan fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana lingkungan (banjir, longsor, kekeringan). • Nilai persentase sedang (10–30%) → menunjukkan adanya tekanan terhadap hutan yang perlu segera ditangani melalui kegiatan rehabilitasi, penegakan hukum, dan perbaikan tata kelola. • Nilai persentase rendah (10%) → menunjukkan kondisi kawasan relatif baik atau terjaga, menandakan efektivitas pengawasan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik.
	Sumber Data	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

- a. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan Hutan	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

- b. Pembagian Target Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar hutan konservasi (%) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongoran	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	0,51	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1.	Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)
	Definisi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Dinas Kehutanan, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan hasil konservasi di wilayah kerja kehutanan (baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi). Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati telah dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
	Rumus Perhitungan	<i>Perhitungan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPK – D) :</i> $IPK_i = (IPA_i \times WIPA) + (IPB_i \times WIPB)$ Keterangan : IPA_i adalah skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i WIPA adalah bobot untuk sub-indeks pengurangan ancaman WIPB adalah bobot untuk sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan WIPA + WIPB = 1.
	Cara Perhitungan	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPK-D) dihitung dengan rumus $IPK_i = (IPA_i \times WIPA) + (IPB_i \times WIPB)$, di mana IPA_i merupakan skor sub-indeks pengurangan ancaman, IPB_i adalah skor sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan, WIPA dan WIPB adalah bobot masing-masing sub-indeks dengan total bobot WIPA + WIPB = 1. Dengan asumsi bobot WIPA = 0,6 dan WIPB = 0,4, serta nilai IPA_i = 0,55 dan IPB_i = 0,50, diperoleh hasil perhitungan $IPK_i = (0,55 \times 0,6) + (0,50 \times 0,4) = 0,333 + 0,20 = 0,533$ (Tahun 2025)
	Interpretasi	Berdasarkan rentang nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, nilai 0,00–0,25 dikategorikan kurang, yang berarti pengelolaan keanekaragaman hayati belum berjalan efektif dan masih memerlukan perencanaan serta pelaksanaan yang lebih kuat. Nilai >0,25–0,50 menunjukkan kategori cukup, di mana upaya pengelolaan telah dilakukan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam aspek pelaksanaan serta pemantauan. Sementara itu, nilai >0,50–0,75 termasuk kategori baik, yang menandakan pengelolaan keanekaragaman hayati telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam efektivitas hasil dan keberlanjutan kegiatan. Adapun nilai >0,75–1,00 dikategorikan sangat baik, menunjukkan bahwa

		pengelolaan keanekaragaman hayati telah dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap kelestarian ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
	Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2.	Nama Indikator	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)
	Definisi	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha) adalah luas wilayah dengan fungsi ekologis tinggi yang berperan sebagai penyangga kawasan konservasi atau kawasan suaka alam (KSA/KPA), serta memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya air, dan keseimbangan ekosistem, yang telah dikelola secara aktif oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan. Kawasan bernilai ekosistem penting dapat meliputi ekosistem hutan mangrove, gambut, karst, sempadan sungai, hutan lindung, atau area koridor satwa liar yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi utama. Pengelolaan yang dimaksud mencakup perencanaan, perlindungan, rehabilitasi, pemantauan, dan kemitraan konservasi dengan masyarakat atau lembaga lain. Satuan pengukuran yang digunakan adalah hektar (Ha).
	Rumus Perhitungan	<i>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP), daerah penyangga di KSA/KPA dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha) = Luas KBEP + Luas Daerah Penyangga di KSA/KPA + Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Provinsi.</i>
	Cara Perhitungan	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP), daerah penyangga di KSA/KPA dan Konservasi Provinsi yang dikelola dihitung dengan menggunakan rumus penjumlahan luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KEE Wehea Kelay dan KEE Mesangat Suwi) ditambah luas Daerah Penyangga di KSA/KPA yang telah diidentifikasi ditambah luas Tahura Bukit Soeharto, yang ditambahkan secara kumulatif setiap tahunnya.
	Interpretasi	Semakin luas kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga yang berhasil dikelola, semakin baik pula kinerja pengelolaan lingkungan dan konservasi daerah. Luas pengelolaan yang besar menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjaga fungsi ekologis, mencegah degradasi lingkungan, dan melestarikan

		keanekaragaman hayati di sekitar kawasan konservasi. Sebaliknya, luas yang kecil menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting masih terbatas, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan habitat, penurunan kualitas lingkungan, serta melemahnya fungsi penyangga terhadap kawasan konservasi. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran penting bagi Dinas Kehutanan dalam menilai efektivitas pengelolaan ekosistem strategis dan peran daerah dalam mendukung keberlanjutan kawasan konservasi di tingkat provinsi.
	Sumber Data	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

- a. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	0,533	0.540	0.547	0,555	0,568	0,572
		Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	122.579	88.617	95.337	109.140	115.860	122.580	132.580

- b. Pembagian Target Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Indeks)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	N/A	0,533	0.540	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongoran	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	N/A	N/A	N/A	0.547	0,555	0,568	0,572

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Indeks)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	N/A	N/A	0,54 0	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	N/A	N/A	0,54 0	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	N/A	N/A	0,54 0	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	N/A	N/A	N/A	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	N/A	N/A	0,54 0	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	N/A	N/A	0,54 0	0,54 7	0,55 5	0,568	0,572

- c. Pembagian Target Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola ke Dinas dan UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Ha)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	122.579	88.617	95.337	109.140	115.860	122.580	132.580
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	64.814	64.814	64.814	64.814	64.814	64.814	64.814



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196811061990101001

**METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
 BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN
 LAHAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Program Pengelolaan Hutan

1.	Nama Indikator	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)
	Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total lahan yang memiliki potensi atau kebutuhan untuk direhabilitasi yang telah berhasil dilakukan tindakan rehabilitasi, dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan program pemulihan lahan dari kerusakan atau degradasi
	Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Rehabilitasi Lahan} = \frac{\text{Luas Lahan yang dapat di rehabilitasi}}{\text{Luas Arahlan RL dalam Rencana Umum RHL (RURHL)}} \times 100\%$
	Cara Perhitungan	$0,47 \% = \frac{1.200 \text{ Ha}}{253.570,91 \text{ Ha}} \times 100\%$
	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya rehabilitasi lahan telah mencapai target terhadap total lahan yang memerlukan atau berpotensi untuk direhabilitasi. • Semakin tinggi persentasenya → berarti program rehabilitasi semakin berhasil dan lahan terdegradasi semakin berkurang. • Semakin rendah persentasenya → menandakan upaya rehabilitasi masih kurang optimal sehingga masih banyak lahan yang belum dipulihkan.
	Sumber Data	1. Arahlan Rehabilitasi Lahan dalam Rencana Umum RHL DAS (RURHL DAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sasaran meliputi : a. Data lahan kritis dan potensi rehabilitasi b. Lahan potensi Bencana dan pasca bencana c. Lahan basah, resapan, DTA Danau/waduk d. DAS Prioritas yang dipulihkan e. Lahan terbuka, pemukiman, perkebunan, pertanian f. Program unggulan, wisata. 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) :

		a. Data target dan realisasi penanaman pada DAS prioritas b. Monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan RHL 3. Peta Tematik & Sistem Informasi Geospasial - Citra satelit (misal: Landsat, Sentinel) untuk verifikasi lahan terdegradasi
--	--	---

b. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan Hutan	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	3,5	3,98	4,45	4,92	5,4	5,87	6,34

c. Pembagian Target Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (%)						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	0,32	0,359	0,399	0,438	0,478	0,517	0,557	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	0,160	0,184	0,207	0,231	0,255	0,278	0,302	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	0,160	0,184	0,207	0,231	0,255	0,278	0,302	
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	0,160	0,184	0,207	0,231	0,255	0,278	0,302	
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	0,150	0,172	0,193	0,215	0,237	0,258	0,280	
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	0,160	0,184	0,207	0,231	0,255	0,278	0,302	
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290	

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	0,160	0,182	0,203	0,225	0,247	0,268	0,290
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	0,160	0,184	0,207	0,231	0,255	0,278	0,302
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	0,160	0,172	0,184	0,195	0,207	0,219	0,231
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	0,150	0,172	0,193	0,215	0,237	0,258	0,280
	Jumlah Kumulatif	3,50	3,98	4,45	4,92	5,4	5,87	6,34

2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)

1.	Nama Indikator	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)
	Definisi	Total area Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub-DAS yang menjadi objek intervensi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah atau lembaga terkait, melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi, perlindungan sumber daya air, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan seberapa besar cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub-DAS yang telah mendapatkan intervensi pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan total kebutuhan pengelolaan di wilayah tersebut. • Semakin besar luas DAS/Sub-DAS yang dikelola → menunjukkan peningkatan upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem • kualitas tata air dan fungsi lingkungan semakin terjaga • risiko kerusakan lingkungan (banjir, erosi, sedimentasi) dapat berkurang
	Rumus Perhitungan	Luas DAS / Sub DAS yang dikelola = Luas DAS Tahun sebelumnya + Luas DAS yang dikelola Tahun berjalan
	Cara Perhitungan	Luas DAS / Sub DAS (Base Line) + Luas DAS / Sub DAS (Tahun n)
	Sumber Data	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ○ Data penetapan dan pembinaan DAS nasional ○ Data program dan realisasi pengelolaan DAS ○ Sistem Informasi Pengelolaan DAS 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)

		○ Data cakupan wilayah intervensi DAS/Sub-DAS ○ Laporan pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air ○ Monitoring dan evaluasi program DAS prioritas
2.	Nama Indikator	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Ha)
	Definisi	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai adalah ukuran yang menunjukkan proporsi luas kawasan sempadan sungai yang memiliki tutupan lahan bervegetasi atau berfungsi ekologis, dibandingkan dengan total luas sempadan sungai yang seharusnya dilindungi sesuai ketentuan. Indikator ini menilai kondisi perlindungan dan kelestarian wilayah sempadan sungai, yang berperan sebagai: ● Sabuk hijau pelindung sungai ● Pengendali erosi dan sedimentasi ● Pelindung kualitas air & habitat ekosistem perairan
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Target per Tahun}}{\text{Sempadan sungai prov Kaltim Clear \& Clean}} \times 100 \% = \text{Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai}$
	Cara Perhitungan	$\frac{150 \text{ Ha}}{64.300,35 \text{ Ha}} \times 100 \% = 0,23 \%$
	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan seberapa baik kondisi perlindungan ekosistem sempadan sungai melalui keberadaan tutupan lahan yang vegetatif dan berfungsi ekologis. ● Persentase tinggi → sempadan sungai lebih sehat, terjaga dari erosi dan pencemaran ● Persentase rendah → sempadan sungai terdegradasi, rawan longsor, banjir, dan penurunan kualitas air Dengan kata lain, semakin besar nilai indikator, semakin baik kondisi ketahanan dan keberlanjutan fungsi sungai.
	Sumber Data	Sumber Data Utama 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ○ Peta Kawasan Hutan Prov. Kaltim. ○ Peta Tutupan Lahan Nasional ○ Data dan peta pemukiman

		- o Data kondisi sempadan sungai pada program pengelolaan DAS - o Data Perizinan - o Data Wil. Administrasi Kaltim 2. Badan Informasi Geospasial (BIG) - o Peta dasar dan batas sempadan sungai - o Dokumen penetapan wilayah sempadan dalam SIG

- a. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104,00	206.440	544.821	903.227	1.007.608	1.200.795	1.210.398
		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	64,955	64,955	65,037	65,118	65,200	65,282	65,364

- b. Pembagian Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai ke Dinas dan UPTD KPHP/HL sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	64.955	64,955	65,037	65,118	65,200	65,282	65,364
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	64.955	64.955	64.959	64.962	64.966	64.970	64.974

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Dan Rehabilitasi
Hutan Dan Lahan



Apriansyah, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197504202000031004

Handwritten signature/initials

**METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
 BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

1.	Nama Indikator	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)
	Definisi	Indikator ini mengukur nilai ekonomi total (dalam miliar rupiah) dari transaksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial. Transaksi ini mencakup kegiatan ekonomi yang berasal dari: • Pemanfaatan hasil hutan (kayu, rotan, buah, madu, jamur, dll.) secara berkelanjutan. • Jasa lingkungan yang dijual, misalnya karbon atau ekowisata. • Produk olahan non-kayu (HHBK: Hasil Hutan Bukan Kayu) yang dikelola oleh masyarakat. Satuan yang digunakan adalah miliar rupiah, merepresentasikan nilai moneter dari semua kegiatan ekonomi kelompok masyarakat kehutanan dalam periode tertentu.
	Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Ekonomi = Harga per Unit (P) × Jumlah Unit yang Ditransaksikan (Q) Keterangan: Harga per Unit (P) = harga jual atau harga pasar produk. Jumlah Unit (Q) = volume penjualan atau jumlah barang/jasa yang ditransaksikan.
	Cara Perhitungan	Total NTE kelompok Masyarakat A + Total NTE kelompok Masyarakat B + Total NTE kelompok Masyarakat C + = Rp. 3.000.000.000
	Interpretasi	• Nilai tinggi: Menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kehutanan berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi hutan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan lokal dan kontribusi

		terhadap ekonomi hijau. • Nilai rendah: Mengindikasikan pemanfaatan hutan oleh masyarakat belum optimal, adanya kendala akses pasar, kapasitas produksi rendah, atau program perhutanan sosial belum efektif.
	Sumber Data	Aplikasi GoKUPS dan Aplikasi Sistem informasi Penyuluhan (Simluh)
2.	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)
	Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan kelas atau level kemampuan dan kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan kelembagaan, Kawasan dan usaha pada suatu kondisi KTH dalam periode tertentu. • Kelas KTH biasanya ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja, misalnya: kemampuan pengelolaan hutan, kapasitas produksi, penerapan prinsip kehutanan berkelanjutan, dan kemampuan organisasi kelompok. • Peningkatan kelas berarti KTH berhasil naik ke kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. (Pemula ke Madya, Madya ke Utama) • Satuan yang digunakan adalah persentase (%), yaitu jumlah KTH yang mengalami peningkatan kelas dibanding total KTH yang dinilai.
	Rumus Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Kelas KTH</i> $= \frac{\text{Jumlah UPTD Lingkup Dishut}}{\text{Jumlah KTH 311 (Thn 2024)}} \times 100$
	Cara Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Kelas KTH</i> = $\frac{20}{311} \times 100 = 6$ <i>Pembagian Target Ke UPTD</i> = $\frac{6}{20} \times 100 = 0,3$
	Interpretasi	• Persentase tinggi: Menunjukkan bahwa banyak KTH yang berkembang dalam kapasitas dan kinerjanya, baik dari sisi pengelolaan hutan, produktivitas, maupun manajemen kelompok. • Persentase rendah: Mengindikasikan bahwa perbaikan

		kinerja KTH masih lambat, mungkin karena keterbatasan pelatihan, dukungan teknis, atau akses sumber daya.
	Sumber Data	Dokumen form hasil penilaian peningkatan kelas KTH
3.	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)
	Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan kelas atau tingkat kinerja kelompok usaha yang tergabung dalam program Perhutanan Sosial dalam periode tertentu. - Kelas KUPS biasanya ditentukan berdasarkan penilaian kinerja usaha, meliputi: - Kapasitas produksi dan pengelolaan usaha berbasis hutan. - Penerapan prinsip kehutanan berkelanjutan. - Manajemen keuangan, pemasaran, dan organisasi kelompok. - Peningkatan kelas berarti kelompok usaha berhasil naik ke level kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (Kelas Blue – Silver – Gold dan Platinum).
	Rumus Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Kelas KUPS</i> $= \frac{\text{Jumlah UPTD Lingkup Dishut}}{\text{Jumlah KUPS 267 (Thn 2024)}} \times 100$
	Cara Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Kelas KUPS</i> = $\frac{19}{267} \times 100 = 10 \%$ <i>Pembagian Target Ke UPTD</i> = $\frac{10}{19} \times 100 = 0,53$
	Interpretasi	- Persentase tinggi: Menunjukkan bahwa banyak KUPS yang berkembang secara usaha dan manajemen, mencerminkan keberhasilan pembinaan dan dukungan perhutanan sosial. - Persentase rendah: Menandakan kemajuan usaha

		KUPS masih terbatas, mungkin karena kendala teknis, akses modal, pasar, atau kapasitas internal kelompok.
	Sumber Data	Dokumen form hasil penilaian peningkatan kelas KUPS
4.	Nama Indikator	Luas kawasan yang dikelola Masyarakat (Ha)
	Definisi	Indikator ini mengukur total luas wilayah hutan atau lahan yang dikelola langsung oleh masyarakat, baik melalui program Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan, atau skema lain yang memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat. • Kawasan yang dikelola masyarakat dapat mencakup: ◦ Hutan kemasyarakatan (HKm). ◦ Hutan desa (HD). ◦ Hutan tanaman rakyat (HTR). ◦ Hutan Adat (HA) ◦ Kemitraan Kehutanan • Fokusnya adalah luas fisik areal pengajuan persetujuan PS oleh kelompok Masyarakat yang berada di dalam Kawasan hutan, bukan luas hutan secara keseluruhan.
	Rumus Perhitungan	Jumlah total keseluruhan luasan areal usulan pengajuan PS oleh kelompok Masyarakat di dalam Kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)
	Cara Perhitungan	Luas usulan pengajuan PS Kelompok Masyarakat A + Luas usulan pengajuan PS Kelompok Masyarakat B + Luas usulan pengajuan PS Kelompok Masyarakat C + = 20.000 Ha
	Interpretasi	• Luas besar: Menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan. • Luas kecil: Mengindikasikan keterlibatan masyarakat

		yang terbatas, atau masih banyak kawasan yang dikelola oleh pihak lain (pemerintah/swasta).
	Sumber Data	Dokumen Proposal usulan pengajuan PS (HKm, HD, HTR, HA dan KK) dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

- a. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh target capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Program Prioritas	Outcome / Output	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1,50	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	6	6	6	6	6	6
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10	10	10	10	10	10	10
		Luas kawasan yang dikelola Masyarakat	330.184	350.184	370.184	380.184	390.184	400.184	410.184

- b. Pembagian Target Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Milyar Rupiah)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	1,50	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	N/A	0,03	0,03	0,03	0,03	0,08	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	N/A	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	N/A	0,05	0,05	0,05	0,08	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	N/A	0,03	0,03	0,03	0,03	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,23
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	N/A	0,455	0,5	0,505	0,505	0,505	0,545
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Milyar Rupiah)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	N/A	0	0,05	0,05	0,08	0,08	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	N/A	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	N/A	0,2	0,205	0,3	0,35	0,35	0,4
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	N/A	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	N/A	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	N/A	0,5	0,6	0,65	0,65	0,65	0,7
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	N/A	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	N/A	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	N/A	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	N/A	0	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	N/A	0	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1

c. Pembagian Target Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	1	6	6	6	6	6	6
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Socharto	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baselin e	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

- d. Pembagian Target Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baselin e	Target (%)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	10	10	10	10	10	10	10
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	N/A	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

- e. Pembagian Target Luas kawasan yang dikelola Masyarakat (Ha) ke Dinas dan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai berikut

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baselin e	Target (Ha)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	330.184	350.184	370.184	380.184	390.184	400.184	410.184
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	N/A	10	10	10	10	10	10

Kode Rekening	Dinas Kehutanan dan UPTD	Baseline	Target (Ha)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	N/A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon	N/A	500	500	200	200	200	200
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	N/A	50	50	20	20	20	20
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	N/A	2.000	2.000	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	N/A	100	100	100	100	100	100
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	N/A	630	630	630	630	630	630
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	N/A	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	N/A	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	N/A	1.000	1.000	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	N/A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	N/A	500	500	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	N/A	300	300	300	300	300	300
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	N/A	1.500	1.500	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	N/A	500	500	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	N/A	200	200	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	N/A	2.000	2.000	500	500	500	500
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	N/A	100	100	100	100	100	100
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	N/A	50	50	50	50	50	50
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	N/A	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Kepala Bidang Penyuluhan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Hutan

M Gozali Rahman, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196910071989021001



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.173 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan memberikan landasan Penentuan Program dan Kegiatan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menciptakan Pengelolaan Hutan sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur demi menciptakan Kalimantan Timur yang sejahtera dan berkeadilan;
 - c. bahwa sesuai sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Hutan yang lestari;
 - d. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 perlu ditunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RESTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. menyusun sasaran serta tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
 - c. mengkaji seluruh Peraturan, pedoman dan petunjuk serta Dokumen lainnya yang terkait dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
 - d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
 - e. melakukan Diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan untuk Penyempurnaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
 - f. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan perubahannya jika diperlukan.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 4 Mei 2025 ditetapkan.

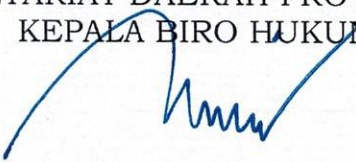
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.173/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

Pengarah	: Gubernur Kalimantan Timur
Penanggung Jawab	: Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Ketua	: Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Bidang Perkonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 7. Perencana Ahli Muda Bidang Perkonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 9. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 10. Meni Hendrawati, S.Hut, M.P (Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) 11. Sugiyono, S.Hut, M.P (Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) 12. Rahim, S.Hut, M.P (Polisi Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) 13. Rahmadi, S.Sos, M.M (Polisi Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) 14. Aswadiansyah, S.Sos (Polisi Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

15. Jumain, S.Hut, M.Si (Polisi Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)
16. Adi Supriadi, S.Hut. M.Si (Tenaga Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup Politeknik Pertanian Negeri Samarinda)
17. Lenny Christy, S.Kom, M.Si (Mitra Pembangunan GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
18. Dzulkifli, S.Hut, M.Hut (Mitra Pembangunan GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009